

PROSEDUR AUDIT SUBSTANTIF PRIMER

Ananta Wahyu Sasongko
Farhani Kautsar Nugraha
Muhammad Dimar Alam



Prosedur Audit Substantif Primer

Ananta Wahyu Sasongko

Universitas Merdeka Malang

Farhani Kautsar Nugraha

Institut Teknologi dan Bisnis Tuban

Muhammad Dimar Alam

Universitas Brawijaya Malang

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 2014
Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau dipidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana di dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prosedur Audit Substantif Primer

Ananta Wahyu Sasongko

Farhani Kautsar Nugraha

Muhammad Dimar Alam

Rizka Dibi Arryanti Saputri

ISBN:

E-ISBN:

QRCBN:

Juni 2024

18,2x25,7cm; vi+264 hlm.

Kata Sambutan

Penulisan buku merupakan salah satu tanggung jawab utama dosen sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Publikasi karya ilmiah melalui buku ajar maupun buku referensi memberikan kontribusi penting bagi mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan, saya menyambut karya Ananta Wahyu Sasongko, dosen di Universitas Merdeka Malang, yang telah berhasil menulis buku berjudul “Prosedur Audit Substantif Primer” dengan topik auditing. Buku ini merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman Ananta selama bekerja sebagai praktisi di Ernst & Young serta sebagai dosen di Universitas Merdeka Malang.

Semoga upaya Ananta dalam penulisan buku ini dapat menginspirasi akademisi lain, baik yang memiliki latar belakang praktisi maupun akademisi, untuk menyebarkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diseminasi karya ilmiah ini diharapkan memberikan nilai tambah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta praktik bisnis di industri. Dengan semakin banyaknya akademisi yang memiliki pengalaman industri dan mampu menulis buku, diharapkan kontribusi mereka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan industri di Indonesia akan semakin besar.

Saya yakin bahwa buku ini akan memberikan manfaat signifikan bagi praktisi dan akademisi, khususnya bagi semua pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan. Buku ini diharapkan menjadi panduan dan sumber informasi yang berguna dalam menentukan langkah yang tepat bagi mahasiswa dan auditor pemula dalam menghadapi audit laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan dan kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terjaga. Selamat dan sukses kepada Penulis, teruslah berprestasi.

Malang, 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Merdeka Malang

Prof. Dr. H. Fajar Supanto, M.Si. *

*Profesor Fajar Supanto telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya berjudul “Manajemen strategi organisasi publik dan privat” yang diterbitkan oleh penerbit Empatdua Media pada tahun 2019 dan “Model pembangunan ekonomi desa berbasis agro ekowisata sebagai strategi pengembangan ekonomi kawasan” yang diterbitkan oleh penerbit Media Nusa Creative pada tahun 2020.

Kata Pengantar

Dengan penuh kebahagiaan dan rasa bangga, kami mempersembahkan buku "Prosedur Audit Substantif Primer" kepada para pembaca yang berminat mendalami dunia praktik audit laporan keuangan, khususnya bagi auditor pemula dan mahasiswa akuntansi. Buku ini disusun berdasarkan kombinasi pemahaman teoritis mengenai audit serta pengalaman praktis yang kami peroleh selama bertahun-tahun bekerja sebagai auditor di salah satu firma akuntan publik terbesar di dunia, Ernst & Young.

Selama perjalanan karier kami, kami telah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam aspek auditing dan tantangan dunia industri auditing, yang membentuk dasar kuat dalam penulisan buku ini. Pengalaman lapangan ini memberikan wawasan praktis yang kami integrasikan dengan pengetahuan teoritis, sehingga buku ini mampu menyajikan materi yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga kaya akan contoh-contoh dari praktik nyata di industri auditing di Indonesia.

Selain pengalaman praktik, buku ini juga diperkaya dengan pengetahuan dan wawasan teoritis yang kami peroleh sebagai dosen dan peneliti dalam bidang audit di Universitas Merdeka Malang, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, dan Universitas Brawijaya. Dengan menggabungkan pengalaman profesional di lapangan dengan pendekatan akademis yang mendalam, kami berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang praktik audit, khususnya pelaksanaan prosedur substantif pada berbagai akun dalam laporan keuangan.

Pembahasan dalam buku ini berfokus pada tahap prosedur substantif dalam audit laporan keuangan. Oleh karena itu, seluruh penjelasan dan langkah-langkah yang diuraikan hanya terbatas pada tahapan ini. Analisis dan diskusi yang disajikan akan mendalam mengenai prosedur substantif, mencakup metode, teknik, serta pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya prosedur substantif dalam konteks audit laporan keuangan.

Kami berkomitmen untuk menyajikan materi audit dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan praktik audit di dunia industri. Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, profesional pemula, serta siapa pun yang ingin mendalami dunia audit. Melalui buku ini, kami berusaha memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang audit keuangan.

Malang, 2024

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Prosedur Audit Substantif Primer	1
1.1 Pendahuluan tentang PSP	2
1.2 Posisi PSP dalam Tahapan Audit Laporan Keuangan	4
Arsi Sebagai Dasar Pengembangan Prosedur Audit Substantif Primer	7
2.1 Arsi pada Laporan Posisi Keuangan	9
2.2 Arsi pada Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain	10
PSP pada Akun Kas dan Setara Kas	13
3.1 PSP dan Arsi pada Akun Kas dan Setara Kas	15
3.1.1 Konfirmasi Bank	15
3.1.2 Rekonsiliasi Bank	17
3.1.3 Pisah Batas (<i>Cut Off</i>) Kas dan Setara Kas	19
3.1.4 Valuasi Kas dan Setara Kas dalam Valuta Asing	20
PSP pada Akun Efek yang Dapat Diperdagangkan	22
4.1 PSP dan Arsi pada Akun Efek YDD	25
4.1.1 Verifikasi Eksistensi dan Kepemilikan Efek	25
4.1.2 Konfirmasi Reviu Rinci atas Efek	27
4.1.3 Penilaian Harga Pasar Efek	29

4.1.4 Valuasi Efek Berdasarkan Aturan Dalam PSAK	31
PSP pada Akun Piutang Usaha	33
5.1 PSP dan Asersi pada Akun Piutang Usaha	34
5.1.1 Kesesuaian Buku Besar dan Buku Pembantu	35
5.1.2 Penerimaan Kas Setelah Tanggal Neraca	38
5.1.3 Prosedur <i>Rollforward</i> Piutang	38
5.1.4 Pisah Batas (<i>Cut Off</i>) Piutang Usaha	39
5.1.5 Uji Penurunan Nilai Piutang Usaha	40
5.1.6 Penyesuaian Lain Piutang Usaha	41
5.1.7 Piutang Usaha dalam Mata Uang Asing	41
5.1.8 Saldo Kredit Piutang Usaha	42
PSP pada Akun Persediaan	45
6.1 PSP dan Asersi pada Akun Persediaan	47
6.1.1 Pengamatan Fisik Persediaan (<i>Stock Opname</i>)	47
6.1.2 Konfirmasi Persediaan yang Dipegang oleh Pihak Lain	49
6.1.3 Rekonsiliasi Kompilasi Mutasi Persediaan dengan Buku Besar	51
6.1.4 Prosedur <i>Rollforward</i>	53
6.1.5 Pisah Batas Persediaan (<i>Cut Off</i>)	55
6.1.6 Kesesuaian Penilaian Persediaan dengan PSAK	56
6.1.7 Uji Nilai Terpulihkan Persediaan (<i>Net Realizable Value/NRV</i>)	58
PSP pada Akun Beban Dibayar Dimuka	61
7.1 PSP dan Asersi pada Akun Beban Dibayar Dimuka	63

7.1.1 Verifikasi Keberadaan dan Kesesuaian Penilaian.....	63
PSP pada Akun Investasi pada Afiliasi	65
8.1 PSP dan Asersi pada Akun Investasi pada Afiliasi.....	67
8.1.1 Verifikasi Eksistensi dan Kepemilikan	67
8.1.2 Tinjauan Notulen Rapat atas Aktivitas Investasi.....	68
8.1.3 Penilaian Investasi dengan Kebijakan Akuntansi.....	70
8.1.4 Pengujian Penurunan Nilai Investasi	71
PSP pada Akun-Akun Transaksi dengan Pihak Berelasi	74
9.1 PSP dan Asersi pada Akun Pihak Berelasi.....	76
9.1.1 Verifikasi Saldo Akun dengan Pihak-Pihak Berelasi ..	77
9.1.2 Penilaian dan Valuasi Akun Pihak-Pihak Berelasi	79
9.1.3 Uji Pisah Batas Akun Pihak-Pihak Berelasi	81
9.1.4 Penyisihan Piutang Antarperusahaan.....	83
PSP pada Akun Piutang Jangka Panjang, Deposito non-kini, dan Aset Keuangan Jangka Panjang Lainnya	86
10.1 PSP dan Asersi pada Akun Piutang Jangka Panjang, Deposito non-kini, dan Aset Keuangan Jangka Panjang Lainnya	89
10.1.1 Verifikasi Keberadaan dan Kepemilikan.....	89
10.1.2 Penilaian Aset Keuangan Jangka Panjang.....	91
PSP pada Akun Aset Tetap.....	93
11.1 PSP dan Asersi pada Akun Aset Tetap	95
11.1.1 Kesesuaian Buku Pembantu dengan Buku Besar	96
11.1.2 Penambahan, Pengurangan, atau Penghapusan	97
11.1.3 Sewa, Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap.....	98

11.1.4 Deplesi dan Rekalkulasi Depresiasi Aset Tetap	100
11.1.5 Pengujian Penurunan Nilai Aset Tetap.....	101
PSP pada Akun Aset Takberwujud.....	103
12.1 PSP dan Asersi pada Akun Aset Takberwujud	105
12.1.1 Bukti Keberadaan Aset Takberwujud	105
12.1.2 Pengujian Penurunan Nilai Aset Takberwujud.....	107
PSP pada Akun Pinjaman	109
13.1 PSP dan Asersi pada Akun Pinjaman	112
13.1.1 Verifikasi Pinjaman dan Kewajiban Terkait	112
13.1.2 Inspeksi Kontrak Pinjaman	114
13.1.3 Kepatuhan pada Ketentuan Kontrak Pinjaman.....	115
PSP pada Akun Utang Usaha.....	117
14.1 PSP dan Asersi pada Akun Utang Usaha	119
14.1.1 Kesesuaian Buku Besar dan Buku Pembantu atas Akun Utang Usaha	119
14.1.2 Review Item Tidak Biasa (<i>Unusual Item Review</i>)....	120
14.1.3 Cut off Utang Usaha	121
14.1.4 Menelusuri Utang Usaha yang Tidak Tercatat.....	122
14.1.5 Analisis Saldo Pemasok/Vendor	125
14.1.6 Valuasi Saldo Utang Usaha yang ada dalam Mata Uang Asing	126
PSP pada Akun Perpajakan.....	128
15.1 PSP dan Asersi pada Akun Perpajakan	133
15.1.1. Rekonsiliasi Pendapatan Akuntansi dengan Pendapatan Pajak	134

15.1.2. Provisi untuk Pajak Penghasilan	136
15.1.3. Penurunan Nilai Aset Pajak Tangguhan	139
15.1.4. Mutasi Saldo Akun Pajak Penghasilan.....	141
15.1.5. Provisi untuk Posisi Pajak Tertentu.....	143
15.1.6. Dasar Pencatatan Transaksi Perpajakan dengan Pihak Berelasi.....	146
PSP pada Akun Beban Akrua, Kewajiban Lainnya dan Pendapatan Ditangguhkan	149
16.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Akrua, Kewajiban Lainnya dan Pendapatan Ditangguhkan	152
16.1.1. Kecocokan dan Kelengkapan Bukti Dokumen Pendukung Beban Akrua.....	152
16.1.2. Dana Jangka Panjang Terkait Imbalan Kerja dan Pensiun	153
16.1.3. Pengujian Kesesuaian Kewajiban Lainnya.....	155
16.1.4. Tinjauan Konfirmasi dari Pengacara Perusahaan .	157
16.1.5. Penelusuran Beban Akrua yang Tidak Tercatat ...	159
PSP pada Akun Liabilitas Jangka Panjang dan Angsuran (<i>Lease</i>)	161
17.1. PSP dan Asersi Kewajiban Jangka Panjang dan Angsuran	164
17.1.1. Biaya Bunga Utang Jangka Panjang dan Kepatuhan dengan Perjanjian.....	164
17.1.2. Inspeksi Perjanjian Pinjaman/Angsuran Baru	166
17.1.3 Identifikasi dan Pemeriksaan Agunan	167

17.1.4 Verifikasi Eksistensi, Valuasi, Kelengkapan, Pengungkapan dan Kewajiban.....	169
PSP pada Akun Derivatif, Hedging, Komitmen & Kontinjensi	172
18.1. PSP dan Asersi pada Akun Derivatif, Hedging, Komitmen & Kontinjensi	175
18.1.1. Verifikasi Keberadaan dan Kepemilikan	176
18.1.2. Tinjauan Rinci Notulen dan Bukti Lainnya atas Derivatif, Hedging, Komitmen & Kontinjensi	178
18.1.3. Penyelidikan Kelengkapan Derivatif.....	179
18.1.4. Identifikasi Derivatif Tersembunyi atau Tak Terduga	181
18.1.5. Uji Nilai Wajar Derivatif.....	183
18.1.6. Penyelidikan Kelengkapan Komitmen Penting....	184
18.1.7. Identifikasi Kontinjensi Penting.....	186
PSP pada Akun-Akun Ekuitas	188
19.1. PSP dan Asersi pada Akun Derivatif, Hedging, Komitmen & Kontinjensi	191
19.1.1 Pemeriksaan Akta Perusahaan dan Skedul Rekonsiliasi Ekuitas	191
19.1.2 Pemeriksaan Notulen atas Transaksi Ekuitas.....	193
19.1.3 Penyelidikan atas Perjanjian Opsi Saham	195
19.1.4 Kesesuaian Pembayaran Dividen	197
PSP pada Akun Pendapatan/Penjualan	200
20.1. PSP dan Asersi pada Akun Pendapatan/Penjualan..	203
20.1.1 Tinjauan Analitis Pendapatan Keseluruhan	203

20.1.2 Prosedur Pengakuan Pendapatan.....	204
PSP pada Akun Pendapatan Lainnya	206
21.1. PSP dan Asersi pada Akun Pendapatan Lainnya.....	209
21.1.1 Tinjauan dan analisis konten	209
PSP pada Akun Pendapatan Keuangan	212
22.1. PSP dan Asersi pada Akun Pendapatan Keuangan..	215
22.1.1 Tinjauan Pendapatan Bunga dan Dividen.....	215
22.1.2 Tinjauan Perubahan Nilai Investasi	216
PSP pada Akun Beban Pokok Penjualan (HPP)	218
23.1. PSP dan Asersi pada Akun HPP	221
23.1.1 Perbandingan Beban Pokok Penjualan dengan Periode Sebelumnya.....	222
23.1.2 Pemeriksaan Inputan Material dan Tidak Biasa....	223
PSP pada Akun Beban Gaji	225
24.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Gaji	228
24.1.1 Analisis Komprehensif atas Beban Gaji	229
24.1.2 Analisis Beban Imbalan Pasca Kerja	230
PSP pada Akun Beban Penjualan	233
25.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Penjualan.....	235
25.1.1 Analisis Konten Beban Penjualan	236
25.1.2 Tinjauan Item Signifikan & Tidak Biasa	238
PSP pada Akun Beban Umum dan Administrasi	241
26.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Umum & Administrasi	244

26.1.1 Analisis konten pada Beban Umum Administrasi dan Beban Umum Lainnya	244
26.1.2 Tinjauan Dokumentasi Penunjang.....	246
26.1.3 Kelengkapan Konfirmasi dari Pengacara Perusahaan	249
PSP pada Akun Beban Keuangan	252
27.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Keuangan.....	255
27.1.1 Analisis Beban Keuangan	255
27.1.2 Pengujian Perubahan Nilai Investasi	257
Referensi	259
Tentang Penulis	262

Prosedur Audit Substantif Primer

Prosedur Audit Substantif Primer (PSP) adalah bagian dari setiap perikatan audit laporan keuangan yang dirancang oleh Auditor untuk mengumpulkan bukti mengenai potensi salah saji dalam laporan keuangan (1). Auditor yang dimaksud dalam buku ini adalah semuanya Auditor Eksternal yang bekerja pada sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam melakukan audit, auditor menjalankan PSP ini di semua perikatan auditnya pada setiap akun yang dinilai signifikan, terlepas dari hasil penilaian risiko gabungan (*Combined Risk Assesment/CRA*) yang telah dilakukannya (2).

1.1 Pendahuluan tentang PSP

PSP dapat terdiri dari konfirmasi pihak eksternal, pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo akun dan pengungkapan, serta prosedur analitis (3). PSP juga dapat dipahami sebagai proses atau metode yang digunakan auditor untuk menemukan atau mencegah kesalahan penilaian, pengakuan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan (4). PSP menghasilkan catatan atas beberapa temuan transaksi keuangan yang tidak sesuai dan auditor melakukan dokumentasi atas prosedur tersebut untuk ditinjau lebih lanjut nantinya pada tahap review dan proses pelaporan (5). PSP juga dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membuat kesimpulan tentang apakah informasi keuangan yang diberikan oleh entitas memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam beberapa referensi lain, PSP biasa disebut dengan “prosedur pengujian substantif pada akun” (6). Di dalam buku ini, istilah prosedur substantif tersebut kami ubah dengan istilah

prosedur substantif primer (PSP) karena semua isi dalam buku ini lebih banyak membahas mengenai prosedur substantif yang bersifat primer, yaitu prosedur primer tersebut dapat ditambahkan dengan prosedur substantif pendukung lain yang dirasa perlu oleh auditor dalam menjalankan auditnya. Kelanjutan dari prosedur substantif primer ini dapat disebut menjadi prosedur substantif sekunder, *secondary/supplementary substantive procedures*, atau juga prosedur analitis (*analytical procedures*)(6).

Beberapa contoh prosedur substantif yang telah dikenal luas dalam dunia praktik audit meliputi:

- Memeriksa dan menguji kebenaran saldo akun-akun di dalam laporan keuangan.
- Memeriksa transaksi-transaksi keuangan dengan jumlah besar, penting, atau tidak biasa.
- Membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan dengan periode sebelumnya, atau membandingkan kewajarannya dengan laporan keuangan dari perusahaan pada industri sejenis.
- Melakukan validasi atas asumsi dan estimasi yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.
- Analisis hubungan antara aktivitas bisnis dan akun-akun laporan keuangan.

Dalam tahap pelaporan atau tahap penarikan kesimpulan dari hasil audit, evaluasi auditor atas pengendalian internal, proses dan alur penyusunan laporan keuangan, dan interpretasi hasil prosedur substantif serta prosedur analitis merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan opini audit (7).

Pengetahuan ini menjadikan PSP tidak bisa menjadi pengganti tunggal dari semua prosedur tersebut.

Evaluasi ini membantu auditor untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang diberikan oleh entitas telah dikumpulkan, diproses, dan dilaporkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil dari evaluasi tersebut juga membantu auditor dalam membuat kesimpulan dan memberikan opini audit yang objektif dan berkualitas.

1.2 Posisi PSP dalam Tahapan Audit Laporan Keuangan

Dalam audit laporan keuangan, terdapat beberapa tahapan umum yang biasanya dilakukan oleh tim audit, mulai dari tahap penerimaan klien hingga tahap pelaporan (8,9). Tahapan audit yang kami rincikan di bagian ini adalah gabungan antara pengetahuan yang kami peroleh secara teoritis dan dari pengalaman praktek di industri akuntan publik. Tahapan-tahapan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pra Audit & Perencanaan

- a. Pemahaman Bisnis Klien (*Understanding the Business*)
- a. Penilaian Risiko Gabungan (*Combined Risk Assesment*)
- b. Respons Risiko Gabungan (*Combined Risk Response*)
- c. Penganggaran Audit
- d. Surat Perikatan Audit
- e. Penilaian Awal atas Sistem Pengendalian Internal
- f. Penilaian Awal atas Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*)

- g. Pengumpulan Informasi Awal dan Uji Substantif Awal

2. Audit Interim

- a. Pernyataan Independensi
- b. Perhitungan Materialitas Audit – Interim
- c. Penyelesaian Etik (*Ethics Clearance*)
- d. *Significant Class of Transaction* (SCOT) Pick
- e. Uji Penelusuran Siklus atau *Walkthrough* (WT)
- f. Uji Pengendalian atau *Test of Control* (TOC)
- g. *Audit Strategy Memorandum* (ASM)

3. Eksekusi (*Execution*)

- a. Perhitungan Materialitas Audit – Akhir Tahun
- b. Pemilihan Akun Signifikan
- c. **PROSEDUR SUBSTANTIF**
- d. Prosedur Analitis
- e. Uji Transaksi Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Events Review*)
- f. Pengecekan Kelengkapan Kertas Kerja

4. Kesimpulan (*Conclusion*)

- a. Perhitungan Materialitas Audit – Pelaporan
- b. *Summary Review Memorandum* (SRM)
- c. Pengambilan Opini Audit

5. Pelaporan (*Reporting*)

- a. Surat Representasi Manajemen (*Representation Letter*)
- b. Persetujuan Pencetakan Laporan Auditor Independen
- c. Komunikasi dengan Pihak Manajemen dan Dewan Direksi (*Management Letter*)
- d. Perilisan Laporan Auditor Independen

Pembahasan dalam buku ini berfokus pada poin **3C** yang disebutkan di atas, yaitu tahap **prosedur substantif**. Oleh karena itu, seluruh penjelasan dan langkah-langkah yang diuraikan hanya terbatas pada tahapan ini. Analisis dan diskusi yang disajikan akan mendalam mengenai prosedur substantif, mencakup metode, teknik, serta pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya prosedur substantif dalam konteks audit laporan keuangan.

Aseri Sebagai Dasar Pengembangan Prosedur Audit Substantif Primer

Asersi dalam konteks auditing merujuk pada pernyataan atau klaim yang dibuat oleh manajemen entitas terkait dengan laporan keuangan. Asersi ini mencakup berbagai aspek laporan keuangan yang perlu diverifikasi oleh auditor untuk memastikan bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Untuk memenuhi standar audit yang ditetapkan oleh SA 500: Bukti Audit, pemahaman mendalam atas asersi merupakan keharusan bagi auditor dalam merancang prosedur yang relevan guna memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dengan memahami "alasan di balik pelaksanaan suatu prosedur audit" atau asersi tersebut, auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan lebih efisien dan efektif (10).

Hal ini penting karena asersi memberikan dasar bagi auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Sehingga, pemahaman yang komprehensif tentang asersi memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang relevan secara lebih baik, memastikan bahwa bukti audit yang dikumpulkan memadai dan tepat untuk mendukung opini audit yang diberikan.

Laporan Posisi Keuangan
Eksistensi (E)
Valuasi (V)
Kelengkapan (C)
Hak dan Kewajiban (R)
Penyajian dan Pengungkapan (P)

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain
Keterjadian (O)
Pengukuran (M)
Kelengkapan (C)
Penyajian dan Pengungkapan (P)

2.1 Asersi pada Laporan Posisi Keuangan

Secara umum, asersi ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama pada Laporan Keuangan: Laporan Posisi Keuangan:

1. **Keberadaan (*Existence*):** Mengindikasikan bahwa aset, liabilitas, dan transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan benar-benar ada atau telah terjadi.
2. **Penilaian (*Valuation*):** Menjamin bahwa aset, liabilitas, dan transaksi telah dicatat pada jumlah yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
3. **Kelengkapan (*Completeness*):** Menjamin bahwa semua transaksi, akun, dan pengungkapan yang seharusnya disertakan dalam laporan keuangan telah dicatat dan dilaporkan.
4. **Hak dan Kewajiban (*Rights and Obligations*):** Memastikan bahwa entitas benar-benar memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang dilaporkan.
5. **Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*):** Memastikan bahwa semua komponen laporan posisi keuangan disajikan dengan tepat dan

bahwa pengungkapan yang diperlukan telah dilakukan secara memadai.

2.2 Asersi pada Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain

Dalam konteks laporan laba rugi, berikut adalah penjelasan mengenai asersi yang terkandung di dalamnya:

1. **Keterjadian (*Occurrence*):** Mengindikasikan bahwa transaksi pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi benar-benar terjadi selama periode akuntansi yang dilaporkan.
2. **Pengukuran (*Measurement*):** Menjamin bahwa pendapatan dan beban yang dicatat dalam laporan laba rugi telah diukur dan dihitung dengan tepat. Ini termasuk memastikan bahwa semua perhitungan terkait pendapatan dan beban, seperti amortisasi, penyusutan, dan biaya lainnya, telah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
3. **Kelengkapan (*Completeness*):** Memastikan bahwa semua pendapatan dan beban yang seharusnya dicatat dalam periode akuntansi telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan laba rugi.
4. **Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*):** Memastikan bahwa semua unsur dalam laporan laba rugi telah disajikan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa semua pengungkapan yang diperlukan mengenai pendapatan dan beban telah

dilakukan dengan jelas dan lengkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Misalkan auditor sedang memeriksa akun "Piutang Usaha" dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Auditor harus mengembangkan prosedur substantif yang menasar setiap asersi terkait akun tersebut. Untuk asersi keberadaan (*existence*), auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada sejumlah pelanggan untuk memverifikasi bahwa saldo piutang yang tercatat benar-benar ada. Contoh prosedur ini adalah mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan terbesar yang menyatakan bahwa mereka memiliki utang sebesar jumlah tertentu kepada perusahaan pada tanggal pelaporan.

Untuk asersi kelengkapan (*completeness*), auditor dapat melakukan uji petik terhadap faktur penjualan setelah tanggal pelaporan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi penjualan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan yang tidak dicatat dalam piutang usaha. Contohnya, auditor dapat memeriksa beberapa faktur dari bulan Januari untuk memastikan bahwa semua penjualan Desember telah dicatat sebagai piutang pada akhir tahun.

Untuk asersi hak dan kewajiban (*rights and obligations*), auditor dapat memeriksa dokumen pendukung seperti kontrak penjualan dan bukti pengiriman untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki hak hukum atas piutang yang dilaporkan. Sebagai contoh, auditor dapat memeriksa kontrak penjualan dengan pelanggan tertentu untuk memastikan bahwa piutang tersebut sah dan diakui oleh kedua belah pihak.

Untuk asersi penilaian dan alokasi (valuation and allocation), auditor dapat menilai kebijakan manajemen dalam mengidentifikasi dan mencadangkan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Contoh prosedurnya adalah menguji perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan meninjau riwayat pembayaran pelanggan dan mengevaluasi kemungkinan piutang tidak tertagih.

Untuk asersi penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure), auditor dapat memeriksa catatan atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa piutang usaha telah diungkapkan dengan tepat, termasuk rincian terkait kebijakan kredit, umur piutang, dan cadangan kerugian. Sebagai contoh, auditor dapat memverifikasi bahwa catatan atas laporan keuangan mencakup informasi yang memadai tentang kebijakan penagihan dan risiko kredit.

Dengan mengarahkan prosedur substantif pada setiap asersi ini, auditor dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan bahwa piutang usaha disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa semua aspek dari akun yang diperiksa telah diuji dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga meningkatkan keandalan dan integritas laporan keuangan.

PSP pada Akun Kas dan Setara Kas

Cash and cash equivalents atau di Indonesia disebut Kas dan Setara Kas adalah aset perusahaan yang bersifat paling likuid. Perusahaan harus mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Dalam Laporan Posisi Keuangan, kas hampir selalu diajikan pada urutan pertama, setelah itu diikuti dengan akun piutang usaha, dan seterusnya sesuai dengan urutan tingkat likuiditasnya. Kas umumnya terdiri dari uang kertas, uang logam, dan dana yang tersedia di kasir perusahaan yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Pada umumnya, perusahaan membagi kas menjadi dua kelompok, yaitu uang yang tersedia tunai di brankas atau kasir perusahaan (*cash on hand*), dan uang yang disimpan di bank (*cash in bank*). Bank ini disajikan dalam laporan keuangan secara terpisah, biasanya berdasarkan nama bank di mana uang disimpan.

Uang yang disimpan di bank mencakup dana yang disimpan dalam rekening bank perusahaan, termasuk rekening giro (*current account*) dan rekening tabungan (*savings account*). Dana ini digunakan untuk transaksi yang lebih besar dan pembayaran yang memerlukan metode non-tunai, seperti transfer bank, cek, dan pembayaran elektronik. Perusahaan biasanya memiliki beberapa rekening bank, dan masing-masing rekening ini dicatat secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan dan dijelaskan mengenai alokasi dan tujuan penggunaannya.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat likuid yang mudah untuk dikonversikan sebagai kas, dan sangat dekat tanggal jatuh temponya sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Umumnya hanya investasi dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan saja yang memenuhi syarat

sebagai setara kas. Contoh setara kas diantaranya Deposito, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Berharga (*commercial paper*), dan dana yang ditempatkan pada pasar uang. Karena definisinya adalah sesuatu yang dengan mudah dan cepat dikonversikan menjadi uang tunai tanpa mempengaruhi nilai pasar aset tersebut, tidak jarang pula logam mulia juga termasuk dalam definisi setara kas ini.

3.1 PSP dan Asersi pada Akun Kas dan Setara Kas

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
C	Kas dan Setara Kas					
1	Konfirmasi Bank	X	X	X	X	X
2	Rekonsiliasi Bank	X	X	X		
3	Pisah Batas	X		X		
4	Valuasi Kas dalam Valas		X			

3.1.1 Konfirmasi Bank

Prosedur konfirmasi bank adalah salah satu PSP yang paling penting dalam proses audit pada akun kas dan setara kas. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo kas dan rekening perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan prosedur ini, auditor memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan.

Langkah pertama dalam prosedur konfirmasi bank adalah meminta klien untuk mengirimkan surat konfirmasi eksternal ke bank yang mengelola rekening perusahaan. Surat konfirmasi ini harus mencakup permintaan untuk verifikasi saldo kas yang ada pada akhir periode pelaporan serta informasi tentang rekening-

rekening yang ditutup selama periode berjalan. Bank akan menanggapi permintaan ini dengan memberikan pernyataan tertulis yang mencantumkan saldo kas dan informasi terkait lainnya yang relevan.

Setelah menerima konfirmasi dari bank, auditor akan membandingkan rincian yang diberikan oleh bank dengan catatan internal perusahaan. Proses ini melibatkan verifikasi kembali rincian buku besar bank dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank. Auditor harus memastikan bahwa setiap perbedaan antara saldo yang tercatat di buku besar perusahaan dan saldo yang dilaporkan oleh bank dapat dijelaskan dan dijustifikasi.

Jika ada rekening yang ditutup selama periode audit, auditor harus memverifikasi bahwa penutupan tersebut telah dicatat dengan benar dalam buku besar perusahaan. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen penutupan rekening dan memastikan bahwa saldo akhir dari rekening yang ditutup telah dipindahkan dengan benar ke rekening lain atau telah dicatat sebagai penarikan tunai.

Selain verifikasi langsung dari saldo kas, auditor juga harus memeriksa adanya pembatasan atau pembekuan pada rekening bank yang dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan. Hal ini termasuk memverifikasi perjanjian kredit atau fasilitas pinjaman yang terkait dengan rekening bank tersebut.

Secara keseluruhan, prosedur konfirmasi bank merupakan langkah kritis dalam proses audit yang membantu auditor untuk memberikan keyakinan bahwa saldo kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui prosedur ini, auditor dapat

mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam pencatatan transaksi kas, sehingga membantu menjaga integritas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

3.1.2 Rekonsiliasi Bank

Melakukan pemeriksaan rekonsiliasi bank merupakan bagian penting dalam PSP yang bertujuan untuk memastikan keakuratan data dalam buku besar perusahaan dan memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi pada akun bank dicatat dengan benar dan tepat. Proses ini adalah elemen krusial dalam mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Auditor memulai dengan memperoleh laporan bank dan membandingkannya dengan catatan buku besar perusahaan. Setiap perbedaan antara saldo bank dan saldo buku besar harus diidentifikasi dan dianalisis. Misalnya, ada kemungkinan perbedaan disebabkan oleh cek yang belum dicairkan atau setoran yang belum tercatat. Auditor harus memeriksa setiap item ini untuk memastikan bahwa mereka telah dipertimbangkan dengan benar dalam rekonsiliasi saldo kas.

Otorisasi pada rekonsiliasi bank juga menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan ini. Auditor harus memastikan bahwa proses rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan prinsip pengendalian internal yang baik. Hal ini termasuk memastikan bahwa rekonsiliasi dilakukan oleh individu yang berwenang dan tidak terlibat dalam pencatatan transaksi kas sehari-hari. Pemisahan

tugas ini penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan keakuratan rekonsiliasi.

Selain itu, auditor perlu memastikan bahwa setiap langkah dalam proses rekonsiliasi bank didokumentasikan dengan baik dan bahwa bukti pendukung disertakan. Ini termasuk laporan bank, catatan transaksi, dan bukti otorisasi. Dokumentasi yang lengkap dan akurat membantu auditor dalam menelusuri setiap transaksi dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat atau disembunyikan.

Proses ini juga mencakup pemeriksaan terhadap penyesuaian yang dibuat selama rekonsiliasi. Penyesuaian ini mungkin termasuk pencatatan beban bank yang belum dicatat, penyesuaian atas kesalahan pencatatan, atau penghapusan item yang tidak valid. Auditor harus memastikan bahwa semua penyesuaian ini didukung oleh bukti yang memadai dan dicatat dengan benar dalam buku besar perusahaan.

Selanjutnya, auditor harus mengevaluasi nominal akhir dalam rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa jumlah ini tepat dan mencerminkan saldo kas yang sebenarnya ada di bank. Ini termasuk memverifikasi bahwa semua item yang belum selesai, seperti cek yang belum dicairkan atau setoran dalam perjalanan, telah diperhitungkan dengan benar.

Pemeriksaan rekonsiliasi bank juga mencakup evaluasi terhadap prosedur perusahaan untuk menangani transaksi-transaksi luar biasa atau tidak biasa. Auditor harus memastikan bahwa transaksi-transaksi ini telah ditinjau dan disetujui oleh pihak yang berwenang, serta dicatat dengan benar dalam laporan keuangan.

Dengan melakukan pemeriksaan rekonsiliasi bank yang komprehensif, auditor dapat memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan akurat dan andal. Proses ini membantu dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan serta kecurangan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan, dan memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai posisi keuangan perusahaan.

3.1.3 Pisah Batas (*Cut Off*) Kas dan Setara Kas

Auditor menguji pisah batas penerimaan dan pengeluaran kas atas transaksi yang dilakukan melalui rekening bank yang berbeda pada tanggal neraca dan setelah tanggal neraca. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo kas dan setara kas yang dilaporkan pada tanggal neraca benar-benar mencerminkan saldo kas yang ada pada saat itu, tanpa memasukkan transaksi yang seharusnya diakui pada periode berikutnya.

Dalam proses ini, auditor akan meneliti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca. Auditor akan memeriksa apakah transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Misalnya, penerimaan kas yang sebenarnya diterima setelah tanggal neraca tidak boleh diakui sebagai saldo kas pada tanggal neraca. Demikian pula, pengeluaran kas yang terjadi setelah tanggal neraca tidak boleh mengurangi saldo kas pada tanggal neraca.

Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk mendeteksi apakah terdapat saldo kas dan setara kas yang seharusnya tidak diakui oleh perusahaan pada tanggal neraca namun masuk dalam

laporan posisi keuangan perusahaan. Perusahaan harus cermat dalam mengidentifikasi apakah saldo kas yang diungkapkan dalam laporan posisi keuangan adalah benar-benar saldo kas pada tanggal neraca. Persoalan yang kerap terjadi adalah perusahaan mengakui saldo kas yang masih akan diterima sebagai kas yang diungkapkan pada tanggal neraca.

Untuk mengatasi masalah ini, auditor akan memeriksa bukti-bukti pendukung seperti laporan bank, bukti setoran, dan bukti pengeluaran kas. Auditor juga akan memeriksa catatan transaksi untuk memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang tepat. Misalnya, auditor akan memeriksa setoran bank yang terjadi setelah tanggal neraca untuk memastikan bahwa setoran tersebut tidak dimasukkan dalam saldo kas pada tanggal neraca.

Selain itu, auditor akan meninjau kebijakan dan prosedur perusahaan terkait dengan pengakuan kas dan setara kas. Auditor akan mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor juga akan memeriksa apakah ada transaksi yang tidak biasa atau signifikan yang memerlukan perhatian khusus.

3.1.4 Valuasi Kas dan Setara Kas dalam Valuta Asing

Prosedur ini adalah menguji kesesuaian penilaian kas dan setara kas yang berupa uang dalam mata uang asing, surat berharga atau logam mulia. Pengujian kas dalam mata uang asing umumnya akan dinilai pada kurs tengah Bank Indonesia sebagaimana diwajibkan pada PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010b).

Pengujian valuasi surat berharga akan diuji kesesuaian penilaiannya pada harga wajar pada saat tanggal periode pelaporan. Pengujian valuasi logam mulia umumnya akan diuji dan dibandingkan dengan harga pasar atau uji nilai wajar pada saat akhir periode pelaporan.

Pada intinya, auditor akan membandingkan antara harga yang diterima atau dibayar dengan nilai wajar pada saat tanggal pelaporan untuk kas dan setara kas yang bersifat non kas. Nilai wajar bisa didapatkan dari sumber yang independen, seperti kutipan harga pasar, harga transaksi antar pihak, atau menggunakan metodologi lain yang diyakini tepat oleh auditor untuk menghitung nilai wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Auditor juga tentunya akan memperhatikan tingkat keyakinan dan reliabilitas sumber informasi yang digunakan dalam penilaian tersebut (11).

PSP pada Akun Efek yang Dapat Diperdagangkan

Dalam konteks Akuntansi dan Audit, efek yang dapat diperdagangkan adalah akun yang berisi efek atau surat berharga yang dapat diperdagangkan: meliputi berbagai jenis instrumen keuangan yang memiliki likuiditas tinggi dan dapat dengan mudah dibeli atau dijual di pasar sekunder. Berikut beberapa jenis efek yang dapat diperdagangkan:

1. Saham (Shares/Stocks): Instrumen kepemilikan di sebuah perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas sebagian dari laba perusahaan dan asetnya.
2. Obligasi (Bonds): Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang membayar bunga secara periodik dan mengembalikan nilai nominalnya pada saat jatuh tempo.
3. Reksa Dana (Mutual Funds): Portofolio yang terdiri dari berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi.
4. Sertifikat Deposito (Certificates of Deposit, CDs): Produk investasi yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu dan suku bunga tertentu.
5. Surat Berharga Komersial (Commercial Papers): Instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
6. Treasury Bills (T-Bills): Instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

7. Exchange-Traded Funds (ETFs): Reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek, yang mencakup berbagai aset seperti saham, komoditas, atau obligasi.
8. Saham Preferen (Preferred Stocks): Saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya dalam hal dividen dan aset perusahaan jika terjadi likuidasi, namun biasanya tidak memiliki hak suara.
9. Right Issues: Hak bagi pemegang saham existing untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah sebelum saham tersebut ditawarkan kepada publik.
10. Warrants: Instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Semua instrumen di atas memiliki likuiditas tinggi dan dapat dengan mudah diperdagangkan di pasar sekunder, menjadikannya sebagai efek yang dapat diperdagangkan. Likuiditas tinggi ini berarti instrumen tersebut dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa menyebabkan perubahan signifikan pada harganya. Selain itu, instrumen-instrumen ini juga menawarkan fleksibilitas bagi investor dalam mengelola portofolio mereka, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi pasar.

Selain dapat diperdagangkan oleh orang pribadi (investor ritel), efek-efek tersebut juga sering dimiliki dan diperdagangkan oleh perusahaan (investor institusi). Investor institusi, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan manajer aset, memiliki peran signifikan dalam pasar keuangan karena volume transaksi mereka yang besar dan strategi investasi yang kompleks. Mereka

biasanya memiliki tim manajemen investasi yang terampil dan berpengalaman dalam menganalisis pasar dan membuat keputusan investasi yang optimal.

Investor institusi atau perusahaan yang memiliki efek yang dapat diperdagangkan dalam neracanya ini juga seringkali menjadi klien bagi Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP menyediakan berbagai layanan audit dan konsultasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka akurat, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan transparan. Proses audit mencakup pemeriksaan mendalam terhadap portofolio investasi, termasuk efek yang dapat diperdagangkan, untuk menilai nilai wajar, kepatuhan terhadap kebijakan investasi, dan pengendalian internal yang efektif.

4.1 PSP dan Asersi pada Akun Efek YDD

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
D	Efek YDD					
1	Verifikasi Kepemilikan	X			X	
2	Konfirmasi Reviu Rinci	X		X	X	X
3	Penilaian Harga Pasar		X			X
4	Valuasi Berdasarkan PSAK		X			X

4.1.1 Verifikasi Eksistensi dan Kepemilikan Efek

Verifikasi eksistensi dan kepemilikan efek adalah proses penting dalam PSP yang memastikan bahwa sekuritas yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada dan dimiliki oleh entitas yang melaporkannya. Proses ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaporan

keuangan, serta memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa sekuritas tersebut memang dimiliki oleh entitas yang bersangkutan.

Langkah pertama dalam verifikasi ini adalah konfirmasi tertulis kepada sekuritas. Auditor mengirimkan permintaan konfirmasi langsung kepada pihak ketiga yang memegang atau mengelola sekuritas tersebut, seperti kustodian, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Permintaan konfirmasi ini berisi informasi mengenai jumlah dan jenis sekuritas yang dimiliki, yang kemudian diverifikasi oleh pihak ketiga tersebut. Setelah menerima balasan dari pihak ketiga, auditor memeriksa konsistensi informasi tersebut dengan catatan internal perusahaan. Setiap perbedaan antara catatan internal dan konfirmasi balik harus diselidiki dan dijelaskan.

Selanjutnya, auditor melakukan pemeriksaan status kepemilikan langsung. Banyak investor individu dan institusi menggunakan platform online untuk membeli dan menjual sekuritas. Auditor dapat mengakses akun-akun ini, dengan izin yang sesuai, untuk memverifikasi langsung status kepemilikan dan transaksi terbaru yang dilakukan melalui aplikasi tersebut. Selain itu, rekening dana nasabah yang dipegang oleh bank atau lembaga keuangan lainnya menunjukkan saldo dana yang digunakan untuk transaksi sekuritas.

Auditor dapat memeriksa rekening ini untuk memastikan bahwa jumlah dana yang dicatat sesuai dengan jumlah sekuritas yang dibeli atau dijual. Broker statements, atau laporan yang disediakan oleh pialang yang mencatat semua transaksi sekuritas yang dilakukan oleh klien mereka, juga diperiksa oleh auditor untuk memverifikasi detail transaksi, seperti pembelian, penjualan, dan kepemilikan akhir dari sekuritas.

Selain itu, auditor juga harus memeriksa dokumentasi dan bukti fisik. Meskipun sebagian besar sekuritas sekarang berwujud elektronik, beberapa masih berbentuk fisik, seperti sertifikat saham atau obligasi. Auditor perlu memeriksa keberadaan dan keaslian sertifikat ini untuk memastikan kepemilikan yang sah.

4.1.2 Konfirmasi Reviu Rinci atas Efek

Konfirmasi Reviu Rinci atas Efek merupakan salah satu PSP yang krusial dalam proses prosedur audit substantif. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan balasan konfirmasi untuk memperoleh bukti mengenai eksistensi efek yang dapat diperdagangkan, serta untuk mengidentifikasi adanya hak gadai, janji, atau kepentingan keamanan lainnya atas efek tersebut.

Dalam konteks ini, auditor mengirimkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga, seperti bank, broker, atau lembaga kustodian yang memegang efek yang dapat diperdagangkan. Permintaan ini berisi pertanyaan yang spesifik tentang jumlah dan jenis efek yang dimiliki oleh perusahaan, serta informasi mengenai adanya klaim pihak ketiga atas efek tersebut.

Setelah menerima balasan dari pihak ketiga, auditor akan melakukan reviu rinci atas informasi yang diberikan. Proses ini mencakup beberapa langkah penting. Pertama, auditor memastikan bahwa efek yang dilaporkan dalam konfirmasi sesuai dengan catatan internal perusahaan. Hal ini melibatkan verifikasi jumlah, jenis, dan nilai efek yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, auditor menilai keberadaan dan keabsahan efek yang dilaporkan. Ini mencakup pemeriksaan fisik (jika efek berbentuk fisik) atau verifikasi melalui sistem elektronik (jika efek berbentuk elektronik). Auditor harus memastikan bahwa efek tersebut benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca.

Selain itu, auditor juga memeriksa adanya hak gadai, janji, atau kepentingan keamanan lainnya yang mungkin melekat pada efek tersebut. Hal ini penting untuk menentukan apakah ada pembatasan terhadap penggunaan efek oleh perusahaan. Informasi mengenai hak gadai atau janji biasanya tercantum dalam balasan konfirmasi atau dalam dokumen perjanjian yang terkait dengan efek tersebut.

Auditor juga perlu memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh selama proses konfirmasi dan revidi dicatat dengan lengkap dan akurat dalam dokumentasi audit. Ini termasuk mencatat setiap perbedaan yang ditemukan antara catatan internal perusahaan dan balasan konfirmasi, serta tindak lanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.

Melalui Konfirmasi Revidi Rinci atas Efek, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya mengenai efek yang dapat diperdagangkan. Prosedur ini membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan efek, serta memastikan bahwa tidak ada klaim pihak ketiga yang tidak terungkap yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, prosedur ini berperan penting dalam menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan perusahaan.

4.1.3 Penilaian Harga Pasar Efek

Penilaian harga pasar atas efek yang dapat diperdagangkan adalah salah satu Prosedur Standar Pemeriksaan (PSP) yang juga penting dalam proses prosedur audit substantif. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah kunci untuk memastikan bahwa nilai efek yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai wajar yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah mengidentifikasi efek yang dapat diperdagangkan yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Auditor mengumpulkan informasi terkait jenis, jumlah, dan karakteristik efek tersebut dari catatan internal perusahaan dan dokumentasi lainnya.

Setelah identifikasi, auditor mengumpulkan data harga pasar untuk efek tersebut. Data harga pasar biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti bursa efek, penyedia layanan data keuangan, atau laporan penilaian pihak ketiga. Sumber data ini harus independen dan dapat diandalkan untuk memastikan bahwa harga pasar yang digunakan dalam penilaian akurat dan objektif.

Langkah berikutnya adalah membandingkan nilai tercatat dari efek tersebut dengan harga pasar yang telah dikumpulkan. Auditor menghitung selisih antara nilai tercatat dan harga pasar untuk menentukan apakah ada penurunan nilai (*impairment*) atau keuntungan yang belum direalisasi (*unrealized gain*). Jika nilai pasar efek lebih rendah dari nilai tercatat, auditor harus memastikan bahwa perusahaan telah mencatat penurunan nilai yang sesuai dalam laporan keuangannya. Sebaliknya, jika ada

keuntungan yang belum direalisasi, auditor harus memverifikasi bahwa keuntungan tersebut telah diungkapkan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selain penilaian harga pasar, auditor juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai efek yang dapat diperdagangkan. Faktor-faktor ini meliputi kondisi ekonomi makro, perubahan dalam industri terkait, kinerja keuangan penerbit efek, serta likuiditas dan volatilitas pasar. Auditor harus mengevaluasi apakah faktor-faktor ini telah dipertimbangkan secara memadai oleh manajemen dalam menentukan nilai efek.

Auditor juga harus memastikan bahwa semua prosedur dan hasil penilaian didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini mencakup sumber data harga pasar, metode penilaian yang digunakan, serta perhitungan dan analisis yang dilakukan. Dokumentasi yang lengkap dan akurat sangat penting untuk mendukung temuan audit dan memastikan bahwa penilaian harga pasar dilakukan dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan penilaian harga pasar atas efek yang dapat diperdagangkan, auditor harus bekerja dengan hati-hati dan objektif. Penilaian yang akurat dan dapat diandalkan sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai nilai efek yang dimiliki. Prosedur ini membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi dalam pelaporan nilai efek, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dengan demikian, penilaian harga pasar atas efek

yang dapat diperdagangkan berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

4.1.4 Valuasi Efek Berdasarkan Aturan Dalam PSAK

Valuasi efek yang dapat diperdagangkan merupakan aspek krusial dalam pelaporan keuangan perusahaan. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memberikan pedoman tentang bagaimana efek tersebut harus diukur dan dilaporkan (12). PSAK 71 dan PSAK 68 adalah standar utama yang relevan dalam konteks ini.

PSAK 71 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan, termasuk model penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit ekspektasian. Sementara itu, PSAK 68 menyediakan kerangka kerja untuk mengukur nilai wajar dan mengharuskan pengungkapan informasi tentang pengukuran nilai wajar, yang penting untuk menentukan nilai wajar dari efek yang dapat diperdagangkan.

Prosedur substantif yang digunakan auditor untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK mencakup beberapa langkah sistematis. Pertama, auditor mengumpulkan informasi dan dokumentasi mengenai efek yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk jenis, jumlah, dan harga perolehan efek tersebut. Selanjutnya, auditor membuat checklist berisi poin-poin kunci dari PSAK 71 dan PSAK 68 untuk memastikan setiap efek dinilai sesuai standar tersebut. Ini mencakup klasifikasi dan pengukuran efek, serta pengujian apakah ada indikasi penurunan nilai dan pengukuran kerugian penurunan nilai berdasarkan model *expected credit loss* yang disyaratkan PSAK 71.

Pengujian nilai wajar dilakukan menggunakan PSAK 68, di mana auditor menggunakan harga pasar jika tersedia atau teknik penilaian lain seperti model arus kas yang didiskonto jika harga pasar tidak tersedia. Selain itu, auditor menilai adanya penurunan nilai (impairment) pada efek berdasarkan PSAK 71, yang melibatkan identifikasi bukti penurunan nilai dari sumber eksternal atau internal serta menghitung expected credit loss menggunakan data historis, informasi saat ini, dan prakiraan kondisi masa depan.

Akhirnya, auditor memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi yang relevan dan cukup mengenai nilai wajar dan penurunan nilai efek dalam laporan keuangan mereka sesuai dengan persyaratan PSAK 71 dan PSAK 68. Checklist yang digunakan auditor berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan semua aspek penting dari PSAK telah dipatuhi, termasuk klasifikasi yang benar, metode penilaian nilai wajar yang sesuai, indikasi penurunan nilai, pengukuran kerugian kredit ekspektasian, dan pengungkapan yang tepat. Dengan prosedur yang mendalam ini, auditor memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan perusahaan.

PSP pada Akun Piutang Usaha

Piutang Usaha adalah sejumlah uang atau hak yang akan diterima yang disebabkan karena penjualan barang maupun jasa kepada pelanggan perusahaan secara kredit. Piutang usaha juga umum dikenal sebagai piutang dagang, terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain. Penjualan secara kredit sangat umum dilakukan di dunia industri. Di industri, umumnya perusahaan A menjual barang kepada perusahaan B, dengan termin jatuh tempo pembayaran dirancang antara 30 sampai dengan 90 hari setelah penjualan dilakukan.

Piutang usaha yang dilaporkan sebagai aset perusahaan harus didukung oleh dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan (*invoice*), surat pengiriman barang (*shipping order*), dan surat pesanan (*purchase order*). Dokumen-dokumen ini harus didokumentasikan dengan baik oleh perusahaan sebagai bukti bahwa piutang usaha benar-benar merupakan aset perusahaan dan dapat tertagih pada waktu yang akan datang. Auditor dalam melakukan prosedur audit akan memeriksa dokumen-dokumen ini untuk memastikan kesesuaian dari saldo piutang usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

5.1 PSP dan Asersi pada Akun Piutang Usaha

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
E	Piutang Usaha					
1	Kesesuaian Buku Besar & Detil	X		X		
2	Penerimaan Kas Berikutnya	X	X		X	X
3	Prosedur <i>Roll-Forward</i>	X	X	X		
4	Pisah Batas Piutang Usaha	X		X		

5	Cadangan Penurunan Nilai		X			X
6	Penyesuaian Lain		X			X
7	Piutang Mata Uang Asing		X			X
8	<i>Credit & Unusual Balance</i>	X		X		

5.1.1 Kesesuaian Buku Besar dan Buku Pembantu

Dalam pemeriksaan ini, auditor menelusuri dan menguji seluruh akun piutang usaha berdasarkan ambang batas/materialitas yang telah ditetapkan auditor pada tahap perencanaan audit. Auditor akan meminta buku besar lalu mengolah data awal buku besar piutang yang mereka terima sebagai berikut:

- Mencocokkan saldo buku besar dengan saldo yang tertera pada akun piutang usaha di Laporan Posisi Keuangan perusahaan.
- Membuat urutan pelanggan mulai dari saldo piutang terbesar sampai dengan terkecil.
- Memilah pelanggan yang memiliki saldo di atas materialitas yang ditetapkan oleh auditor. Pelanggan yang memiliki saldo di atas materialitas auditor akan lebih diutamakan untuk diperiksa terlebih dahulu.

Perusahaan klien harus menyediakan format buku besar yang mudah dipahami oleh auditor, umumnya berisi nomor, nama pelanggan, kode pelanggan, dan saldo piutang usaha pelanggan. Saldo keseluruhan buku besar juga harus sama atau tie up dengan akun piutang usaha pada Laporan Posisi Keuangan perusahaan. Selisih atas jumlah ini sebisa mungkin tidak terjadi pada saat pemberian data ke auditor.

Selain itu, auditor juga akan melakukan cross-check dengan data pendukung lainnya seperti daftar penjualan, bukti penerimaan pembayaran, dan informasi kontrak, untuk memastikan bahwa saldo piutang usaha yang tercantum pada laporan keuangan sesuai dengan data pendukung yang ada. Auditor juga akan memeriksa apakah ada piutang yang sudah terlalu lama tertunggak (*doubtful accounts*) dan melaporkan hal ini kepada klien dan meminta pendapat klien mengenai hal ini. Pengecekan ini sangat penting untuk memastikan bahwa piutang usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam PSP ini, auditor juga akan mengevaluasi saldo piutang usaha. Auditor akan memeriksa dokumen pendukung untuk memastikan bahwa saldo tersebut akurat dan bahwa transaksi yang mendasarinya benar-benar terjadi. Dokumen pendukung seperti faktur penjualan, surat pengiriman barang, dan surat pesanan adalah bagian penting dalam memverifikasi saldo piutang usaha. Berita acara penyelesaian pekerjaan juga sangat penting jika perusahaan menjual barang parsial atau menjual jasa proyek pembangunan by progress. Ini membantu auditor memastikan bahwa transaksi penjualan yang terjadi telah selesai dan diterima oleh pelanggan, sehingga piutang usaha dapat dicatat sebagai piutang usaha yang tertagih.

Dalam pengambilan sampel transaksi yang akan diperiksa, umumnya auditor akan melakukan random sampling dan meminta klien untuk mempersiapkan data pendukung dari daftar transaksi yang masuk dalam sampel tersebut untuk memeriksa saldo piutang usaha. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa piutang usaha tercatat dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, jika klien memiliki SOP

penjualan yang baik dan konsisten diterapkan, maka pemeriksaan ini tidak akan menyulitkan klien.

Memastikan bahwa saldo piutang usaha yang dilaporkan pada laporan keuangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah salah satu tugas utama auditor. Melakukan prosedur audit yang baik dan memeriksa dokumen pendukung yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercayai dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Ini juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, dan mencegah intensi manajemen untuk mengakui piutang usaha di atas nilai sesungguhnya.

Auditor akan melakukan prosedur konfirmasi eksternal atas semua saldo piutang usaha yang material. Setelah melakukan pemeriksaan awal pada buku besar piutang usaha, auditor akan melakukan verifikasi piutang usaha kepada pelanggan. Biasanya auditor akan melakukan pemeriksaan ini dengan memilih beberapa pelanggan yang memiliki saldo piutang usaha terbesar yang terdaftar pada buku besar piutang usaha perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat konfirmasi eksternal kepada pelanggan yang berisi saldo yang tertera pada buku besar piutang usaha perusahaan. Format surat konfirmasi biasanya juga disediakan oleh auditor, namun harus ditandatangani oleh pihak perusahaan. Umumnya yang melakukan tanda tangan pada surat konfirmasi ini adalah Direktur Keuangan perusahaan.

5.1.2 Penerimaan Kas Setelah Tanggal Neraca

Selain menjalankan prosedur konfirmasi, auditor juga akan melakukan prosedur penerimaan kas setelah tanggal neraca (subsequent cash receipt). Prosedur ini dilakukan dengan cara auditor menentukan sampel pelanggan yang memiliki saldo piutang, lalu meminta data rekening koran setelah tanggal neraca dan memeriksa uang masuk ke rekening perusahaan. Misal, jika perusahaan mengakui piutang usaha dari PT X per tanggal 31 Desember 2022, dan sampai dengan 31 Januari 2023 tidak ada sama sekali uang masuk dari PT X untuk pembayaran piutang usaha, maka validitas dan realibilitas dari buku besar piutang usaha tersebut mungkin akan dianggap tidak valid dan tidak reliabel. Atas hal ini, kunci kebenaran akun piutang usaha adalah dengan mencantumkan saldo dan daftar pelanggan dengan benar dan sesuai dengan periode pengakuannya.

5.1.3 Prosedur *Rollforward* Piutang

Auditor melakukan audit interim pada saat sebelum tanggal neraca. Selain melakukan wakthrough (WT) dan test of control (TOC), biasanya auditor juga melakukan prosedur lain diluar kedua prosedur tersebut untuk mengurangi banyaknya pekerjaan dan prosedur yang harus dilakukan di audit akhir tahun. Prosedur tersebut umumnya adalah prosedur substantif yang seharusnya dilakukan setelah menerima laporan keuangan di tanggal neraca, namun dikerjakan pada tanggal laporan keuangan saat interim (biasanya per bulan September).

Prosedur *rollforward* piutang usaha adalah prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi piutang usaha pada tanggal neraca. Dalam prosedur ini, auditor akan mempelajari dan

menelusuri peristiwa atau transaksi yang terjadi dari tanggal interim (tanggal sebelum tanggal neraca) sampai tanggal neraca.

Dengan melakukan hal ini, auditor dapat memastikan bahwa semua piutang yang dilaporkan pada tanggal neraca benar-benar ada dan tertagih. Prosedur rollforward piutang usaha juga mengharuskan auditor untuk mengambil sampel baru yang representatif dari populasi piutang usaha, dan melakukan pengujian yang sesuai untuk memvalidasi keterkaitan dan keabsahan piutang. Ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada tanggal neraca akurat dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

5.1.4 Pisah Batas (*Cut Off*) Piutang Usaha

Prosedur pisah batas (*cut off*) piutang usaha adalah prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi apakah semua penjualan dan piutang usaha yang terjadi pada akhir periode sudah dilaporkan pada tanggal neraca. Dalam prosedur ini, auditor akan memeriksa daftar penjualan, penagihan, dokumen pengiriman, dan dokumen pendukung lainnya sebelum dan setelah akhir periode untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi pada periode tersebut sudah dilaporkan pada laporan keuangan.

Prosedur pisah batas piutang usaha sangat penting dilakukan karena dapat membantu auditor mengidentifikasi volume penjualan dan saldo piutang usaha, serta memastikan bahwa penjualan dan piutang usaha tersebut telah dicatat pada periode yang tepat. Ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan dan laba rugi

entitas pada tanggal neraca akurat dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

5.1.5 Uji Penurunan Nilai Piutang Usaha

Uji Penurunan Nilai Piutang Usaha adalah prosedur audit yang digunakan untuk menentukan apakah saldo piutang usaha perusahaan dalam laporan keuangan benar-benar dapat diterima dan layak diakui sebagai piutang usaha atau pendapatan. Dalam uji penurunan nilai piutang usaha, auditor akan melakukan evaluasi terhadap portofolio piutang usaha perusahaan dan memperhitungkan faktor-faktor seperti kemungkinan gagal bayar, jangka waktu pembayaran, dan kondisi usaha pelanggan perusahaan. Apabila auditor menemukan adanya indikasi piutang usaha yang tidak dapat diterima, auditor akan membuat catatan dan menyarankan perusahaan untuk membuat penyesuaian atas penurunan nilai piutang usaha sebesar jumlah yang sesuai.

Lebih jauh lagi, auditor juga akan memeriksa bahan bukti dan dokumen pendukung untuk menentukan apakah perusahaan memiliki basis yang wajar untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih. Dalam hal ini, auditor juga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah piutang tak tertagih sebelumnya, waktu yang sudah berlalu sejak tanggal jatuh tempo, dan perkembangan dalam usaha klien. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memperlihatkan kondisi piutang usaha dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.1.6 Penyesuaian Lain Piutang Usaha

Penyesuaian lain pada piutang usaha merupakan penyesuaian yang mungkin diperlukan selain dari penyesuaian cadangan kerugian penurunan nilai. Penyesuaian ini dapat mencakup berbagai macam modifikasi atau koreksi terhadap nilai piutang usaha yang tercatat. Misalnya, penyesuaian yang timbul akibat kesalahan pencatatan, perubahan dalam persyaratan pembayaran, atau adanya diskon dan rabat yang belum diperhitungkan.

Penyesuaian lain juga mungkin mencakup penyesuaian nilai tukar untuk piutang dalam mata uang asing atau perubahan dalam estimasi waktu pengumpulan piutang yang mempengaruhi nilai kini piutang tersebut. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa piutang usaha yang dilaporkan mencerminkan nilai realisasi bersih yang dapat diharapkan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

5.1.7 Piutang Usaha dalam Mata Uang Asing

Prosedur Substantif Pemeriksaan (PSP) terhadap piutang usaha dalam mata uang asing dilakukan oleh auditor dengan cara meneliti saldo piutang tersebut dan mengkonversinya ke dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10. PSAK 10 mensyaratkan bahwa entitas harus mengukur dan mencatat transaksi mata uang asing pada saat pengakuan awal dengan menggunakan kurs tukar yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut terjadi.

Selain itu, pada setiap tanggal pelaporan, entitas diwajibkan untuk mengkonversi piutang usaha dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsional (dalam hal ini Rupiah) menggunakan kurs penutup. Kurs penutup ini adalah kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan, yang mencerminkan nilai tukar yang paling akurat dan terkini. Perubahan nilai tukar yang terjadi setelah tanggal pelaporan namun sebelum laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan, tidak mempengaruhi angka yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika perubahan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap entitas.

Penilaian yang cermat terhadap piutang usaha dalam mata uang asing sangat penting karena fluktuasi nilai tukar dapat berdampak signifikan pada nilai piutang yang dilaporkan, yang pada gilirannya mempengaruhi penilaian kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas. Dengan demikian, penerapan yang tepat dari PSAK 10 memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar dan sesuai dengan kenyataan ekonomi yang ada.

5.1.8 Saldo Kredit Piutang Usaha

Prosedur pemeriksaan saldo kredit piutang usaha dilakukan oleh auditor melalui serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Langkah pertama yang diambil oleh auditor adalah mengidentifikasi daftar saldo kredit piutang usaha dan menelusuri seluruh item yang ada berdasarkan prinsip materialitas, yaitu ambang batas

pengujian yang telah ditetapkan untuk menentukan signifikansi suatu item atau kelompok item dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan.

Auditor kemudian membandingkan informasi yang tercatat dalam catatan akuntansi perusahaan dengan dokumen pendukung yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi nota piutang usaha, faktur penjualan, dan laporan pembayaran dari pelanggan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap saldo kredit yang tercatat memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi.

Selain melakukan verifikasi terhadap saldo kredit, auditor juga menilai efektivitas prosedur pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan terkait dengan piutang usaha. Pengendalian internal yang baik meliputi prosedur untuk pengelolaan piutang yang efektif, pengawasan yang memadai, serta pencegahan dan deteksi kesalahan atau kecurangan. Auditor mengevaluasi apakah perusahaan telah menerapkan prosedur pengendalian ini secara konsisten dan efektif, serta memastikan bahwa pengendalian tersebut berfungsi dengan baik dalam mengelola piutang usaha.

Auditor juga melakukan analisis terhadap saldo kredit piutang usaha untuk mengidentifikasi potensi risiko penurunan nilai atau kebijakan pencadangan yang mungkin diperlukan. Ini termasuk menilai apakah ada pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan atau menunjukkan tanda-tanda gagal bayar, dan apakah perusahaan telah mencadangkan jumlah yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian dari piutang tak tertagih.

Dengan mengikuti prosedur-prosedur tersebut, auditor berusaha untuk memastikan bahwa saldo kredit piutang usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan mencerminkan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan mengenai keandalan laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Melalui penerapan prosedur pemeriksaan yang komprehensif, auditor berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan.

PSP pada Akun Persediaan

Persediaan adalah aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau dalam proses produksi untuk dijual. Menurut PSAK 14: Persediaan, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, termasuk barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, serta persediaan barang jadi yang diproduksi atau barang dalam proses produksi (13). Standar ini juga mencakup bahan baku dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. PSAK 14 menetapkan bahwa persediaan harus diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Pengamatan fisik persediaan dilakukan oleh klien dan didampingi oleh auditor sebagai bagian dari prosedur audit untuk mengevaluasi prosedur dan pengendalian internal manajemen dalam mencatat, menghitung, dan mengendalikan fisik persediaan. Proses ini melibatkan penghitungan fisik langsung atas persediaan yang dimiliki perusahaan dan memastikan bahwa jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi sesuai dengan jumlah fisik yang ada. Auditor juga mengevaluasi keandalan prosedur pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa persediaan tercatat secara akurat dan lengkap.

Persediaan merupakan bagian penting dari laporan keuangan perusahaan dan memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan serta kinerja perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara cermat dan detail untuk memastikan bahwa saldo persediaan yang dilaporkan pada

laporan keuangan akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Prosedur audit yang cermat meliputi verifikasi terhadap penghitungan fisik, penilaian terhadap kebijakan penilaian persediaan, serta pengujian atas penurunan nilai persediaan jika diperlukan. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi yang benar dan wajar mengenai persediaan.

6.1 PSP dan Asersi pada Akun Persediaan

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
F	Persediaan					
1	Stock Opname	X	X	X	X	
2	Konfirmasi Persediaan yang Dipegang oleh Pihak Lain	X		X	X	
3	Rekonsiliasi Kompilasi Persediaan dengan Buku Besar		X	X		
4	Prosedur Roll-forward		X	X		
5	Cutoff Persediaan	X		X		
6	Penilaian sesuai dengan Kebijakan Akuntansi		X			X
7	Pengujian Nilai Realisasi Bersih		X			

6.1.1 Pengamatan Fisik Persediaan (*Stock Opname*)

Persediaan umumnya berbentuk aset fisik yang sifat dan pengakuannya sesuai dengan penjelasan pada PSAK 14: Persediaan. PSAK 14 menjelaskan bahwa persediaan meliputi barang yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, barang dalam proses produksi untuk dijual, dan bahan baku atau

perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Standar ini menegaskan bahwa persediaan harus diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Prosedur stock opname atau pengamatan fisik persediaan dilakukan oleh klien dengan pendampingan auditor sebagai bagian dari prosedur audit untuk mengevaluasi prosedur dan pengendalian internal manajemen dalam mencatat, menghitung, dan mengendalikan fisik persediaan. Stock opname adalah proses penghitungan fisik langsung atas persediaan yang dimiliki perusahaan. Auditor hadir untuk memastikan bahwa penghitungan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur yang ditetapkan, serta untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal yang terkait dengan pengelolaan persediaan efektif.

Dalam konteks stock opname, auditor akan melakukan berbagai langkah untuk memastikan keandalan data persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut mencakup pengamatan langsung terhadap penghitungan fisik yang dilakukan oleh staf perusahaan, pengecekan ulang terhadap beberapa item persediaan untuk memastikan keakuratan hitungan, dan verifikasi bahwa semua persediaan telah dihitung dan dicatat dengan benar. Selain itu, auditor akan memeriksa prosedur penyesuaian yang dilakukan jika terdapat perbedaan antara jumlah fisik dengan catatan akuntansi, serta mengevaluasi apakah penyesuaian tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Persediaan merupakan komponen signifikan dalam laporan keuangan perusahaan dan memiliki dampak besar terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara cermat dan mendalam untuk memastikan bahwa saldo persediaan yang dilaporkan pada laporan keuangan akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Ini termasuk verifikasi terhadap penghitungan fisik, penilaian terhadap kebijakan penilaian persediaan yang diterapkan oleh manajemen, serta pengujian terhadap penurunan nilai persediaan jika diperlukan. Dengan prosedur audit yang teliti, auditor dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi yang benar dan wajar mengenai persediaan, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

6.1.2 Konfirmasi Persediaan yang Dipegang oleh Pihak Lain

Dalam konteks audit, konfirmasi persediaan yang dipegang oleh pihak lain merupakan prosedur penting untuk memastikan keakuratan laporan keuangan perusahaan terkait dengan persediaan yang sebenarnya dimiliki oleh pihak ketiga. Apabila perusahaan mengungkapkan atau berpotensi untuk mengungkapkan nilai persediaan yang secara fisik dipegang oleh vendor atau pihak ketiga lainnya, auditor harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengakuan persediaan tersebut sesuai dengan kenyataan.

Auditor akan mengirimkan konfirmasi eksternal kepada vendor atau pihak ketiga yang menyimpan persediaan tersebut untuk mendapatkan verifikasi independen mengenai

kepemilikan dan kondisi persediaan. Konfirmasi eksternal ini merupakan permintaan tertulis yang dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga, meminta mereka untuk mengonfirmasi jumlah dan status persediaan yang mereka pegang atas nama perusahaan yang sedang diaudit. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai keberadaan dan kepemilikan persediaan.

Melalui konfirmasi ini, auditor dapat memastikan bahwa persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan tidak termasuk aset yang sebenarnya tidak atau belum dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, konfirmasi eksternal membantu mencegah pengakuan berlebih atas aset yang bukan milik perusahaan, yang dapat mengakibatkan *overstatement* dalam laporan keuangan. Selain itu, konfirmasi ini juga memberikan jaminan bahwa persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga berada dalam kondisi yang sesuai dengan catatan perusahaan dan dapat diandalkan untuk tujuan pelaporan keuangan.

Proses konfirmasi persediaan yang dipegang oleh pihak lain melibatkan beberapa langkah. Pertama, auditor mengidentifikasi persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga berdasarkan catatan perusahaan. Kedua, auditor menyusun dan mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak ketiga yang relevan. Ketiga, auditor menunggu tanggapan dari pihak ketiga dan membandingkan informasi yang diterima dengan catatan perusahaan. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, auditor akan melakukan prosedur tambahan untuk menyelidiki dan menyelesaikan perbedaan tersebut.

Secara keseluruhan, konfirmasi persediaan yang dipegang oleh pihak lain merupakan bagian integral dari prosedur audit untuk memastikan keandalan dan keakuratan laporan keuangan.

Prosedur ini mendukung integritas laporan keuangan dengan memberikan bukti independen mengenai kepemilikan dan kondisi persediaan, serta membantu mencegah pengakuan berlebih atas aset yang tidak seharusnya diakui oleh perusahaan. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara benar dan adil, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

6.1.3 Rekonsiliasi Kompilasi Mutasi Persediaan dengan Buku Besar

Rekonsiliasi kompilasi mutasi persediaan dengan buku besar adalah prosedur substantif penting dalam proses audit yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi catatan persediaan perusahaan. Dalam prosedur ini, auditor melakukan pemeriksaan mendetail terhadap mutasi persediaan yang dicatat dalam buku besar perusahaan dan membandingkannya dengan laporan dan catatan lain yang relevan.

Langkah pertama dalam prosedur rekonsiliasi ini adalah auditor mengidentifikasi dan meneliti inputan transaksi yang secara jumlah signifikan dan tidak biasa. Ini dilakukan untuk mendeteksi adanya anomali atau ketidaksesuaian yang mungkin mengindikasikan kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan persediaan. Auditor akan menganalisis transaksi tersebut, memastikan bahwa semua inputan telah didokumentasikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur internal perusahaan.

Selain itu, auditor juga mengevaluasi kebijakan perusahaan dalam menentukan metode penilaian persediaan. Hal ini

mencakup penilaian apakah perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diperbolehkan berdasarkan PSAK 14, seperti metode FIFO (First In, First Out) dan metode rata-rata tertimbang (*weighted average*). Auditor memeriksa apakah metode yang digunakan konsisten dan diterapkan dengan benar dalam seluruh periode pelaporan, serta apakah metode tersebut memberikan gambaran yang akurat dan wajar tentang nilai persediaan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, auditor juga melakukan pengecekan terhadap catatan dan dokumen yang relevan. Ini termasuk memeriksa laporan penghitungan ulang fisik persediaan, jurnal pemindahan persediaan, dan dokumen pendukung lainnya yang mencerminkan mutasi persediaan selama periode audit. Auditor akan membandingkan catatan ini dengan entri dalam buku besar untuk memastikan bahwa semua perubahan dalam persediaan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan bukti fisik dan dokumentasi yang ada.

Prosedur rekonsiliasi ini memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, ini membantu auditor mendeteksi dan mengatasi potensi kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan persediaan. Kedua, ini memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat diandalkan. Ketiga, prosedur ini mendukung penerapan prinsip akuntansi yang benar, sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar tentang posisi keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, rekonsiliasi kompilasi mutasi persediaan dengan buku besar adalah bagian integral dari proses audit yang mendalam. Prosedur ini memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan perusahaan dengan memverifikasi

bahwa semua transaksi persediaan dicatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan melakukan pemeriksaan ini, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara benar.

6.1.4 Prosedur *Rollforward*

PSP rollforward pada akun persediaan adalah proses audit yang digunakan untuk menelusuri dan memverifikasi semua transaksi terkait persediaan yang terjadi antara tanggal interim dan tanggal neraca. Proses ini dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa semua perubahan dalam akun persediaan selama periode tersebut telah dicatat dengan benar dan akurat. Melalui prosedur ini, auditor berupaya memastikan bahwa saldo persediaan yang dilaporkan pada neraca mencerminkan kondisi aktual sesuai dengan periode berjalan.

Dalam menjalankan prosedur rollforward, auditor memulai dengan menelusuri semua peristiwa atau transaksi yang mempengaruhi akun persediaan setelah tanggal interim hingga tanggal neraca. Ini mencakup pemeriksaan terhadap transaksi pembelian dan penjualan persediaan, serta penyesuaian lain yang mungkin mempengaruhi saldo persediaan. Auditor akan memeriksa dokumentasi pendukung, seperti faktur pembelian, bukti penerimaan barang, dokumen penjualan, dan catatan pengeluaran barang, untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat secara akurat dalam buku besar.

Selanjutnya, auditor akan memeriksa apakah perusahaan telah mencatat dan memperhitungkan semua transaksi pembelian dan penjualan persediaan pada periode yang

berkenaan dengan benar. Ini termasuk memastikan bahwa setiap transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang tepat, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Auditor juga akan mengevaluasi apakah ada transaksi yang tidak biasa atau signifikan yang memerlukan perhatian khusus dan memastikan bahwa penanganan transaksi tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku.

Prosedur rollforward juga melibatkan verifikasi bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan konsisten dengan metode yang telah ditetapkan dan diakui dalam standar akuntansi yang berlaku. Auditor akan memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan metode penilaian persediaan, seperti FIFO (First In, First Out) atau rata-rata tertimbang (weighted average), secara konsisten dan benar selama periode berjalan. Selain itu, auditor akan memeriksa apakah ada perubahan dalam metode penilaian persediaan dan apakah perubahan tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan.

Melalui prosedur rollforward, auditor berupaya untuk memastikan bahwa saldo persediaan yang dilaporkan pada neraca akurat dan sesuai dengan periode berjalan. Proses ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan persediaan, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan melakukan prosedur ini, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa saldo persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar dan andal, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedur rollforward ini adalah langkah penting dalam proses audit untuk

memastikan integritas dan keakuratan laporan keuangan perusahaan.

6.1.5 Pisah Batas Persediaan (*Cut Off*)

Prosedur cut-off persediaan adalah langkah penting dalam proses audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi penjualan dan pembelian persediaan dicatat pada periode akuntansi yang benar. Prosedur ini melibatkan penelusuran informasi cut-off persediaan yang diperoleh selama pengamatan fisik dan membandingkannya dengan catatan akuntansi perusahaan terkait penjualan dan pembelian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang dicatat secara ganda (*double entry*) atau terlewatkan, sehingga saldo persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya.

Selama prosedur cut-off, auditor akan meninjau dokumen-dokumen yang relevan, seperti faktur penjualan, bukti penerimaan barang, dan catatan pengiriman, yang berada di sekitar tanggal cut-off. Auditor akan memastikan bahwa semua transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal cut-off telah dicatat dalam periode yang tepat. Misalnya, penjualan yang terjadi tepat sebelum akhir periode harus dicatat sebagai penjualan dalam periode tersebut, dan pembelian yang diterima tepat setelah akhir periode harus dicatat dalam periode berikutnya. Hal ini penting untuk mencegah adanya pengakuan pendapatan atau biaya yang tidak tepat yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Dengan melakukan prosedur cut-off secara cermat, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan

mencerminkan transaksi penjualan dan pembelian persediaan secara akurat dan tepat waktu. Prosedur ini juga membantu memastikan bahwa persediaan yang dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan dinilai dengan metode yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Secara keseluruhan, prosedur cut-off adalah langkah kritis dalam proses audit yang mendukung integritas dan keandalan laporan keuangan perusahaan.

6.1.6 Kesesuaian Penilaian Persediaan dengan PSAK

Menguji penilaian persediaan dan kesesuaiannya dengan PSAK 14: Persediaan merupakan aspek krusial dalam audit laporan keuangan. PSAK 14 menetapkan bahwa persediaan harus diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Dalam melaksanakan prosedur ini, auditor harus mengidentifikasi metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan dan mengevaluasi validitas serta relevansi metode tersebut dengan kondisi perusahaan saat ini.

Auditor akan memulai dengan memverifikasi metode penilaian persediaan yang diterapkan perusahaan. Metode yang umum digunakan meliputi FIFO (First In, First Out) dan rata-rata tertimbang, sementara metode LIFO (Last In, First Out) tidak diperbolehkan oleh PSAK 14. Auditor memastikan bahwa metode yang digunakan konsisten dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan metode penilaian sangat penting untuk menjaga keandalan laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya.

Selanjutnya, auditor akan menilai kecukupan dan validitas asumsi yang digunakan dalam perhitungan nilai persediaan. Ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti kondisi pasar, biaya produksi, dan potensi penurunan nilai persediaan. Auditor harus memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut realistis dan didukung oleh data yang memadai. Proses ini mencakup pengecekan dokumen pendukung, seperti faktur pembelian, laporan biaya produksi, dan data pasar terkini, untuk memastikan bahwa semua input yang digunakan dalam perhitungan penilaian persediaan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memastikan bahwa penilaian persediaan sesuai dengan PSAK 14, auditor juga membandingkan hasil penilaian dengan informasi lain yang tersedia, seperti harga pasar atau harga pembelian terkini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan tidak melebihi nilai realisasi bersihnya. Jika ditemukan perbedaan yang signifikan antara nilai yang dicatat dan harga pasar, auditor akan mengevaluasi penyebabnya dan menentukan apakah ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian nilai persediaan dalam laporan keuangan.

Jika diperlukan, auditor juga dapat melakukan pengujian sampel dan prosedur lainnya untuk memastikan keakuratan penilaian persediaan. Ini mencakup pengujian fisik persediaan, verifikasi terhadap catatan dan dokumen pendukung, serta analisis terhadap perhitungan penilaian yang dilakukan oleh manajemen. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan bukti tambahan bahwa metode penilaian yang digunakan telah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Secara keseluruhan, menguji penilaian persediaan dan kesesuaiannya dengan PSAK 14 adalah langkah penting dalam proses audit yang mendalam. Prosedur ini memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah akurat, dapat diandalkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya secara benar dan adil.

6.1.7 Uji Nilai Terpulihkan Persediaan (*Net Realizable Value*/NRV)

Uji Nilai Terpulihkan Persediaan (*Net Realizable Value*/NRV) adalah prosedur penting yang dilakukan auditor untuk memastikan ketepatan pengungkapan nilai persediaan dalam laporan keuangan. Prosedur ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah nilai persediaan yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya dapat direalisasikan melalui penjualan, setelah dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualan yang diperkirakan. Melalui pengujian NRV, auditor dapat memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan tidak melebihi nilai realisasi bersihnya.

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah auditor mengidentifikasi persediaan yang telah dianggap usang atau tidak lagi memiliki nilai jual yang signifikan. Auditor kemudian mengurangi nilai persediaan ini untuk mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Evaluasi ini melibatkan peninjauan terhadap laporan pengelolaan persediaan, analisis

umur persediaan, dan data penjualan historis. Dengan mengidentifikasi dan menghapus persediaan usang, auditor memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan hanya mencakup item yang masih memiliki nilai pasar.

Selanjutnya, auditor mengevaluasi dan memverifikasi bahwa nilai persediaan telah dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 14. Proses ini mencakup pengujian terhadap asumsi yang digunakan dalam penilaian nilai persediaan, seperti estimasi harga jual, biaya penyelesaian, dan biaya penjualan. Auditor memastikan bahwa asumsi-asumsi ini didasarkan pada data yang dapat diverifikasi dan realistis, serta tidak mengandung kesalahan atau bias yang dapat mempengaruhi akurasi penilaian.

Selain itu, auditor membandingkan nilai tercatat persediaan dengan harga pasar yang sebenarnya, atau yang disebut "nilai wajar" sesuai dengan PSAK 68. Auditor melakukan verifikasi ini dengan merujuk pada data harga pasar terkini, laporan penjualan, dan informasi industri untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan mencerminkan kondisi pasar saat ini. Jika terdapat perbedaan signifikan antara nilai tercatat dan harga pasar, auditor akan menilai apakah perlu dilakukan penyesuaian untuk mencerminkan nilai realisasi bersih yang sebenarnya.

Prosedur ini juga mencakup pengujian tambahan, seperti pengambilan sampel persediaan dan pengujian fisik untuk memastikan keakuratan catatan dan pencatatan persediaan. Auditor mungkin juga melakukan wawancara dengan manajemen dan staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

mendalam tentang proses penilaian dan pengungkapan persediaan.

Dengan melakukan Uji Nilai Terpulihkan Persediaan, auditor memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah akurat dan mencerminkan nilai realisasi bersih yang sebenarnya. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang posisi keuangan perusahaan, menghindari overstatement nilai aset, dan memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pemangku kepentingan. Uji NRV adalah langkah krusial dalam proses audit yang mendukung integritas dan keandalan laporan keuangan perusahaan.

PSP pada Akun Beban Dibayar Dimuka

Konten dari akun Beban Dibayar Dimuka sering kali mencakup polis asuransi (prepaid insurance) dan sewa dibayar dimuka (prepaid rent). Polis asuransi ini mencakup pembayaran premi asuransi untuk periode tertentu di masa depan, sementara sewa dibayar dimuka mencakup pembayaran sewa untuk masa mendatang. Kedua jenis beban ini mencerminkan pembayaran yang dilakukan di muka untuk manfaat yang akan diterima oleh perusahaan pada masa mendatang.

Namun demikian, isi dari akun Beban Dibayar Dimuka bisa bervariasi tergantung pada industri dan karakteristik klien. Meskipun polis asuransi dan sewa adalah contoh umum, terdapat kemungkinan adanya item lain yang dimasukkan ke dalam akun ini, terutama jika perusahaan memiliki kebutuhan spesifik atau mengikuti praktik industri tertentu.

Sebagai contoh, perusahaan di sektor manufaktur mungkin memiliki pembayaran dimuka untuk pengadaan bahan baku atau bahan penolong yang akan digunakan dalam proses produksi di masa mendatang. Perusahaan teknologi mungkin membayar layanan cloud computing atau lisensi perangkat lunak secara dimuka. Sedangkan perusahaan ritel mungkin melakukan pembayaran dimuka untuk iklan atau promosi di masa mendatang.

Oleh karena itu, isi dari akun Beban Dibayar Dimuka dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada industri dan kebijakan spesifik perusahaan. Auditor harus memahami konteks bisnis klien dengan cermat untuk mengidentifikasi dan memeriksa item-item yang termasuk dalam akun ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pembayaran dimuka yang signifikan dan relevan telah dicatat dengan benar dan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan adil.

7.1 PSP dan Asersi pada Akun Beban Dibayar Dimuka

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
G	Beban Dibayar Dimuka					
1	Verifikasi Eksistensi dan Valuasi	X	X	X	X	X

7.1.1 Verifikasi Keberadaan dan Kesesuaian Penilaian

Dalam melakukan verifikasi keberadaan beban dibayar di muka, seperti asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka, auditor mengadopsi serangkaian prosedur yang cermat dan terstruktur. Langkah pertama adalah memeriksa dokumen pendukung yang relevan, seperti polis asuransi dan perjanjian sewa, untuk memastikan keberadaan dan keabsahan beban dibayar di muka tersebut. Auditor juga menegaskan bahwa catatan atas beban dibayar di muka telah dicatat dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan, dan bahwa pencatatan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Selanjutnya, auditor melakukan uji terhadap saldo beban dibayar di muka untuk memastikan bahwa beban tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan harapan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, auditor meminta klien untuk menyediakan buku besar beban dibayar di muka yang mencakup daftar asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka, beserta dokumen pendukungnya. Klien bertanggung jawab untuk

memastikan ketersediaan dan keakuratan dokumen pendukung ini, yang menjadi landasan penting dalam proses verifikasi oleh auditor.

Selama prosedur verifikasi, auditor juga memeriksa tanggal dimulainya dan berakhirnya jangka waktu dari beban dibayar di muka untuk memastikan ketepatan periode pencatatan dan pengungkapan. Hal ini penting agar laporan keuangan mencerminkan kewajiban yang sebenarnya pada saat tertentu dan tidak mengabaikan perubahan signifikan dalam beban dibayar di muka.

Prosedur lanjutan yang dilakukan oleh auditor melibatkan rekalkulasi skedul amortisasi. Setelah meminta buku besar beban dibayar di muka dari klien, auditor menguji perhitungan amortisasi yang dilakukan perusahaan di dalam buku besar tersebut. Auditor membandingkan perhitungan amortisasi dengan metode yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, untuk memastikan kesesuaian dan kepatutan perhitungan tersebut. Auditor juga memverifikasi bahwa jumlah amortisasi beban dibayar di muka yang tercatat pada laporan keuangan sesuai dengan buku besar beban dibayar di muka yang diterima.

Melalui serangkaian prosedur ini, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa pengungkapan beban dibayar di muka dalam laporan keuangan perusahaan adalah akurat, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan mencerminkan kewajiban yang sebenarnya. Ini penting untuk menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan perusahaan, serta memenuhi standar audit yang ketat. Dengan demikian, prosedur verifikasi menjadi bagian integral dari proses audit yang menyeluruh dan berorientasi pada keakuratan dan keandalan laporan keuangan.

PSP pada Akun Investasi pada Afiliasi

Akun Investasi pada Afiliasi merupakan salah satu aspek penting yang dapat tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan suatu entitas. Akun yang mencatat investasi pada afiliasi ini dapat memiliki peran yang signifikan dalam menunjukkan hubungan investasi yang dimiliki oleh perusahaan terhadap afiliasi lainnya. Dalam konteks ini, investasi pada afiliasi dapat tercermin dalam akun yang spesifik, misalnya akun "Investasi pada Afiliasi" atau mungkin "Investasi dalam Entitas Asosiasi" tergantung pada istilah yang digunakan oleh perusahaan.

Pentingnya pengungkapan investasi pada afiliasi dalam Laporan Posisi Keuangan terletak pada pemahaman yang diberikannya kepada pemangku kepentingan tentang struktur kepemilikan dan keterlibatan perusahaan dalam entitas afiliasi tersebut. Akun yang mencatat investasi pada afiliasi memberikan gambaran tentang tingkat kontrol atau pengaruh yang dimiliki oleh perusahaan terhadap afiliasi, serta tingkat keterlibatan keuangan yang dimiliki dalam operasi dan kinerja afiliasi tersebut.

Selain itu, pengungkapan investasi pada afiliasi juga dapat memberikan wawasan tentang potensi risiko dan peluang yang terkait dengan hubungan investasi tersebut. Misalnya, melalui akun yang mencatat investasi pada afiliasi, pemangku kepentingan dapat mengevaluasi eksposur perusahaan terhadap risiko bisnis yang terkait dengan afiliasi, serta potensi manfaat finansial yang dapat diperoleh dari investasi tersebut.

Dalam konteks audit, penting bagi auditor untuk memastikan bahwa akun yang mencatat investasi pada afiliasi telah diakui, diukur, dan diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor harus melakukan penilaian yang

cermat terhadap keberadaan dan keabsahan investasi pada afiliasi, serta memastikan bahwa pengungkapannya memenuhi persyaratan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Dengan demikian, investasi pada afiliasi dapat memiliki dampak yang signifikan dalam Laporan Posisi Keuangan suatu entitas, dan akun yang mencatatnya memberikan informasi yang berharga kepada pemangku kepentingan tentang keterlibatan perusahaan dalam entitas afiliasi tersebut.

8.1 PSP dan Asersi pada Akun Investasi pada Afiliasi

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
H	Investasi pada Afiliasi					
1	Verifikasi Eksistensi dan Kepemilikan	X		X	X	X
2	Tinjauan notulen rapat	X	X	X	X	X
3	Penilaian sesuai dengan Kebijakan Akuntansi		X			X
4	Pengujian Penurunan Nilai		X			X

8.1.1 Verifikasi Eksistensi dan Kepemilikan

Verifikasi eksistensi dari investasi pada afiliasi melibatkan serangkaian prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan keberadaan fisik dan legalitas dari investasi tersebut. Auditor akan melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang mendukung investasi pada afiliasi, seperti kontrak, perjanjian investasi, laporan keuangan, dan catatan kepemilikan saham. Prosedur ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa investasi tersebut memang ada dan telah dicatat dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan.

Verifikasi kepemilikan dari investasi pada afiliasi melibatkan prosedur yang sama pentingnya. Auditor akan memeriksa dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti sah tentang kepemilikan saham perusahaan afiliasi, seperti sertifikat saham atau konfirmasi kepemilikan dari otoritas yang berwenang. Selain itu, auditor juga akan menelusuri transaksi yang berkaitan dengan investasi tersebut, seperti dividen yang diterima atau dividen yang dibayarkan kepada afiliasi. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memiliki dan mengendalikan investasi pada afiliasi sesuai dengan yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dalam kedua prosedur ini, auditor akan mengikuti standar auditing yang berlaku untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang diperoleh. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengungkapan investasi pada afiliasi, auditor akan melaporkannya kepada manajemen perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan perusahaan.

8.1.2 Tinjauan Notulen Rapat atas Aktivitas Investasi

Tinjauan notulen rapat atas aktivitas investasi merupakan prosedur yang esensial bagi auditor dalam memeriksa secara cermat keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat direksi atau pemegang saham yang berkaitan dengan aktivitas dan saldo akun investasi pada afiliasi. Auditor bertanggung jawab untuk menginvestigasi dengan teliti setiap detail yang tercatat

dalam notulen tersebut guna memahami implikasi keputusan tersebut terhadap investasi perusahaan.

Prosedur ini melibatkan analisis mendalam terhadap isi notulen rapat untuk mengidentifikasi segala keputusan strategis, transaksi, atau kebijakan baru yang berkaitan dengan investasi pada afiliasi. Auditor akan memeriksa apakah terdapat pengumuman atau persetujuan terhadap pembelian, penjualan, atau restrukturisasi investasi, serta pertimbangan keuangan atau hukum yang mendasarinya.

Selain itu, auditor juga akan memeriksa apakah terdapat diskusi atau keputusan terkait penggunaan dana, alokasi sumber daya, atau evaluasi kinerja investasi yang dapat memengaruhi saldo akun investasi pada afiliasi dalam laporan keuangan. Perhatian khusus diberikan pada aspek kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal perusahaan yang berkaitan dengan investasi pada afiliasi.

Dengan melakukan tinjauan notulen rapat secara seksama, auditor dapat memastikan bahwa setiap keputusan atau aktivitas yang memengaruhi investasi pada afiliasi telah diungkapkan dengan jelas dan akurat dalam laporan keuangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara apa yang tercatat dalam notulen dengan informasi yang terungkap dalam laporan keuangan, auditor akan menyelidiki lebih lanjut dan melaporkan temuan tersebut kepada manajemen perusahaan untuk langkah-langkah korektif yang diperlukan. Dengan demikian, prosedur ini merupakan bagian integral dari proses audit yang bertujuan untuk memastikan keandalan dan transparansi informasi terkait investasi pada afiliasi dalam laporan keuangan perusahaan.

8.1.3 Penilaian Investasi dengan Kebijakan Akuntansi

Penilaian investasi dengan kebijakan akuntansi merupakan salah satu prosedur penting yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa saldo investasi yang dilaporkan oleh manajemen telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, khususnya PSAK 15 dan PSAK 68. PSAK 15 mengatur tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama," yang memberikan panduan mengenai bagaimana entitas harus mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Di sisi lain, PSAK 68 mengatur tentang "Pengukuran Nilai Wajar," yang menyediakan kerangka kerja untuk pengukuran nilai wajar dan pengungkapan informasi mengenai pengukuran nilai wajar dalam laporan keuangan.

Dalam prosedur penilaian ini, auditor memulai dengan mengumpulkan informasi terkait investasi, termasuk laporan keuangan, catatan akuntansi, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Langkah selanjutnya melibatkan verifikasi kepatuhan dengan PSAK 15 dan PSAK 68. Auditor akan memeriksa apakah metode akuntansi yang digunakan oleh manajemen dalam mencatat investasi telah sesuai dengan ketentuan standar-standar tersebut, khususnya dalam hal pengukuran nilai wajar yang diatur dalam PSAK 68. Auditor juga menganalisis dan mengevaluasi metode penilaian yang digunakan oleh manajemen, memastikan bahwa asumsi dan estimasi yang diterapkan adalah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan apakah penurunan nilai investasi telah diidentifikasi dan dicatat dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengujian substantif terhadap saldo investasi juga merupakan bagian penting dari prosedur ini. Auditor melakukan pengujian substantif untuk memastikan bahwa saldo yang dilaporkan adalah akurat dan valid, yang dapat mencakup konfirmasi dengan pihak ketiga jika diperlukan. Dalam kasus ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam penilaian investasi sesuai dengan PSAK 15 atau PSAK 68, auditor akan melaporkan temuan ini kepada manajemen dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian yang diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan informasi yang benar dan wajar mengenai investasi.

Dengan melakukan penilaian investasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Proses ini tidak hanya memastikan integritas laporan keuangan tetapi juga memberikan informasi yang andal kepada para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan.

8.1.4 Pengujian Penurunan Nilai Investasi

Pengujian penurunan nilai dari saldo investasi pada entitas asosiasi merupakan prosedur yang signifikan dalam audit laporan keuangan, yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa nilai investasi yang tercatat mencerminkan kondisi ekonomi dan pasar yang sebenarnya. Dalam melaksanakan pengujian ini, auditor mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan, khususnya PSAK 15 tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" dan PSAK 48 tentang "Penurunan Nilai Aset."

PSAK 15 memberikan pedoman mengenai bagaimana entitas harus mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan investasi pada entitas asosiasi. Standar ini menekankan bahwa investasi pada entitas asosiasi harus dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, di mana nilai investasi disesuaikan berdasarkan bagian perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi setelah tanggal akuisisi. Selain itu, PSAK 15 mengharuskan pengujian penurunan nilai dilakukan jika terdapat indikasi bahwa nilai tercatat investasi mungkin tidak dapat dipulihkan.

PSAK 48 memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengukur penurunan nilai aset, termasuk investasi pada entitas asosiasi. Standar ini mengharuskan entitas untuk menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi, maka entitas harus memperkirakan jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tersebut. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, yang merupakan nilai tertinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

Sebagai bagian dari prosedur pengujian penurunan nilai, auditor akan membandingkan nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dengan harga pasar yang tersedia. Harga pasar dapat memberikan informasi berharga mengenai nilai wajar investasi pada tanggal pelaporan. Auditor akan mengumpulkan data pasar yang relevan, seperti harga saham terbaru, transaksi terkini yang melibatkan entitas asosiasi, dan informasi ekonomi makro serta industri yang dapat mempengaruhi nilai wajar investasi.

Setelah memperoleh data yang diperlukan, auditor akan menganalisis dan mengevaluasi apakah nilai tercatat investasi lebih tinggi daripada jumlah yang dapat dipulihkan. Jika nilai tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, maka auditor akan menentukan besarnya penurunan nilai yang harus diakui sesuai dengan PSAK 48. Proses ini melibatkan penilaian profesional dan pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan dan operasi entitas asosiasi, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Dengan demikian, pengujian penurunan nilai dari saldo investasi pada entitas asosiasi adalah proses yang komprehensif yang memerlukan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang relevan serta analisis yang mendalam terhadap data pasar. Melalui prosedur ini, auditor memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai investasi yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga memberikan informasi yang andal dan transparan kepada para pemangku kepentingan.

PSP pada Akun-Akun Transaksi dengan Pihak Berelasi

Saldo dan transaksi perusahaan dengan pihak berelasi dapat diidentifikasi sebagai akun khusus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7. PSAK 7, yang berjudul "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi," mengharuskan entitas untuk mengungkapkan hubungan, transaksi, dan saldo yang ada antara entitas dengan pihak-pihak yang berelasi.

PSAK 7 mendefinisikan pihak berelasi sebagai individu atau entitas yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas. Pihak-pihak ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perusahaan induk, anak perusahaan, entitas asosiasi, ventura bersama, dan anggota manajemen kunci serta keluarga dekat mereka.

Dalam konteks ini, saldo dan transaksi dengan pihak berelasi harus diidentifikasi dan dicatat dalam akun yang mencerminkan hubungan khusus ini. Transaksi tersebut dapat mencakup berbagai jenis interaksi keuangan, seperti penjualan dan pembelian barang dan jasa, pemberian atau penerimaan pinjaman, serta transfer sumber daya lainnya. Pencatatan yang tepat dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas, serta mengungkapkan potensi risiko dan keuntungan yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi.

PSAK 7 juga mengharuskan pengungkapan yang memadai mengenai sifat hubungan pihak berelasi, jenis dan jumlah transaksi yang terjadi selama periode berjalan, saldo yang ada pada akhir periode, dan syarat serta ketentuan transaksi tersebut. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi

dan memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan mengenai potensi dampak keuangan dari hubungan pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas.

Dengan demikian, melalui identifikasi dan pengungkapan saldo dan transaksi perusahaan dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7, auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan hubungan dan transaksi tersebut secara akurat dan transparan. Hal ini penting untuk mempertahankan integritas laporan keuangan dan memberikan informasi yang andal kepada para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas.

9.1 PSP dan Asersi pada Akun Pihak Berelasi

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
I	Saldo dan Transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi	E	V	C	R	P
1	Verifikasi Saldo Akun Antarperusahaan	X	X	X	X	X
2	Penilaian Akun Antarperusahaan		X			
3	Cutoff Saldo Akun Antarperusahaan	X		X		
4	Penyisihan Piutang Antarperusahaan yang Diragukan		X			

9.1.1 Verifikasi Saldo Akun dengan Pihak-Pihak Berelasi

PSP Verifikasi Saldo Akun dengan Pihak-Pihak Berelasi dilakukan auditor dengan cara memastikan bahwa saldo akun yang terkait dengan pihak-pihak berelasi telah tercatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Proses ini melibatkan serangkaian prosedur yang dirancang untuk menilai keakuratan dan kelengkapan data yang tercatat dalam buku besar perusahaan. Auditor harus memastikan bahwa semua transaksi dengan pihak berelasi telah diidentifikasi, diukur, dan diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan perusahaan.

Langkah pertama dalam verifikasi ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak berelasi. Pihak berelasi dapat mencakup individu atau entitas yang memiliki hubungan signifikan dengan perusahaan, seperti pemegang saham mayoritas, anggota manajemen kunci, atau entitas lain yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang melibatkan pihak-pihak ini telah dicatat dan dilaporkan dengan benar.

Setelah mengidentifikasi pihak berelasi, auditor akan mengumpulkan dan meninjau dokumen pendukung. Dokumen ini bisa berupa kontrak, nota kredit, faktur, dan korespondensi lainnya yang berkaitan dengan transaksi antara perusahaan dan pihak berelasi. Auditor harus memastikan bahwa dokumen-dokumen ini mendukung jumlah yang tercatat dalam saldo akun. Selain itu, auditor juga akan mengevaluasi apakah transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kondisi pasar yang wajar, untuk menghindari risiko transaksi yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya.

Selanjutnya, auditor akan melakukan konfirmasi langsung dengan pihak-pihak berelasi. Proses ini melibatkan mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak berelasi untuk mendapatkan verifikasi independen mengenai saldo akun dan transaksi yang telah dilakukan. Konfirmasi ini bertujuan untuk memvalidasi informasi yang tercatat dalam buku besar perusahaan dan memastikan bahwa tidak ada perbedaan material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Terakhir, auditor akan menganalisis dan menilai hasil verifikasi. Jika ditemukan perbedaan atau anomali, auditor harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab dan implikasi dari perbedaan tersebut. Auditor juga akan memastikan bahwa semua temuan telah dikomunikasikan dengan manajemen dan bahwa langkah-langkah perbaikan telah diambil jika diperlukan. Hasil verifikasi ini akan menjadi bagian penting dari penilaian auditor terhadap integritas laporan keuangan perusahaan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, verifikasi saldo akun dengan pihak-pihak berelasi adalah proses penting dalam audit keuangan yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Dengan mengikuti prosedur yang ketat dan mendetail, auditor dapat memberikan jaminan bahwa transaksi dengan pihak berelasi telah dicatat dan diungkapkan dengan benar, sehingga memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pemangku kepentingan mengenai integritas laporan keuangan perusahaan.

9.1.2 Penilaian dan Valuasi Akun Pihak-Pihak Berelasi

Penilaian dan valuasi akun pihak-pihak berelasi dilakukan auditor dengan cara mengevaluasi kewajaran dan ketepatan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Proses ini melibatkan berbagai langkah dan teknik yang dirancang untuk memastikan bahwa nilai yang dilaporkan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Langkah pertama dalam proses ini adalah pengumpulan informasi dan data relevan. Auditor harus mengidentifikasi semua transaksi yang terjadi dengan pihak-pihak berelasi selama periode audit dan mengumpulkan dokumen pendukung seperti kontrak, nota kredit, faktur, dan catatan korespondensi. Informasi ini sangat penting untuk memahami konteks transaksi dan memastikan bahwa tidak ada elemen penting yang terlewatkan dalam proses penilaian.

Setelah informasi terkumpul, auditor akan melakukan analisis mendalam terhadap transaksi tersebut. Analisis ini mencakup penilaian apakah transaksi dilakukan berdasarkan prinsip *arm's length*, yaitu transaksi dilakukan seolah-olah antara pihak-pihak yang tidak berelasi, untuk memastikan kewajaran harga dan kondisi transaksi. Auditor juga akan menilai apakah metode penilaian yang digunakan oleh perusahaan konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 7 yang berlaku di Indonesia atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan *US Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) di dunia Internasional.

Selanjutnya, auditor akan menggunakan teknik penilaian yang relevan untuk menentukan kewajaran nilai yang tercatat. Teknik ini bisa meliputi metode nilai wajar (*fair value*), metode biaya historis (*historical cost*), atau metode lainnya yang sesuai dengan jenis transaksi dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam banyak kasus, auditor mungkin perlu menggunakan penilai independen atau ahli valuasi untuk mendapatkan estimasi nilai yang lebih akurat dan objektif.

Selain itu, auditor akan melakukan uji kelayakan dan ketepatan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian. Ini termasuk menilai apakah asumsi-asumsi yang mendasari valuasi, seperti tingkat diskonto, proyeksi arus kas masa depan, atau kondisi pasar, sudah sesuai dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Auditor harus memastikan bahwa asumsi-asumsi ini didokumentasikan dengan baik dan didukung oleh data empiris yang relevan.

Auditor juga akan menyusun laporan temuan dan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan valuasi. Laporan ini harus mencakup semua temuan penting, perbedaan yang ditemukan, dan implikasi terhadap laporan keuangan. Jika ditemukan bahwa valuasi tidak mencerminkan nilai yang wajar atau ada kekeliruan material, auditor harus merekomendasikan penyesuaian yang diperlukan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan mengambil langkah perbaikan yang sesuai.

Penilaian dan valuasi akun pihak-pihak berelasi adalah proses krusial dalam audit keuangan yang memastikan bahwa nilai yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan sesuai dengan standar akuntansi. Dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan

menggunakan teknik penilaian yang tepat, auditor dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan perusahaan.

9.1.3 Uji Pisah Batas Akun Pihak-Pihak Berelasi

Uji pisah batas akun pihak-pihak berelasi dilakukan oleh auditor dengan cara yang kurang lebih sama dengan pengujian pisah batas pada akun-akun lainnya. Proses ini melibatkan pengambilan sampel transaksi di sekitar tanggal neraca untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat pada periode yang benar. Uji pisah batas bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan pencatatan atau manipulasi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Dalam konteks pihak-pihak berelasi, auditor harus memberikan perhatian khusus karena transaksi dengan pihak berelasi sering kali memiliki implikasi yang signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Proses uji pisah batas dimulai dengan mengambil lima transaksi terakhir di akhir periode pelaporan dan lima transaksi pertama di periode setelah tanggal neraca. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang dicatat pada periode yang salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat mengubah hasil keuangan periode berjalan. Misalnya, mencatat penjualan yang seharusnya terjadi pada periode berikutnya sebagai pendapatan periode berjalan dapat memberikan gambaran yang tidak akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan.

Untuk akun pihak-pihak berelasi, auditor harus melakukan uji pisah batas pada berbagai jenis akun, termasuk piutang usaha, utang usaha, akun-akun ekuitas, dan investasi pada entitas asosiasi. Piutang usaha dengan pihak-pihak berelasi harus diperiksa untuk memastikan bahwa semua penjualan dan piutang yang berkaitan telah dicatat dengan benar dan pada periode yang tepat. Demikian pula, utang usaha harus diverifikasi untuk memastikan bahwa semua pembelian dan utang yang terkait dengan pihak-pihak berelasi telah dicatat dengan benar.

Selain itu, akun ekuitas dan investasi pada entitas asosiasi juga harus diperiksa. Transaksi ekuitas, seperti penerbitan saham atau dividen kepada pihak-pihak berelasi, memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan akuntansi. Auditor harus memastikan bahwa semua perubahan dalam ekuitas yang melibatkan pihak berelasi telah dicatat dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan.

Investasi pada entitas asosiasi juga memerlukan uji pisah batas yang ketat. Auditor harus memastikan bahwa investasi ini telah dicatat dengan benar sesuai dengan metode akuntansi yang relevan, seperti metode ekuitas atau metode biaya. Selain itu, auditor harus mengevaluasi apakah perubahan nilai investasi telah dicatat dengan benar dan apakah ada indikasi penurunan nilai yang perlu diakui.

Tidak hanya terbatas pada akun-akun di atas, akun pihak-pihak berelasi juga mungkin memiliki saldo di pendapatan dan lainnya. Auditor harus memeriksa transaksi pendapatan yang melibatkan pihak berelasi untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut telah diakui sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku. Selain itu, auditor harus memeriksa

akun-akun lain yang mungkin terpengaruh oleh transaksi dengan pihak berelasi, seperti beban atau aset lainnya.

Dalam keseluruhan proses ini, auditor harus tetap waspada terhadap potensi konflik kepentingan dan risiko manipulasi. Transaksi dengan pihak berelasi sering kali lebih kompleks dan memiliki potensi lebih besar untuk dimanipulasi dibandingkan dengan transaksi dengan pihak ketiga yang independen. Oleh karena itu, auditor harus menggunakan skeptisisme profesional dan melakukan prosedur audit tambahan jika diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan gambaran yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan perusahaan.

Dengan mengikuti prosedur yang ketat dalam uji pisah batas akun pihak-pihak berelasi, auditor dapat memberikan jaminan bahwa transaksi dan saldo akun yang terkait dengan pihak berelasi telah dicatat dengan benar dan diungkapkan dengan memadai. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan transparansi laporan keuangan, serta untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan mengenai kebenaran dan keandalan informasi keuangan yang disajikan.

9.1.4 Penyisihan Piutang Antarperusahaan

Prosedur penyisihan piutang dengan pihak berelasi dilakukan dengan cara yang sama dengan analisis penyisihan cadangan kerugian nilai pada piutang usaha, yaitu mengikuti langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa penyisihan yang dicatat mencerminkan ekspektasi kerugian yang realistis. Langkah pertama adalah mengevaluasi kualitas piutang dari pihak berelasi. Auditor harus meninjau umur piutang, sejarah pembayaran pihak berelasi, dan kondisi keuangan mereka.

Piutang yang lebih tua atau yang berasal dari pihak berelasi yang mengalami kesulitan keuangan mungkin memerlukan penyisihan yang lebih besar. Evaluasi ini mencakup analisis detail atas setiap akun piutang untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam penagihan.

Selanjutnya, auditor harus menganalisis data historis penghapusan piutang untuk menentukan tren dan pola kerugian. Data historis ini memberikan informasi penting mengenai tingkat kerugian yang dapat diharapkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Auditor harus memeriksa apakah piutang dari pihak berelasi menunjukkan tingkat penghapusan yang berbeda dibandingkan dengan piutang dari pihak non-berelasi. Berdasarkan analisis kualitas piutang dan data historis, auditor akan menentukan persentase penyisihan yang sesuai. Persentase ini diterapkan pada saldo piutang untuk menghitung jumlah penyisihan yang diperlukan. Proses ini sering kali melibatkan pembagian piutang ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan umur atau risiko, dan kemudian menerapkan persentase penyisihan yang berbeda untuk setiap kelompok.

Selain faktor internal, auditor harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri yang relevan. Perubahan dalam kondisi ekonomi, seperti resesi atau perubahan regulasi industri, dapat mempengaruhi kemampuan pihak berelasi untuk membayar piutang mereka. Auditor harus menilai apakah ada faktor eksternal yang meningkatkan risiko kerugian pada piutang dari pihak berelasi. Prosedur selanjutnya adalah mengkonfirmasi temuan dan asumsi penyisihan dengan manajemen perusahaan. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi relevan telah dipertimbangkan dan bahwa manajemen setuju dengan estimasi penyisihan yang dibuat. Auditor juga harus

menilai apakah manajemen memiliki pandangan yang berbeda mengenai kemampuan pihak berelasi untuk membayar piutang.

Semua temuan dan asumsi yang digunakan dalam proses penyisihan harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini mencakup analisis piutang, data historis, persentase penyisihan, dan justifikasi untuk setiap keputusan yang diambil. Selain itu, auditor harus memastikan bahwa penyisihan piutang dan kebijakan terkait diungkapkan dengan memadai dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur penyisihan tidak berhenti setelah estimasi awal dibuat. Auditor harus melakukan review dan penyesuaian berkala terhadap penyisihan piutang untuk memastikan bahwa jumlah yang dicadangkan tetap relevan dan akurat. Review ini penting terutama jika ada perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi atau dalam hubungan dengan pihak berelasi.

Dengan mengikuti prosedur ini, auditor dapat memastikan bahwa penyisihan piutang dengan pihak berelasi telah dihitung secara akurat dan mencerminkan ekspektasi kerugian yang realistis. Proses yang hati-hati dan terstruktur ini membantu menjaga integritas laporan keuangan dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa piutang dicatat dan diungkapkan secara wajar.

**PSP pada Akun Piutang Jangka Panjang,
Deposito non-kini, dan Aset Keuangan
Jangka Panjang Lainnya**

Prosedur Audit Substantif Primer (PSP) pada akun piutang jangka panjang, deposito non-kini, dan aset keuangan jangka panjang lainnya adalah bagian integral dari proses audit yang dirancang untuk memastikan keandalan dan kebenaran informasi keuangan yang terkait dengan aset-aset tersebut. PSP ini dilakukan oleh auditor dengan pendekatan sistematis dan terstruktur, yang mencakup serangkaian langkah dan teknik audit yang ditujukan untuk menguji keakuratan, kelengkapan, dan keabsahan transaksi serta saldo yang tercatat dalam akun-akun tersebut.

Piutang jangka panjang mengacu pada tagihan yang diharapkan untuk diterima dalam jangka waktu yang lebih dari satu tahun, yang sering kali berasal dari transaksi kredit antara perusahaan dan pihak lain yang melibatkan jumlah yang signifikan. Sementara itu, deposito dengan jatuh tempo lebih dari satu periode pelaporan keuangan adalah investasi keuangan yang ditanamkan dalam deposito berjangka atau instrumen investasi serupa yang tidak dapat dicairkan dalam waktu singkat. Sedangkan, aset keuangan jangka panjang lainnya mencakup investasi jangka panjang dalam instrumen seperti saham, obligasi, atau properti yang dimiliki perusahaan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang.

Dalam melaksanakan prosedur substantif pada akun-akun tersebut, terdapat dua prosedur inti yang menjadi fokus utama, yaitu verifikasi eksistensi dan kepemilikan serta penilaian atas aset keuangan jangka panjang tersebut. Verifikasi eksistensi dan kepemilikan bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang tercatat dalam akun-akun tersebut benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. Auditor akan melakukan pengujian substansi yang mendalam, termasuk peninjauan dokumen-dokumen

terkait, seperti kontrak, surat perjanjian, dan bukti kepemilikan, serta melakukan konfirmasi langsung dengan pihak yang berwenang.

Selain verifikasi eksistensi dan kepemilikan, penilaian atas aset keuangan jangka panjang juga merupakan prosedur kunci dalam PSP. Auditor akan melakukan evaluasi terhadap nilai wajar dan nilai tercatat dari aset-aset tersebut, serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan metode pengukuran yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap kondisi pasar, nilai intrinsik, dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi nilai aset keuangan jangka panjang tersebut.

Proses verifikasi eksistensi, kepemilikan, dan penilaian atas aset keuangan jangka panjang ini dilakukan secara teliti dan cermat oleh auditor dengan memperhatikan prinsip-prinsip audit yang relevan. Auditor harus menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan prosedur ini guna memastikan bahwa audit dilakukan dengan integritas dan akurat. Hasil dari PSP ini akan tercermin dalam laporan audit, yang mencakup temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan auditor atas keandalan informasi keuangan terkait dengan aset-aset tersebut. Dengan demikian, PSP pada akun piutang jangka panjang, deposito non-kini, dan aset keuangan jangka panjang lainnya menjadi bagian penting dalam memastikan keandalan dan kebenaran informasi keuangan perusahaan.

10.1 PSP dan Asersi pada Akun Piutang Jangka Panjang, Deposito non-kini, dan Aset Keuangan Jangka Panjang Lainnya

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
J	Piutang Jangka Panjang, Deposito Non-kini, dan Aset Keuangan Jangka Panjang Lainnya					
1	Verifikasi Keberadaan dan Kepemilikan	X	X	X	X	X
2	Penilaian Aset Keuangan Jangka Panjang		X			

10.1.1 Verifikasi Keberadaan dan Kepemilikan

Piutang jangka panjang, deposito non-kini, dan aset keuangan jangka panjang lainnya adalah komponen-komponen vital dalam struktur keuangan sebuah entitas. Dalam konteks audit, verifikasi keberadaan dan kepemilikan atas akun-akun ini memainkan peran penting dalam memastikan keandalan informasi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan. Proses verifikasi ini merupakan salah satu tahap kunci dalam Prosedur Audit Substantif Primer (PSP) yang dilakukan oleh auditor dengan cermat dan sistematis.

Verifikasi keberadaan dan kepemilikan pada akun piutang jangka panjang, deposito non-kini, dan aset keuangan jangka panjang lainnya dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan teruji. Auditor akan memulai dengan meninjau dokumen-dokumen yang terkait, seperti kontrak, surat perjanjian, atau sertifikat kepemilikan. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keabsahan transaksi yang tercatat dalam akun-akun tersebut serta

untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut memang dimiliki oleh entitas yang bersangkutan.

Selanjutnya, auditor akan melakukan konfirmasi langsung dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak-pihak yang berkontraktual dengan entitas maupun pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen-dokumen kepemilikan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen tersebut konsisten dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk mengidentifikasi potensi ketidakcocokan antara catatan internal perusahaan dengan realitas operasionalnya.

Proses verifikasi ini juga melibatkan peninjauan terhadap catatan transaksi yang terkait dengan akun-akun tersebut, termasuk pembayaran, penerimaan, atau perubahan kepemilikan. Auditor akan memeriksa kecocokan antara catatan transaksi dengan dokumen-dokumen pendukung, serta melakukan analisis terhadap pola dan tren transaksi untuk mengidentifikasi potensi anomali atau ketidaksesuaian.

Selain itu, auditor juga akan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dalam mengelola dan mengontrol aset-aset tersebut. Ini termasuk penilaian terhadap prosedur-prosedur yang diterapkan dalam pengakuan, pencatatan, dan pelaporan transaksi terkait, serta penilaian terhadap kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada.

Hasil dari proses verifikasi keberadaan dan kepemilikan ini akan tercermin dalam laporan audit, yang mencakup temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan auditor atas keandalan informasi keuangan yang terkait dengan akun-akun piutang jangka panjang, deposito non-kini, dan aset keuangan jangka

panjang lainnya. Melalui proses audit yang teliti dan cermat ini, auditor dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan perusahaan terkait dengan aset-aset ini telah diuji dengan cermat dan dilaporkan secara objektif dalam laporan keuangan.

10.1.2 Penilaian Aset Keuangan Jangka Panjang

Dalam konteks audit, penilaian dan valuasi aset keuangan jangka panjang merupakan tahapan kritis yang dilakukan untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tercatat dengan benar dan mencerminkan nilai wajar yang sesuai dalam laporan keuangan. Penilaian dan valuasi ini merupakan bagian integral dari Prosedur Audit Substantif Primer (PSP), yang bertujuan untuk menguji keakuratan dan kebenaran informasi keuangan yang terkait dengan aset-aset tersebut.

Proses penilaian dan valuasi aset keuangan jangka panjang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang relevan dengan jenis aset yang bersangkutan. Auditor akan memulai dengan menganalisis karakteristik khusus dari setiap aset, termasuk risiko yang terkait, kondisi pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi nilai aset tersebut.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian aset keuangan jangka panjang adalah pendekatan nilai wajar. Auditor akan melakukan penilaian terhadap nilai wajar aset berdasarkan data pasar yang relevan, termasuk harga pasar saat ini, tren historis, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai pasar. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai aset tersebut

mencerminkan nilai yang sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya.

Selain itu, auditor juga akan mempertimbangkan metode penilaian lainnya, seperti metode biaya, nilai terbaik, atau nilai likuidasi. Pemilihan metode penilaian yang tepat bergantung pada karakteristik khusus dari setiap aset dan kebutuhan informasi yang spesifik dalam konteks audit.

Proses penilaian dan valuasi ini juga melibatkan analisis terhadap informasi dan data yang relevan yang terkait dengan aset tersebut, seperti laporan keuangan, perjanjian kontrak, atau laporan penilaian independen. Auditor akan memeriksa kecocokan antara nilai yang tercatat dalam akun-akun dengan nilai yang dihasilkan dari proses penilaian dan valuasi yang dilakukan.

Selain itu, auditor juga akan mengevaluasi kecukupan pengungkapan informasi terkait dengan penilaian dan valuasi aset keuangan jangka panjang dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup peninjauan terhadap catatan-catatan penjelasan, kebijakan akuntansi, dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses penilaian tersebut.

Hasil dari penilaian dan valuasi aset keuangan jangka panjang ini akan tercermin dalam laporan audit, yang mencakup temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan auditor atas keandalan informasi keuangan yang terkait. Melalui proses audit yang teliti dan cermat ini, auditor dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan perusahaan terkait dengan aset-aset ini telah diuji dengan cermat dan dilaporkan secara objektif dalam laporan keuangan.

PSP pada Akun Aset Tetap

Aset Tetap dalam laporan keuangan merupakan komponen penting yang dapat didefinisikan oleh PSAK 16. Secara substansial, PSAK 16, yang berfokus pada "Aset Tetap," menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan suatu entitas. Aset Tetap adalah aset fisik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan digunakan dalam operasi bisnis untuk menghasilkan pendapatan. PSAK 16 memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana aset tetap harus diakui dalam laporan keuangan, termasuk kriteria untuk mengklasifikasikan suatu aset sebagai aset tetap, serta prosedur untuk menentukan nilai awal, mengukur ulang, dan mengalihkan aset tersebut.

Pentingnya definisi Aset Tetap dalam laporan keuangan tidak bisa diabaikan, karena aset ini memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan kinerja operasional suatu entitas. PSAK 16 mengamanatkan bahwa aset tetap harus diakui pada nilai historisnya, yang mencakup biaya perolehan dan biaya yang terkait dengan pengadaan, peningkatan, atau pemeliharaan aset tersebut. Selain itu, PSAK 16 juga mengatur bahwa aset tetap harus disusutkan (*depreciated*) secara sistematis selama umur manfaatnya, guna mencerminkan penurunan nilai yang terkait dengan penggunaan dan keausan aset tersebut seiring berjalannya waktu (14).

Selanjutnya, PSAK 16 mempersyaratkan pengungkapan yang tepat mengenai aset tetap dalam laporan keuangan, termasuk informasi tentang kebijakan penyusutan, nilai tercatat, umur manfaat, dan jumlah penurunan nilai, jika ada. Dengan demikian, definisi Aset Tetap menurut PSAK 16 bukan hanya mengenai identifikasi dan pengakuan aset dalam laporan

keuangan, tetapi juga tentang memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan untuk memahami nilai dan kontribusi aset tetap terhadap kesehatan finansial perusahaan.

Dalam konteks audit, penting bagi auditor untuk memahami dan menerapkan definisi Aset Tetap yang ditetapkan oleh PSAK 16 dengan cermat dan teliti. Auditor harus melakukan penilaian yang komprehensif terhadap pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan klien, serta memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan PSAK 16. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan, termasuk nilai dan kontribusi dari aset tetap.

11.1 PSP dan Asersi pada Akun Aset Tetap

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan					
K	Aset Tetap	E	V	C	R	P	
1	Kesesuaian Buku Pembantu dengan Buku Besar	X	X	X			
2	Penambahan dan Penghapusan	X	X	X	X	X	
3	Sewa, Perbaikan, dan Pemeliharaan	X		X		X	
4	Rekalkulasi Penyusutan		X				
5	Penurunan Nilai Properti, Pabrik, dan Peralatan		X				

11.1.1 Kesesuaian Buku Pembantu dengan Buku Besar

Dalam pelaksanaan PSP ini, auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan dokumen terkait aset tetap. Informasi ini mencakup berbagai aspek seperti sewa yang dikapitalisasi, penambahan aset tetap, penjualan aset tetap, reklasifikasi, serta proses penyusutan, deplesi, dan/atau amortisasi. Setelah memperoleh data tersebut, auditor akan melakukan prosedur penelusuran dan pembandingan dengan catatan akuntansi yang tertera dalam buku besar dan buku besar pembantu aset tetap.

Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa informasi dan dokumen yang telah dikumpulkan tercatat secara lengkap, akurat, dan konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, khususnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang Aset Tetap. Dalam proses verifikasi ini, auditor harus memastikan bahwa semua transaksi dan perubahan terkait aset tetap telah diidentifikasi dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi perusahaan.

Jika auditor menemukan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan pencatatan selama proses verifikasi ini, auditor wajib melaporkan temuan tersebut kepada pihak manajemen klien. Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk merekomendasikan jurnal penyesuaian yang diperlukan guna memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa catatan akuntansi perusahaan dapat mencerminkan posisi aset tetap secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mendukung kualitas laporan keuangan yang andal dan informatif.

11.1.2 Penambahan, Pengurangan, atau Penghapusan

Dalam konteks audit, penambahan, pengurangan, atau penghapusan aset tetap merupakan proses yang memerlukan evaluasi teliti atas aktivitas tersebut untuk memastikan keakuratan pencatatan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk menjalankan prosedur audit yang terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan dan menilai dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan aktivitas ini selama periode berjalan.

Proses pemeriksaan penambahan dan pengurangan aset tetap dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan, seperti faktur pembelian, otorisasi pengeluaran modal, perjanjian sewa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Auditor akan memilih sampel atau transaksi yang nilainya material untuk diperiksa secara mendalam guna memastikan bahwa dokumentasi pendukungnya memenuhi persyaratan akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Selanjutnya, auditor akan memeriksa kesesuaian dokumen pendukung dengan catatan akuntansi untuk memastikan bahwa setiap penambahan dan pengurangan aset tetap telah dicatat dengan benar dan tepat waktu dalam buku besar. Proses verifikasi ini memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah diotorisasi dan dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta peraturan perpajakan yang berlaku.

Tidak jarang, penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diinterpretasikan sebagai pembelian dan penjualan aset tetap. Oleh karena itu, jika perusahaan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), auditor harus memberikan perhatian khusus pada aspek ini. Auditor akan memastikan

bahwa nilai-nilai aset tetap telah dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bahwa penanganan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Melalui prosedur ini, auditor bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan secara akurat mencerminkan aktivitas penambahan dan pengurangan aset tetap. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang posisi keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap semua persyaratan hukum dan peraturan yang relevan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, auditor akan melaporkannya kepada manajemen dan merekomendasikan langkah-langkah korektif yang diperlukan, termasuk jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk memperbaiki pencatatan aset tetap.

11.1.3 Sewa, Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap

Prosedur audit yang terfokus pada aspek sewa, perbaikan, dan pemeliharaan aset tetap menjadi bagian yang signifikan dalam pemeriksaan keuangan sebuah entitas. Dalam konteks ini, auditor mengadopsi pendekatan yang teliti dan terstruktur untuk mengevaluasi keakuratan dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku serta pengungkapan yang sesuai dalam laporan keuangan. Prosedur ini, yang disebut sebagai Prosedur Audit Substantif Primer (PSP), membantu memastikan bahwa transaksi yang tercatat terkait dengan aset tetap atau sewa telah diakui dan diungkapkan secara tepat.

Langkah awal dalam prosedur ini adalah meninjau dan menguji dokumen pendukung terkait aset tetap yang

kemungkinan merupakan objek sewa, bukan kepemilikan langsung. Auditor akan memeriksa kontrak-kontrak sewa, perjanjian, atau dokumen-dokumen lain yang relevan untuk memverifikasi keabsahan transaksi yang dicatat dalam akun aset tetap atau sewa. Pentingnya proses ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan aset tetap atau sewa telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku dan diungkapkan secara akurat dalam laporan keuangan.

Jika setelah pemeriksaan tersebut ternyata bahwa aset tetap yang ada sebenarnya merupakan aset tetap hasil sewa, auditor juga akan memastikan bahwa transaksi sewa memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi dan memiliki jangka waktu sewa yang wajar. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi terhadap sewa yang tepat telah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selanjutnya, auditor akan melakukan rekalkulasi pembebanan sewa, biaya perbaikan, dan biaya pemeliharaan berdasarkan data yang diberikan oleh klien. Auditor akan menilai apakah pembebanan tersebut dapat atau wajib dilakukan kapitalisasi, atau apakah harus dibebankan langsung ke dalam Laporan Laba Rugi. Proses ini melibatkan peninjauan yang teliti terhadap dasar-dasar pembebanan yang digunakan oleh entitas dan memastikan bahwa metode tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Auditor juga akan memastikan bahwa kapitalisasi atau pembebanan biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor akan mengevaluasi apakah biaya-biaya tersebut telah dikapitalisasi atau dibebankan dengan benar sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Hasil dari proses audit ini akan tercermin dalam

laporan audit, yang mencakup temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan auditor atas keandalan informasi keuangan yang terkait dengan aspek sewa, perbaikan, dan pemeliharaan aset tetap. Dengan demikian, prosedur ini menjadi penting dalam memastikan bahwa perlakuan akuntansi terhadap aset tetap entitas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

11.1.4 Depleksi dan Rekalkulasi Depresiasi Aset Tetap

Dalam tahapan audit yang berkaitan dengan depleksi dan rekalkulasi depresiasi aset tetap, auditor mengambil peran kunci dalam memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi yang relevan, khususnya yang terkait dengan PSAK 16: Aset Tetap. Prosedur audit ini melibatkan pengujian metode perhitungan depresiasi yang digunakan oleh entitas serta melakukan rekalkulasi untuk memverifikasi kebenaran perhitungan tersebut, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.

Auditor akan menguji metode perhitungan depresiasi yang digunakan oleh entitas dengan membandingkannya dengan kebijakan akuntansi yang tercantum dalam PSAK 16: Aset Tetap. Tujuan dari rekalkulasi ini adalah untuk memastikan bahwa aset telah diperhitungkan dengan benar, jumlah yang tepat telah disusutkan, dan bahwa aset tersebut telah dilaporkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Auditor akan meninjau laporan keuangan entitas untuk mencari bukti yang mendukung bahwa perhitungan penyusutan aset tetap telah dilakukan dengan benar.

Selain itu, auditor juga akan melakukan tes sampel yang memeriksa penyusutan aset tertentu dengan membandingkan metode penyusutan yang digunakan oleh entitas dengan metode

penyusutan yang disarankan dalam PSAK 16: Aset Tetap. Jika auditor menemukan perbedaan yang signifikan antara kedua metode tersebut, tindakan lanjut akan diambil untuk meneliti lebih lanjut. Auditor juga harus memastikan bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh entitas berlaku untuk setiap aset yang disusutkan, serta memastikan bahwa entitas menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat.

Melalui proses ini, auditor bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas mencerminkan dengan akurat status dan nilai aset tetap yang dimilikinya. Kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan keakuratan perhitungan depresiasi adalah kunci dalam menjamin keandalan informasi keuangan perusahaan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan, auditor akan menyampaikan temuan tersebut kepada manajemen dan merekomendasikan langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk memastikan pencatatan aset tetap yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

11.1.5 Pengujian Penurunan Nilai Aset Tetap

Dalam proses PSP terkait penurunan nilai aset tetap, auditor memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta prosedur audit yang sesuai. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa penyesuaian nilai aset tetap telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Auditor akan memulai dengan mengevaluasi kriteria yang ditetapkan oleh standar akuntansi dan standar audit untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset tetap. Selanjutnya, mereka akan memverifikasi bahwa penyesuaian yang telah dilakukan

sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan, prinsip akuntansi yang berlaku, dan PSAK 16: Aset Tetap. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi pedoman yang berlaku dalam menangani nilai aset tetap.

Selanjutnya, auditor akan mengumpulkan data terkait penurunan nilai aset tetap dan mengidentifikasi indikator yang sesuai. Mereka akan memeriksa apakah penyesuaian nilai aset tetap telah dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor juga akan menyelidiki faktor-faktor yang mungkin memengaruhi nilai aset, termasuk kondisi fisik, perubahan pasar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Selain itu, auditor juga akan memeriksa apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani penurunan nilai aset tetap sesuai dengan hasil temuan auditor. Langkah ini menekankan pentingnya peran manajemen dalam mengelola penurunan nilai aset tetap dengan tepat.

Dengan prosedur ini, auditor bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai aktual dari aset tetap yang dimiliki. Kepatuhan terhadap standar akuntansi dan penanganan yang tepat terhadap penurunan nilai aset tetap adalah kunci untuk mempertahankan integritas informasi keuangan perusahaan. Jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan, auditor akan memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk mengambil tindakan korektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

PSP pada Akun Aset Takberwujud

Klasifikasi dan definisi dari Aset Takberwujud dijelaskan pada PSAK 19: Aset Takberwujud. PSAK 19: Aset Takberwujud merupakan standar akuntansi yang memberikan landasan bagi perusahaan untuk mengklasifikasikan dan mendefinisikan aset takberwujud dalam laporan keuangannya. Dalam konteks ini, aset takberwujud diartikan sebagai aset yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau disentuh, namun memiliki nilai ekonomi yang dapat diperkirakan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset takberwujud menjadi fokus utama dari PSAK 19.

Pertama-tama, klasifikasi aset takberwujud dilakukan berdasarkan karakteristik dan sifatnya. PSAK 19 mengidentifikasi beberapa jenis aset takberwujud yang umum, seperti hak cipta, merek dagang, goodwill, paten, dan hak lisensi. Setiap jenis aset takberwujud memiliki atribut dan ciri khasnya sendiri, yang mempengaruhi cara pengakuan dan pengukurannya dalam laporan keuangan.

Definisi yang tepat dan jelas mengenai aset takberwujud diperlukan untuk memastikan pengakuan yang konsisten dan akurat dalam laporan keuangan. PSAK 19 memberikan panduan yang terperinci mengenai apa yang termasuk dalam lingkup aset takberwujud dan bagaimana cara mengklasifikasikannya. Definisi ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi aset takberwujud yang dimilikinya dan menentukan apakah aset tersebut memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan keuangan.

Pengukuran aset takberwujud melibatkan penentuan nilai wajar atau nilai tercatat dari aset takberwujud pada saat pengakuan awal dan penilaian ulang nilai aset tersebut pada periode berikutnya. Pendekatan pengukuran yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

umum dan menghasilkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna laporan keuangan.

Panduan pengungkapan yang diperlukan terkait dengan aset takberwujud adalah untuk memberikan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan tentang sifat, nilai, dan risiko yang terkait dengan aset takberwujud perusahaan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informasi tentang nilai dan kontribusi aset takberwujud terhadap kinerja dan nilai perusahaan.

12.1 PSP dan Asersi pada Akun Aset Takberwujud

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
1	Bukti Keberadaan Aset Takberwujud	X	X	X		
2	Pengujian Penurunan Nilai Aset Takberwujud	X	X	X	X	X

12.1.1 Bukti Keberadaan Aset Takberwujud

PSP pertama yang digunakan untuk mengaudit aset takberwujud umumnya adalah pemeriksaan mengenai bukti keberadaan atau eksistensi dari aset takberwujud. Pemeriksaan ini juga dilakukan dengan penilaian valuasinya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan bukti keberadaan ini memerlukan penggunaan berbagai teknik dan metode audit yang dirancang untuk menguji keabsahan aset takberwujud.

Auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi yang relevan, seperti kontrak, sertifikat hak cipta atau merek dagang, atau dokumen legal lainnya yang membuktikan kepemilikan atau hak atas aset takberwujud tersebut. Selain itu, auditor juga dapat melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti manajemen perusahaan atau pihak yang terlibat dalam proses penciptaan atau akuisisi aset takberwujud.

Selain mengumpulkan bukti fisik, auditor juga akan melakukan penilaian valuasi terhadap aset takberwujud. Penilaian ini melibatkan penggunaan berbagai metode, seperti metode biaya, nilai wajar, atau pendekatan perbandingan, tergantung pada jenis aset takberwujud yang sedang diaudit. Auditor akan mengevaluasi apakah nilai yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari aset takberwujud tersebut.

Selanjutnya, auditor juga akan memeriksa proses internal perusahaan terkait pengelolaan dan pemeliharaan aset takberwujud. Ini termasuk pengecekan terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam mengelola aset takberwujud serta penilaian terhadap kontrol internal yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset takberwujud dikelola dengan baik dan tidak ada kelemahan dalam pengendalian yang dapat menyebabkan risiko yang tidak diinginkan.

Melalui prosedur ini, auditor bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang keberadaan dan nilai aset takberwujud. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka mengenai keandalan laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, PSP mengenai bukti keberadaan aset takberwujud merupakan

langkah kritis dalam proses audit yang bertujuan untuk memastikan integritas dan transparansi informasi keuangan.

12.1.2 Pengujian Penurunan Nilai Aset Takberwujud

Dalam proses audit aset takberwujud, langkah selanjutnya setelah memverifikasi keberadaan atau eksistensi aset adalah melakukan pengujian penurunan nilai. Hal ini merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa nilai aset takberwujud yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang sesungguhnya dan masih relevan dengan kondisi pasar dan bisnis saat ini.

Pengujian penurunan nilai aset takberwujud dilakukan oleh auditor melalui berbagai pendekatan dan metode evaluasi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah membandingkan nilai tercatat dari aset takberwujud dengan nilai wajar atau nilai terpulihkan yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Penurunan nilai akan terjadi jika nilai tercatat aset melebihi nilai wajar atau nilai terpulihkan, yang menunjukkan bahwa nilai aset telah menurun secara signifikan.

Auditor juga akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi nilai aset takberwujud. Faktor eksternal seperti perubahan kondisi pasar atau regulasi industri dapat mempengaruhi nilai ekonomi aset, sementara faktor internal seperti perubahan strategi bisnis atau teknologi juga dapat berdampak pada nilai aset.

Selain itu, auditor juga akan mempertimbangkan faktor-faktor subyektif seperti ekspektasi masa depan terkait penghasilan yang diharapkan dari aset tersebut atau prospek

penggunaan aset dalam jangka panjang. Pengujian ini memerlukan analisis yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan industri yang terkait dengan aset takberwujud tersebut.

Hasil dari pengujian penurunan nilai ini akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan apakah penyesuaian nilai aset takberwujud diperlukan dalam laporan keuangan perusahaan. Jika penurunan nilai telah terjadi, auditor akan merekomendasikan untuk mencatat kerugian penurunan nilai yang sesuai dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang nilai aset takberwujud dan mengurangi risiko miskonsepsi atau kelalaian dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Dengan demikian, pengujian penurunan nilai aset takberwujud merupakan langkah kritis dalam proses audit yang ditujukan untuk menjaga integritas dan transparansi informasi keuangan perusahaan.

PSP pada Akun Pinjaman

Dalam konteks laporan keuangan, karakteristik dan klasifikasi akun pinjaman berbeda secara signifikan dari utang usaha atau utang lain dalam laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Perbedaan tersebut mencerminkan sifat dan tujuan dari beberapa jenis kewajiban tersebut dalam konteks kegiatan finansial perusahaan.

Pertama-tama, karakteristik utang usaha umumnya terkait dengan kewajiban yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa kepada pelanggan perusahaan secara kredit. Utang usaha ini bersifat jangka pendek dan biasanya harus dilunasi dalam jangka waktu yang relatif singkat, seringkali dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Sementara itu, akun pinjaman mengacu pada kewajiban finansial yang berasal dari penerimaan dana secara pinjaman dari pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya, pinjaman ini memiliki jangka waktu lebih panjang dan seringkali disertai dengan pembayaran bunga sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.

Klasifikasi utang usaha dan akun pinjaman berbeda dalam laporan keuangan. Utang usaha biasanya dicatat sebagai bagian dari kewajiban lancar (*current liabilities*) karena pembayarannya jatuh tempo dalam waktu yang relatif cepat. Sementara itu, akun pinjaman dapat termasuk ke dalam kewajiban lancar (*current liabilities*) dan jangka panjang (*long-term liabilities*) sekaligus. Hal ini karena pinjaman memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih panjang dari satu tahun, tetapi sebagian pembayarannya jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

Selain itu, sumber dan tujuan penggunaan dana dari utang usaha dan pinjaman juga dapat berbeda. Utang usaha umumnya terjadi sebagai bagian dari operasi rutin perusahaan, dimana

perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, pinjaman sering kali digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang, seperti pembelian aset tetap, ekspansi bisnis, atau restrukturisasi modal.

Dalam praktiknya, manajemen perusahaan umumnya sangat memperhatikan perbedaan karakteristik dan klasifikasi ini dalam mengelola kedua jenis kewajiban tersebut. Hal ini termasuk dalam perencanaan keuangan, manajemen likuiditas, dan analisis risiko, dimana pengelolaan utang usaha dan akun pinjaman memerlukan strategi yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kebutuhan finansial perusahaan. Auditor juga harus mempertimbangkan hal ini untuk menyusun prosedur audit yang tepat.

Pinjaman adalah komponen integral dalam dunia keuangan yang menyajikan beragam bentuk serta karakteristik yang mempengaruhi struktur dan penggunaannya. Dalam konteks ini, beberapa jenis pinjaman yang umumnya dijumpai antara lain kredit modal kerja, utang lease, dan lease obligation. Kredit modal kerja menjadi salah satu bentuk pinjaman yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan atau individu untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Biasanya, pinjaman ini digunakan untuk menutupi kekurangan dana yang timbul dalam siklus operasional, seperti biaya persediaan, pembayaran gaji, atau biaya operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelancaran bisnis.

Selanjutnya, utang lease dan lease obligation merupakan jenis pinjaman yang melibatkan perjanjian sewa guna usaha antara peminjam dengan pihak ketiga yang memiliki aset. Dalam konteks ini, peminjam menggunakan aset tersebut dan membayar sejumlah uang secara berkala sebagai imbalan atas

penggunaannya. Pembayaran sewa ini biasanya melibatkan kewajiban pembayaran tetap selama periode sewa tertentu, yang membedakannya dari jenis pinjaman lainnya.

Dalam konteks akuntansi, pinjaman dicatat sebagai liabilitas perusahaan atau individu yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dengan kontrak. Informasi mengenai pinjaman, seperti jumlah, tingkat bunga, dan jangka waktu, dicatat dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban finansial yang dimiliki oleh entitas tersebut. Pengelolaan pinjaman dengan baik menjadi penting bagi perusahaan untuk mengelola likuiditasnya dengan efisien dan memastikan kelangsungan operasionalnya dalam jangka waktu yang panjang.

13.1 PSP dan Asersi pada Akun Pinjaman

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
M	Pinjaman					
1	Verifikasi Pinjaman dan Kewajiban Terkait	X	X	X	X	X
2	Inspeksi Kontrak	X	X	X	X	X
3	Kepatuhan terhadap Ketentuan Kontrak Pinjaman		X		X	X

13.1.1 Verifikasi Pinjaman dan Kewajiban Terkait

Auditor menjalankan serangkaian prosedur untuk memverifikasi pinjaman dan kewajiban terkait dalam audit laporan keuangan. Salah satu metode yang diterapkan adalah dengan mengumpulkan semua kontrak pinjaman yang dimiliki

oleh perusahaan. Ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen kontrak pinjaman, yang mencakup ketentuan-ketentuan seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat bunga, serta syarat-syarat lainnya yang terkait dengan pembayaran kembali pinjaman.

Selain itu, auditor juga menggunakan prosedur konfirmasi untuk memvalidasi informasi mengenai pinjaman dan kewajiban terkait. Salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan mengirimkan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti bank, institusi keuangan non-bank, dan kreditur lainnya. Konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen kontrak pinjaman sesuai dengan catatan dan pengakuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Proses pengiriman konfirmasi biasanya dilakukan dengan surat resmi yang memuat permintaan untuk konfirmasi atas detail pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang relevan. Penerima konfirmasi diminta untuk memberikan tanggapan tertulis yang memverifikasi atau menyanggah informasi yang tercantum dalam surat konfirmasi.

Dengan menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut, auditor dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan mengenai eksistensi, persyaratan, serta kewajiban pengungkapan pinjaman dan kewajiban terkait dalam laporan keuangan. Hal ini menjadi esensial dalam memastikan keandalan dan keakuratan informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan.

13.1.2 Inspeksi Kontrak Pinjaman

Selain melalui prosedur verifikasi, auditor juga akan melaksanakan inspeksi secara teliti terhadap semua kontrak pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan. Inspeksi ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan keabsahan serta kelengkapan dari kontrak pinjaman yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Dalam proses inspeksi, auditor secara seksama meneliti setiap detail yang terdapat dalam kontrak pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga yang dikenakan, serta segala syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan pembayaran kembali pinjaman. Tujuan dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang terdapat dalam kontrak pinjaman sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Selain itu, auditor juga berusaha untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara informasi yang tercantum dalam kontrak pinjaman dengan informasi yang dicatat dalam catatan keuangan perusahaan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengungkapan pinjaman dalam laporan keuangan mencerminkan dengan akurat kondisi sebenarnya dari kontrak pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan.

Melalui proses inspeksi yang cermat ini, auditor dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kontrak pinjaman dan memastikan bahwa pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang relevan serta dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan.

13.1.3 Kepatuhan pada Ketentuan Kontrak Pinjaman

Dalam menjalankan PSPnya, auditor juga melakukan pengujian terhadap tingkat kepatuhan manajemen perusahaan terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak pinjaman yang mereka terikat. Proses ini mencakup pemeriksaan secara seksama terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak pinjaman, yang umumnya mencakup beragam aspek seperti jadwal angsuran, mekanisme pelunasan pinjaman, serta persyaratan performa keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Dalam konteks persyaratan performa keuangan, auditor akan memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu seperti persyaratan presentase laba bersih, laba bruto, dan rasio utang yang mungkin menjadi bagian dari kesepakatan pinjaman. Auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap catatan dan dokumen yang relevan untuk memverifikasi apakah perusahaan telah mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak pinjaman.

Selain itu, auditor juga akan mengevaluasi tindakan yang telah diambil oleh manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa persyaratan performa keuangan yang ditetapkan dalam kontrak pinjaman dapat dipenuhi. Ini dapat melibatkan penelusuran dan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan, seperti laba bersih, laba bruto, dan rasio utang, untuk memastikan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang memadai untuk

memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pengujian kepatuhan terhadap ketentuan kontrak pinjaman merupakan bagian penting dari proses audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi komitmen finansialnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak kreditur. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

PSP pada Akun Utang Usaha

Utang Usaha merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Definisi utang usaha merujuk pada kewajiban finansial yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak eksternal, seperti pemasok atau kreditur lainnya, dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Pengukuran utang usaha umumnya dilakukan dengan nilai nominalnya, yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, meskipun terdapat pengaruh tambahan dari kondisi-kondisi tertentu, seperti diskon pembayaran dini atau potongan harga.

Dalam pencatatan, utang usaha dicatat dalam neraca perusahaan sebagai bagian dari kewajiban lancar jika jatuh tempo pembayarannya dalam waktu satu tahun, atau sebagai kewajiban jangka panjang jika jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu tahun. Pencatatan dilakukan pada saat transaksi terjadi, di mana perusahaan mencatat kewajiban tersebut sebagai akun utang usaha dan mencatat jumlahnya dalam catatan keuangan.

Pengungkapan juga menjadi bagian penting dalam akuntansi utang usaha. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai utang usaha dalam laporan keuangannya, seperti jumlah utang yang belum dibayar, jatuh tempo pembayaran, bunga yang terkait (jika ada), serta kondisi-kondisi lain yang terkait dengan utang tersebut. Informasi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para pemangku kepentingan tentang kewajiban finansial perusahaan.

Dengan demikian, manajemen perusahaan harus memperhatikan dengan seksama pengelolaan utang usaha agar dapat memastikan kesehatan keuangan perusahaan dan

mematuhi standar serta regulasi akuntansi yang berlaku. Ini termasuk memperhitungkan kewajiban pembayaran tepat waktu dan memastikan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan agar memberikan gambaran yang akurat kepada para pemangku kepentingan.

14.1 PSP dan Asersi pada Akun Utang Usaha

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
1	Kesesuaian Buku Pembantu dengan Buku Besar	X		X		
2	Tinjauan Item yang Tidak Biasa	X	X	X	X	X
3	Cutoff Utang Usaha	X		X	X	
4	Pencarian Kewajiban yang Belum Tercatat		X	X		
5	Analisis Saldo Pemasok			X		
6	Penilaian Utang Usaha dalam Mata Uang Asing		X			

14.1.1 Kesesuaian Buku Besar dan Buku Pembantu atas Akun Utang Usaha

Pengecekan kesesuaian antara buku besar dan buku pembantu atas akun utang usaha merupakan tahap penting dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor. Tahapan ini melibatkan analisis rinci terhadap catatan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan utang usaha terdokumentasi secara akurat dan lengkap. Auditor akan memeriksa buku besar, yang merupakan catatan utama dari

seluruh transaksi perusahaan, dan membandingkannya dengan buku pembantu yang mencatat setiap transaksi secara terperinci.

Proses ini mencakup pencocokan jumlah utang usaha yang tercatat dalam buku besar dengan yang terdapat dalam buku pembantu. Auditor juga akan memeriksa keakuratan pencatatan, mencari kemungkinan kesalahan dalam pengetikan atau pengalihan data, serta meneliti apakah setiap transaksi tercatat dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, auditor juga akan memeriksa adanya transaksi atau pengeluaran yang tidak sah atau tidak diotorisasi yang mungkin memengaruhi saldo akun utang usaha.

Prosedur ini membutuhkan ketelitian dan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari utang usaha. Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan dapat mengarah pada informasi keuangan yang tidak akurat dan dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan yang teliti guna memastikan kesesuaian antara buku besar dan buku pembantu atas akun utang usaha, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan bagi para pemangku kepentingan.

14.1.2 Review Item Tidak Biasa (*Unusual Item Review*)

Dalam prosedur ini, auditor akan melakukan screening dan penyortiran pada buku besar utang usaha, serta mengidentifikasi saldo atau pemasok yang dianggap tidak biasa. Misalnya, dalam industri makanan, keberadaan saldo utang usaha yang signifikan kepada pemasok garmen mungkin dianggap tidak biasa. Tujuan

dari langkah ini adalah untuk mengevaluasi keandalan buku besar utang usaha yang diterima oleh auditor. Dengan menilai keadaan ini, auditor dapat menentukan apakah catatan tersebut dapat diandalkan atau tidak. Melalui pemeriksaan ini, auditor dapat dengan lebih mudah menilai kualitas keseluruhan buku besar utang usaha perusahaan.

Secara definisi, Review Item Tidak Biasa (Unusual Item Review/UIR) merupakan suatu proses pengujian dan evaluasi atas item yang tidak biasa atau tidak terjadi sesuai dengan pola umum dalam transaksi keuangan perusahaan yang diaudit. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aktivitas keuangan yang tidak sah atau meragukan, seperti pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya. Langkah ini biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk mematuhi regulasi dan melindungi diri dari risiko hukum dan keuangan yang mungkin timbul.

14.1.3 Cut off Utang Usaha

Pengujian pisah batas (cut off) utang usaha merupakan suatu proses yang dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi bahwa transaksi yang dicatat oleh perusahaan sesuai dengan periode akuntansi yang berlaku. Dalam konteks utang usaha, pengujian cut-off bertujuan untuk memastikan bahwa pembelian barang dan jasa yang dicatat sebagai utang usaha sesuai dengan memo kredit pemasok dan dicatat pada periode yang tepat. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menjaga integritas informasi keuangan perusahaan dan meminimalkan risiko pengakuan pendapatan atau biaya yang salah pada periode yang tidak sesuai.

Biasanya, auditor akan mengambil sampel transaksi yang terjadi sesaat sebelum dan sesudah tanggal neraca. Setelah itu, auditor akan memeriksa dokumen pendukung yang terkait dengan sampel transaksi tersebut untuk memastikan bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan periode yang seharusnya. Selain itu, klien juga dapat melaksanakan prosedur ini secara berkala, misalnya pada setiap tanggal tutup buku, untuk memastikan bahwa semua utang usaha telah dicatat dan diakui pada periode yang sesuai.

Pengujian cut-off pada utang usaha menjadi krusial karena kesalahan dalam periode pengakuan dan pencatatan transaksi dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus memastikan bahwa semua transaksi utang usaha tercermin dengan akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan menjalankan pengujian cut-off secara cermat, auditor dapat membantu memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan.

14.1.4 Menelusuri Utang Usaha yang Tidak Tercatat

Menelusuri Utang Usaha yang Tidak Tercatat, atau dalam industri prosedur ini disebut Search for Unrecorded Liabilities (SURL) adalah prosedur yang digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi setiap kewajiban yang mungkin terlewatkan atau dicatat secara tidak akurat dalam catatan keuangan perusahaan. Tujuan SURL adalah untuk memastikan bahwa semua kewajiban material telah dicatat dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat memberikan representasi posisi dan kinerja keuangan yang tepat

dan akurat. Proses tersebut biasanya melibatkan peninjauan berbagai sumber informasi internal dan eksternal, seperti kontrak, rekening koran, berita acara penyelesaian hukum, dan dokumentasi lainnya, untuk mengidentifikasi kewajiban yang tidak tercatat.

Selain prosedur substantif biasa, auditor mungkin memeriksa hal-hal berikut saat melakukan Search for Unrecorded Liabilities (SURL):

- Tinjauan kontrak dan perjanjian: Langkah ini termasuk meninjau semua kontrak dan perjanjian yang dapat mengakibatkan kewajiban di masa depan, seperti perjanjian sewa, kontrak layanan, dan perjanjian pasokan.
- Analisis utang dagang: Ini melibatkan peninjauan transaksi utang dagang untuk mengidentifikasi kewajiban yang tidak tercatat atau pembayaran apa pun yang dilakukan setelah tanggal neraca.
- Inquiry dengan manajemen: Ini termasuk mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang kewajiban potensial dan meninjau setiap korespondensi atau catatan yang mungkin memberikan informasi tentang kewajiban yang tidak tercatat.
- Tinjauan pengendalian internal: Auditor juga mungkin meninjau sistem pengendalian internal perusahaan untuk menentukan apakah ada kelemahan yang dapat mengakibatkan kewajiban yang tidak tercatat.
- Pemeriksaan proses hukum: Ini melibatkan peninjauan proses hukum yang sedang berlangsung atau potensi yang dapat mengakibatkan kewajiban di masa depan.
- Tinjauan catatan pajak: Auditor mungkin meninjau catatan pajak perusahaan untuk memastikan bahwa

semua kewajiban yang berkaitan dengan pajak telah dicatat dengan benar.

- Riset pasar: Auditor juga akan meneliti industri dan kondisi pasar untuk mengidentifikasi kewajiban potensial yang mungkin timbul di masa depan.

Salam SURL, auditor seringkali menerapkan suatu pendekatan praktis yang umum digunakan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan terhadap pembayaran lanjutan (subsequent payment) atas utang yang saldonya tidak tercatat dalam laporan keuangan pada tanggal neraca. Subsequent payment ini merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan setelah periode neraca, namun mengacu pada transaksi yang sebenarnya terjadi sebelum tanggal neraca.

Pemeriksaan subsequent payment ini menjadi penting karena dapat mengungkapkan keberadaan utang yang mungkin tidak tercatat secara tepat dalam laporan keuangan. Dengan memeriksa transaksi pembayaran yang terjadi setelah tanggal neraca, auditor dapat mengetahui apakah terdapat utang yang seharusnya dicatat pada periode yang telah berlalu namun belum tercatat dalam buku besar perusahaan. Dengan demikian, prosedur ini membantu memastikan bahwa seluruh kewajiban perusahaan tercermin secara akurat dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan dan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan.

Penting untuk dicatat bahwa cakupan dan sifat prosedur yang akan dilakukan dalam SURL akan bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing perikatan. Prosedur ini biasanya akan membutuhkan banyak dokumen yang berhubungan

dengan poin-poin di atas. Selama klien telah tepat mengakui dan mencatat utang usaha, maka dapat dipastikan tidak akan ada temuan pada prosedur ini.

14.1.5 Analisis Saldo Pemasok/Vendor

Dalam proses PSP, analisis saldo pemasok atau vendor merupakan langkah penting yang dilakukan auditor untuk memverifikasi dan menganalisis informasi terkait akun utang usaha. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari buku besar pembantu, yang mencakup rincian setiap transaksi dengan pemasok atau vendor, termasuk pembelian, pembayaran, dan saldo akhir. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa penilaian terhadap akun utang usaha telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi internal perusahaan serta prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti yang ditetapkan oleh PSAK, GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) atau IFRS (International Financial Reporting Standards).

Auditor akan melakukan rekonsiliasi saldo, yaitu memastikan bahwa saldo akhir yang tercatat dalam buku besar utama konsisten dengan saldo total yang tercantum dalam buku besar pembantu. Selain itu, auditor melakukan cross-referencing atau pemeriksaan silang terhadap dokumen pendukung seperti faktur, bukti pembayaran, dan pesanan pembelian untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah dicatat dengan benar dan akurat. Penilaian ini juga melibatkan verifikasi bahwa semua kebijakan akuntansi terkait telah dipatuhi, termasuk pengakuan utang, pengukuran nilai, dan pencatatan pembayaran.

Selanjutnya, auditor akan menganalisis jenis dan relevansi daftar pemasok serta saldo utang usaha untuk memastikan bahwa semua catatan tersebut tetap relevan dan sesuai dengan keadaan bisnis yang sebenarnya. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidakwajaran dalam pencatatan utang usaha yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis saldo pemasok atau vendor yang dilakukan oleh auditor adalah langkah krusial untuk menjamin keandalan dan integritas laporan keuangan perusahaan.

14.1.6 Valuasi Saldo Utang Usaha yang ada dalam Mata Uang Asing

Dalam konteks perusahaan di Indonesia yang sering bertransaksi dengan pemasok internasional, valuasi saldo utang usaha dalam mata uang asing menjadi aspek yang krusial dan memerlukan perhatian khusus. Transaksi pembelian dari pemasok luar negeri secara rutin akan menghasilkan saldo utang usaha dalam mata uang asing, yang memerlukan prosedur valuasi yang hati-hati dan sesuai standar akuntansi. Prosedur valuasi ini pada dasarnya mirip dengan prosedur untuk akun-akun lain yang juga memiliki saldo dalam mata uang asing.

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. PSAK 10 menetapkan bahwa saldo dalam mata uang asing harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada setiap akhir periode pelaporan (15). Proses konversi ini harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan

bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai yang akurat dan realistis dari kewajiban perusahaan dalam mata uang asing.

Auditor akan memverifikasi bahwa perusahaan telah mengkonversi saldo utang usaha dalam mata uang asing sesuai dengan kurs tengah BI pada tanggal laporan (15). Langkah ini melibatkan pemeriksaan kurs yang digunakan dan memastikan konsistensi penerapan kebijakan tersebut di seluruh laporan keuangan. Selain itu, auditor akan memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan dampak dari perubahan kurs valuta asing pada laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK 10.

Dengan demikian, valuasi saldo utang usaha dalam mata uang asing tidak hanya melibatkan perhitungan matematis sederhana, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi yang relevan serta penerapan yang konsisten dari kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan perusahaan, sehingga dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

PSP pada Akun Perpajakan

Akun perpajakan dalam laporan keuangan mencakup berbagai komponen penting seperti *prepaid tax* (pajak dibayar di muka), *tax payables* (utang pajak), dan *tax expense* (beban pajak). Untuk perusahaan besar, dapat juga termasuk *deffered taxes* (pajak ditangguhkan, seperti aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan). Komponen-komponen ini terbentuk dari transaksi yang melibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), ketetapan pajak dari otoritas pajak, serta denda dan kewajiban pajak lainnya. Setiap komponen memerlukan perhatian khusus dalam penyajiannya karena berpengaruh langsung pada kewajiban dan beban pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

Prepaid tax atau pajak dibayar di muka mencerminkan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan sebelum kewajiban pajak tersebut jatuh tempo. Ini biasanya mencakup kredit pajak dari pembayaran pajak penghasilan dimuka atau kredit PPN yang lebih bayar. Pajak dibayar di muka sering kali timbul karena adanya perbedaan waktu antara saat pajak dibayar dan saat pajak tersebut diakui sebagai beban dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa saldo prepaid tax yang tercatat mencerminkan pembayaran yang sah dan akan diakui sebagai beban pajak pada periode mendatang.

Tax payables atau utang pajak adalah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada otoritas pajak. Ini termasuk kewajiban yang timbul dari PPN yang harus dibayarkan, PPh yang belum disetorkan, serta denda atau bunga yang timbul dari keterlambatan pembayaran pajak. Auditor harus memastikan bahwa utang pajak ini tercatat dengan benar dan

mencerminkan kewajiban yang sesungguhnya, termasuk memverifikasi ketepatan jumlah dan waktu pembayaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tax expense atau beban pajak adalah pajak yang dikenakan pada laba perusahaan selama periode pelaporan. Beban pajak ini mencakup estimasi pajak yang masih harus dibayar serta penyesuaian untuk ketetapan pajak dan denda pajak. Auditor harus memeriksa bahwa beban pajak yang dicatat mencerminkan jumlah yang tepat berdasarkan laba yang dilaporkan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan beban pajak yang akurat dan wajar.

Deferred taxes, atau pajak tangguhan, adalah konsep akuntansi yang menggambarkan perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan komersial dan laporan pajak. Perbedaan ini timbul karena metode dan waktu pengakuan yang berbeda antara standar akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak tangguhan mencakup dua komponen utama, yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, yang bersama-sama membantu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang. Aset ini muncul sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sisa kompensasi kerugian, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Contoh umum aset pajak tangguhan adalah perbedaan dalam metode depresiasi antara akuntansi dan perpajakan. Misalnya, jika perusahaan menggunakan metode

depresiasi yang lebih cepat untuk tujuan pajak daripada untuk laporan keuangan, hal ini akan menghasilkan aset pajak tangguhan karena beban depresiasi yang lebih besar diakui lebih awal untuk tujuan pajak. Contoh lain adalah provisi untuk piutang tak tertagih yang diakui dalam laporan keuangan tetapi belum diakui dalam laporan pajak. Provisi ini akan menghasilkan aset pajak tangguhan karena pada akhirnya akan mengurangi beban pajak di masa depan ketika provisi tersebut diakui untuk tujuan pajak.

Sebaliknya, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar di masa mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas ini muncul ketika pendapatan atau beban diakui pada waktu yang berbeda dalam laporan keuangan dan laporan pajak, menyebabkan pembayaran pajak ditunda hingga periode mendatang. Contoh umum liabilitas pajak tangguhan adalah pengakuan pendapatan yang diakui lebih cepat dalam laporan pajak dibandingkan dalam laporan keuangan. Misalnya, jika pendapatan diterima di muka dan diakui sepenuhnya untuk tujuan pajak pada tahun tersebut, tetapi diakui secara bertahap dalam laporan keuangan, ini akan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan karena perusahaan akan membayar pajak lebih awal untuk tujuan pajak daripada yang diakui dalam laporan keuangan.

Prosedur audit substantif yang dilakukan oleh auditor mencakup verifikasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Ini melibatkan pemeriksaan pembayaran pajak dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor akan memverifikasi dokumen pendukung seperti laporan pajak, faktur pajak, dan bukti pembayaran untuk memastikan bahwa pajak telah dibayar sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan perpajakan dan mengurangi risiko sanksi atau denda dari otoritas pajak.

Rekonsiliasi akun adalah langkah lain yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa saldo akun perpajakan dalam buku besar sesuai dengan laporan pajak yang disampaikan kepada otoritas pajak. Auditor akan memverifikasi bahwa pembayaran PPN, PPh, dan denda pajak yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan data yang ada pada laporan pajak perusahaan. Langkah ini membantu memastikan bahwa tidak ada kesalahan pencatatan yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan.

Konfirmasi dan pengujian kecukupan penyisihan pajak juga menjadi bagian penting dalam prosedur audit. Auditor menguji kecukupan penyisihan untuk utang pajak dan denda pajak dengan memastikan bahwa penyisihan tersebut mencerminkan estimasi yang wajar atas kewajiban pajak yang mungkin timbul. Ini termasuk menilai apakah perusahaan telah membuat penyisihan yang memadai untuk pajak yang akan dibayarkan di masa mendatang berdasarkan transaksi dan kewajiban pajak yang ada.

Analisis beban pajak dilakukan untuk memastikan bahwa beban pajak yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan pajak yang dikenakan pada laba perusahaan selama periode pelaporan. Auditor akan memeriksa bahwa beban pajak yang dicatat sesuai dengan laba kena pajak yang dilaporkan dan bahwa semua penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi perpajakan perusahaan.

Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan efek masa depan dari kewajiban pajak yang tercatat. Ini termasuk potensi dampak dari perubahan regulasi pajak atau hasil dari sengketa pajak yang sedang berlangsung. Auditor perlu memastikan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam penyajiannya, sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang lengkap dan akurat mengenai posisi perpajakan perusahaan. Prosedur audit substantif yang mendalam ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan mencerminkan kewajiban serta beban pajak yang sebenarnya.

15.1 PSP dan Asersi pada Akun Perpajakan

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
O	Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan					
1	Rekonsiliasi Pendapatan Akuntansi dengan Pendapatan Pajak	X		X		X
2	Provisi untuk Pajak Penghasilan		X			X
3	Penurunan Nilai Aset Pajak Tangguhan		X		X	
4	Mutasi Saldo Akun Pajak Penghasilan		X	X		
5	Provisi untuk Posisi Pajak Tertentu		X		X	X
6	Dasar Pencatatan Transaksi Perpajakan dengan Pihak Berelasi		X		X	X

15.1.1. Rekonsiliasi Pendapatan Akuntansi dengan Pendapatan Pajak

Auditor akan menjalankan beberapa tahapan penting dalam menguji rekonsiliasi fiskal pada perusahaan klien yang mengakui akun aset pajak tangguhan atau yang telah menerapkan skema perhitungan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Tahapan-tahapan ini mencakup uji rekonsiliasi fiskal, validasi pemisahan antara perbedaan permanen dan temporer, serta perbandingan item rekonsiliasi fiskal dengan periode sebelumnya disertai pemeriksaan dokumen pendukung yang relevan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan perpajakan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan akurat.

Klien biasanya diminta untuk menyiapkan berbagai dokumen perpajakan seperti bukti potong, daftar nominatif pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dan SPT Tahunan. Selain itu, klien juga harus menyediakan rekonsiliasi pajak, perhitungan aset pajak tangguhan (Deferred Tax Assets/DTA), dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax/CIT). Dokumen-dokumen ini penting bagi auditor untuk melakukan pengujian yang komprehensif. Auditor akan melakukan perhitungan ulang menggunakan kertas kerja mereka dan membandingkan hasilnya dengan perhitungan yang disiapkan oleh klien. Jika klien telah membuat perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, prosedur ini seharusnya tidak menimbulkan kesulitan berarti bagi klien.

Namun, di Indonesia, tidak jarang auditor juga melakukan perhitungan aset pajak tangguhan dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Meskipun langkah ini mungkin memperlancar proses pelaporan, hal ini dapat mengurangi independensi auditor, yang merupakan prinsip penting dalam profesi audit. Perhitungan perpajakan sering dianggap kompleks, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, UMKM disarankan untuk terus memperbarui pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan perhitungan perpajakan. Jika UMKM merasa tidak mampu, maka menunjuk Kantor Jasa Akuntan (KJA) atau Kantor Konsultan Pajak (KKP) untuk memberikan pendampingan dan konsultasi mengenai perhitungan perpajakan adalah langkah yang tepat.

Mengandalkan pihak ketiga yang kompeten dalam bidang perpajakan dapat membantu perusahaan memastikan bahwa perhitungan pajak mereka akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan dan sanksi pajak. Selain itu, ini memungkinkan auditor untuk tetap mempertahankan independensi mereka, yang penting untuk memberikan penilaian objektif dan terpercaya terhadap laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, kolaborasi antara klien, auditor, dan konsultan pajak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan perpajakan dan transparansi laporan keuangan.

Auditor juga harus tetap waspada terhadap perubahan regulasi perpajakan dan standar akuntansi yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak tangguhan dan pajak penghasilan. Mereka perlu memastikan bahwa perhitungan pajak tangguhan mencerminkan dampak dari perubahan kebijakan

pajak dan bahwa semua penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan untuk mencerminkan keadaan fiskal yang sebenarnya. Selain itu, auditor harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang perpajakan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan saran yang tepat dan relevan kepada klien mereka.

Dalam keseluruhan proses audit, transparansi dan komunikasi yang baik antara auditor dan klien sangat penting. Auditor harus menjelaskan temuan mereka dan rekomendasi perbaikan dengan jelas kepada klien, sementara klien harus memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan secara lengkap dan tepat waktu. Pendekatan kolaboratif ini akan membantu memastikan bahwa proses audit berjalan lancar dan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan adalah benar dan dapat diandalkan.

15.1.2. Provisi untuk Pajak Penghasilan

Provisi untuk pajak penghasilan adalah pencadangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi beban pajak penghasilan yang akan dikenakan pada laba yang dihasilkan selama suatu periode tertentu. Provisi ini mencerminkan estimasi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pencadangan ini penting karena memastikan bahwa perusahaan mengakui beban pajak yang relevan pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan terkait, sesuai dengan prinsip *matching* dalam akuntansi.

Klien akan melakukan provisi untuk pajak penghasilan dengan cara menghitung perkiraan beban pajak berdasarkan laba

kena pajak yang dihasilkan selama periode pelaporan. Proses ini melibatkan penentuan pendapatan kena pajak, mengurangi pengeluaran (beban) yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, dan mengaplikasikan tarif pajak yang sesuai untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, klien juga harus mempertimbangkan adanya kredit pajak, sanksi, atau potensi pengurangan pajak yang mungkin berlaku. Setelah menghitung jumlah pajak yang diharapkan, perusahaan mencatat provisi ini dalam laporan keuangan sebagai beban pajak dan kewajiban pajak yang masih harus dibayar.

Auditor akan menguji hasil provisi pajak penghasilan klien dengan melakukan serangkaian prosedur audit yang ketat. Pertama, auditor akan meninjau dokumen dan data pendukung yang digunakan klien untuk menghitung provisi pajak, termasuk laporan laba rugi, jurnal penyesuaian, dan dokumentasi terkait lainnya. Auditor juga akan memeriksa apakah perhitungan pajak telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan apakah tarif pajak yang diterapkan sudah benar. Verifikasi ini melibatkan pengecekan data keuangan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua pendapatan kena pajak dan pengeluaran yang diizinkan telah diidentifikasi dan dihitung dengan tepat.

Selanjutnya, auditor akan melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan hasil perhitungan provisi perpajakan untuk memastikan konsistensi antara keduanya. Prosedur ini mencakup pengecekan atas perbedaan temporer dan permanen yang dapat mempengaruhi provisi pajak penghasilan. Auditor akan memastikan bahwa semua perbedaan ini telah diidentifikasi dan diakui dengan benar dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor juga akan memeriksa apakah perusahaan telah membuat

penyisihan yang memadai untuk kewajiban pajak di masa mendatang, termasuk mempertimbangkan adanya potensi liabilitas pajak yang belum diakui atau kontingensi pajak.

Dalam melakukan pengujian atas provisi pajak penghasilan, auditor juga harus mempertimbangkan dampak dari perubahan peraturan perpajakan yang mungkin terjadi selama periode pelaporan. Perubahan tarif pajak, insentif pajak, atau regulasi lain yang relevan dapat mempengaruhi jumlah provisi yang harus dicadangkan. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa perusahaan telah memperbarui perhitungannya sesuai dengan perubahan tersebut dan bahwa dampaknya telah dicatat dengan benar dalam laporan keuangan.

Auditor juga akan menilai kewajaran dan konsistensi dari kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam mencatat provisi pajak penghasilan. Kebijakan ini harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Auditor juga akan membandingkan provisi pajak penghasilan perusahaan dengan data historis dan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama untuk menilai kewajaran estimasi yang dibuat oleh perusahaan.

Dengan melakukan pengujian yang komprehensif ini, auditor memastikan bahwa provisi untuk pajak penghasilan yang dicatat dalam laporan keuangan adalah wajar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini penting untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran yang akurat dan andal mengenai kewajiban perpajakan perusahaan.

15.1.3. Penurunan Nilai Aset Pajak Tangguhan

Penurunan nilai aset pajak tangguhan merupakan evaluasi penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa nilai tercatat dari aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan mencerminkan jumlah yang dapat dipulihkan melalui keuntungan kena pajak di masa mendatang. Aset pajak tangguhan dapat mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti bahwa sebagian atau seluruh aset tersebut mungkin tidak dapat direalisasikan, biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kena pajak yang cukup di masa mendatang.

Auditor akan menjalankan prosedur pengujian penurunan nilai dari aset pajak tangguhan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan melalui serangkaian langkah yang sistematis dan mendalam. Pertama, auditor akan menilai asumsi dan estimasi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan. Ini termasuk meninjau proyeksi laba kena pajak masa depan yang digunakan sebagai dasar pengakuan aset pajak tangguhan. Auditor akan memverifikasi apakah proyeksi tersebut didasarkan pada data historis yang wajar, tren industri, dan kondisi ekonomi yang relevan.

Selanjutnya, auditor akan menguji kelayakan proyeksi laba kena pajak yang disiapkan oleh manajemen. Ini melibatkan analisis terhadap rencana bisnis dan strategi perusahaan, termasuk penilaian atas kelayakan asumsi pertumbuhan pendapatan, pengendalian biaya, dan keberlanjutan operasi perusahaan. Auditor juga akan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar dan persaingan yang dapat

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai proyeksi laba yang telah ditetapkan.

Selain itu, auditor akan mengevaluasi apakah perusahaan memiliki riwayat realisasi laba kena pajak yang konsisten dengan proyeksi masa depan. Jika terdapat perbedaan signifikan antara proyeksi sebelumnya dan realisasi aktual, auditor akan menilai penyebab perbedaan tersebut dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelayakan proyeksi saat ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyeksi laba kena pajak masa depan yang digunakan dalam pengakuan aset pajak tangguhan adalah realistis dan dapat diandalkan.

Auditor juga akan mempertimbangkan potensi dampak dari perubahan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi realisasi aset pajak tangguhan. Perubahan tarif pajak, insentif pajak, atau kebijakan perpajakan lainnya dapat berdampak signifikan terhadap jumlah aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan semua perubahan regulasi yang relevan dan bahwa penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan dalam perhitungan aset pajak tangguhan.

Dalam rangka memastikan bahwa aset pajak tangguhan dinilai secara konservatif, auditor akan menguji sensitivitas proyeksi laba kena pajak terhadap perubahan dalam asumsi kunci. Ini melibatkan simulasi berbagai skenario untuk menilai dampak potensial dari perubahan dalam faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, dan pengeluaran operasional. Dengan melakukan analisis sensitivitas ini, auditor dapat menilai sejauh mana proyeksi laba kena pajak tetap valid di bawah kondisi yang berbeda dan mengidentifikasi risiko yang mungkin tidak diantisipasi oleh manajemen.

Auditor wajib mendokumentasikan semua temuan dan kesimpulan mereka dalam kertas kerja audit. Ini termasuk bukti bahwa penurunan nilai aset pajak tangguhan telah diuji secara memadai dan bahwa nilai tercatat dalam laporan keuangan adalah wajar dan dapat dipulihkan. Auditor juga akan memastikan bahwa pengungkapan yang relevan mengenai aset pajak tangguhan dan potensi penurunan nilai telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dengan menjalankan prosedur pengujian yang komprehensif ini, auditor dapat memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa nilai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan adalah akurat dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Proses ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang andal dan transparan mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

15.1.4. Mutasi Saldo Akun Pajak Penghasilan

Pengecekan mutasi saldo akun pajak penghasilan merupakan bagian integral dari PSP pada akun perpajakan yang dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pencatatan beban pajak penghasilan selama periode pelaporan. Auditor akan melakukan pengecekan mutasi saldo akun pajak penghasilan dengan prosedur yang cermat dan terstruktur, mencakup beberapa langkah penting.

Pertama, auditor akan memulai dengan memperoleh dan meninjau rekonsiliasi pajak yang disiapkan oleh manajemen. Rekonsiliasi ini harus mencakup saldo awal akun pajak

penghasilan, beban pajak penghasilan yang diakui selama periode tersebut, pembayaran pajak yang dilakukan, serta saldo akhir akun pajak penghasilan. Auditor akan memastikan bahwa semua elemen ini telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan dokumen pendukung yang relevan.

Selanjutnya, auditor akan memverifikasi entri jurnal yang mempengaruhi akun pajak penghasilan sepanjang periode pelaporan. Ini mencakup pemeriksaan atas jurnal penyesuaian pajak yang dilakukan pada akhir periode untuk mencatat beban pajak yang masih harus dibayar atau penyesuaian lainnya. Auditor akan memastikan bahwa entri jurnal ini didukung oleh dokumentasi yang memadai dan mencerminkan transaksi pajak yang sebenarnya terjadi.

Untuk menilai keakuratan pencatatan, auditor akan membandingkan laporan laba rugi fiskal dengan laporan keuangan komersial perusahaan. Perbedaan antara kedua laporan ini seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan perpajakan dan akuntansi. Auditor akan memastikan bahwa semua perbedaan ini telah diidentifikasi, dianalisis, dan dicatat dengan benar dalam rekonsiliasi pajak.

Auditor juga akan menelusuri pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sepanjang periode pelaporan. Ini melibatkan verifikasi atas bukti pembayaran pajak seperti bukti transfer bank atau bukti setoran pajak dari kantor pajak. Auditor akan memastikan bahwa semua pembayaran pajak telah dicatat dengan benar dan telah diterapkan terhadap kewajiban pajak yang sesuai.

Selain itu, auditor akan menguji ketepatan pengakuan provisi pajak penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan. Ini termasuk memeriksa asumsi dan estimasi yang digunakan oleh manajemen dalam menghitung beban pajak yang masih harus dibayar. Auditor akan menilai apakah asumsi ini wajar dan didukung oleh bukti yang memadai, serta memastikan bahwa estimasi ini konsisten dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk memastikan integritas saldo akhir akun pajak penghasilan, auditor akan membandingkan saldo tersebut dengan laporan pajak tahunan perusahaan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Auditor akan memastikan bahwa angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan angka-angka yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Jika terdapat perbedaan, auditor akan menyelidiki penyebabnya dan menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan.

Auditor juga wajib mendokumentasikan seluruh temuan dan prosedur yang telah dilakukan dalam kertas kerja audit. Dokumentasi ini harus mencakup bukti bahwa semua mutasi saldo akun pajak penghasilan telah diuji secara memadai dan bahwa saldo akhir akun tersebut adalah akurat dan lengkap. Auditor juga akan memastikan bahwa laporan keuangan memberikan pengungkapan yang memadai mengenai beban pajak penghasilan dan kewajiban pajak yang relevan.

15.1.5. Provisi untuk Posisi Pajak Tertentu

Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak-pihak berelasi memiliki potensi untuk menimbulkan kontinjensi pajak yang signifikan. Kontinjensi ini dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk interpretasi yang berbeda terhadap peraturan

perpajakan, perubahan kebijakan pajak, atau tindakan dari otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk membentuk provisi yang memadai guna mengantisipasi potensi kewajiban pajak yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Pembentukan provisi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi terbaik dari jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Auditor memiliki peran penting dalam memastikan bahwa provisi yang dibentuk oleh perusahaan telah mencerminkan secara akurat risiko dan potensi kewajiban yang berkaitan dengan posisi pajak tertentu. Untuk itu, auditor harus melakukan prosedur audit yang ketat dan terstruktur. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait pembentukan provisi pajak. Auditor perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku dan regulasi perpajakan yang relevan. Evaluasi ini melibatkan peninjauan terhadap metode yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi kewajiban pajak.

Selain itu, auditor harus melakukan analisis mendalam terhadap transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Analisis ini mencakup pemeriksaan dokumentasi pendukung, kontrak, dan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko pajak yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dalam proses ini, auditor juga perlu mempertimbangkan apakah transaksi tersebut dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan prinsip kewajaran pasar, karena transaksi yang tidak wajar dapat meningkatkan risiko penyesuaian pajak oleh otoritas pajak.

Selanjutnya, auditor perlu melakukan konsultasi dengan ahli pajak, terutama dalam situasi di mana terdapat kompleksitas pajak yang tinggi. Konsultasi ini dapat memberikan wawasan tambahan dan memastikan bahwa semua aspek pajak telah dipertimbangkan dengan tepat. Ahli pajak dapat membantu auditor dalam menilai apakah provisi yang dibentuk sudah mencukupi dan sesuai dengan risiko yang ada. Mereka juga dapat memberikan panduan mengenai perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi posisi pajak perusahaan.

Terakhir, auditor harus memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi terkait provisi pajak didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini mencakup penjelasan mengenai metodologi yang digunakan, asumsi yang dibuat, serta pertimbangan profesional yang mendasari keputusan auditor. Dokumentasi yang baik tidak hanya membantu dalam menjaga transparansi proses audit tetapi juga menjadi referensi penting dalam menghadapi kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas pajak atau peninjauan internal di masa mendatang.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, auditor dapat membantu memastikan bahwa provisi untuk posisi pajak tertentu yang dibentuk oleh perusahaan adalah memadai dan sesuai dengan risiko yang ada. Hal ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan siap menghadapi potensi kewajiban pajak di masa mendatang.

15.1.6. Dasar Pencatatan Transaksi Perpajakan dengan Pihak Berelasi

Transaksi perpajakan antara perusahaan dan pihak-pihak berelasi memerlukan pencatatan yang cermat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pencatatan transaksi ini harus didasarkan pada prinsip kewajaran atau *arms length basis*, yang berarti bahwa transaksi harus dilakukan seolah-olah pihak-pihak yang terlibat adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan istimewa satu sama lain. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga dan kondisi transaksi tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa tersebut, yang dapat berdampak pada kewajaran laporan keuangan dan beban pajak yang harus dibayar.

Auditor memiliki tanggung jawab penting dalam menguji transaksi perusahaan dengan pihak-pihak berelasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memiliki basis yang kuat dan telah dicatat sesuai dengan prinsip *arms length*. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap dokumentasi yang mendukung transaksi, termasuk kontrak, perjanjian, dan bukti transaksi lainnya. Auditor harus memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan kondisi pasar, serta mematuhi semua regulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas ini, auditor sering kali dihadapkan pada kompleksitas perhitungan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga transaksi dengan pihak berelasi. Ketika perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan terlalu rumit untuk dimengerti, auditor dapat mengambil langkah proaktif dengan menghire profesional atau ahli di bidang perpajakan dan *transfer pricing*. Keterlibatan ahli ini dapat

memberikan wawasan tambahan dan membantu auditor dalam menilai kewajaran dan kepatuhan transaksi terhadap prinsip *arms length*. Ahli pajak atau *transfer pricing* dapat membantu dalam menganalisis metode penentuan harga, asumsi yang digunakan, serta kesesuaian dengan peraturan dan pedoman perpajakan yang berlaku.

Selain itu, konsultasi dengan ahli juga dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan pihak berelasi dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko tersebut. Misalnya, ahli dapat memberikan panduan mengenai dokumentasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi perusahaan dalam transaksi tersebut, atau memberikan saran mengenai strategi *transfer pricing* yang lebih efektif dan sesuai dengan regulasi perpajakan internasional.

Auditor harus selalu memastikan bahwa hasil dari evaluasi dan konsultasi dengan ahli didokumentasikan secara lengkap dan transparan. Dokumentasi ini harus mencakup semua temuan, analisis, dan rekomendasi yang diberikan oleh ahli, serta langkah-langkah yang diambil oleh auditor untuk menilai kewajaran dan kepatuhan transaksi. Dokumentasi yang baik tidak hanya membantu dalam menjaga integritas proses audit tetapi juga menyediakan bukti yang kuat dalam menghadapi potensi pemeriksaan oleh otoritas pajak atau peninjauan internal di masa mendatang.

Dengan mengikuti prosedur yang ketat dan melibatkan ahli yang kompeten, auditor dapat memastikan bahwa transaksi perpajakan dengan pihak berelasi dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip *arms length*. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan

keuangan perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

**PSP pada Akun Beban Akrua, Kewajiban
Lainnya dan Pendapatan Ditangguhkan**

Akun beban akrual dalam konteks perusahaan ritel atau industri lainnya seringkali menjadi tantangan yang kompleks bagi auditor. Kompleksitas ini disebabkan oleh variasi kewajiban dan amortisasi yang tidak konvensional, memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai operasi dan transaksi perusahaan. Dalam akun beban akrual, auditor harus memperhatikan beberapa komponen utama, termasuk kewajiban lainnya dan pendapatan ditangguhkan, yang masing-masing melibatkan jenis transaksi tertentu.

Akun beban akrual umumnya mencakup kewajiban yang berasal dari biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar pada akhir periode akuntansi. Contohnya, di industri manufaktur, beban akrual mungkin melibatkan estimasi biaya perbaikan dan pemeliharaan yang telah dilakukan namun fakturnya belum diterima.

Akun kewajiban lainnya cenderung mencatat kewajiban jangka pendek atau panjang yang tidak termasuk dalam kategori akrual spesifik. Misalnya, perusahaan bisa memiliki utang pajak penjualan atau utang gaji dan upah yang masih harus dibayar kepada karyawan. Kewajiban lainnya yang dibahas pada bagian ini juga termasuk akun liabilitas imbalan kerja (*employee benefits*).

Employee benefits atau imbalan kerja adalah sejumlah manfaat yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari paket kompensasi mereka oleh perusahaan. Manfaat ini dapat berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, cuti berbayar, asuransi jiwa, dan berbagai bentuk imbalan lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari penggantian atas jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Dalam konteks akuntansi keuangan, *employee benefits* dianggap sebagai kewajiban

yang harus diakui dan dilaporkan secara akurat dalam Laporan Keuangan perusahaan.

Liabilitas imbalan kerja merujuk pada kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan untuk memberikan manfaat imbalan kerja kepada karyawan di masa depan sebagai imbalan atas layanan yang telah mereka berikan di masa sekarang. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan manfaat pensiun, kesehatan, cuti, dan manfaat lainnya kepada karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Penting untuk diingat bahwa kewajiban imbalan kerja seringkali memiliki sifat jangka panjang dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun seiring dengan jangka waktu layanan karyawan. Karena itu, pengakuan dan pengukuran liabilitas imbalan kerja melibatkan estimasi dan asumsi yang kompleks, termasuk estimasi masa depan biaya imbalan kerja, tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini kewajiban, serta faktor demografis dan ekonomi lainnya.

Sementara itu, akun pendapatan ditangguhkan umumnya berisi pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan tetapi belum diakui karena barang atau jasa terkait belum diserahkan kepada pelanggan. Di industri teknologi, ini mungkin terjadi dalam konteks penjualan keanggotaan atau subscription yang berlaku untuk periode tertentu di masa mendatang.

Auditor harus melakukan prosedur audit yang komprehensif untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pencatatan dalam akun-akun tersebut. Ini melibatkan peninjauan dokumen pendukung, konfirmasi dengan pihak terkait, serta analisis terhadap estimasi dan asumsi yang digunakan perusahaan. Jika perhitungan atau pencatatan yang dilakukan

perusahaan terlalu rumit atau memerlukan keahlian khusus, auditor dapat memilih untuk melibatkan profesional atau ahli yang relevan untuk memberikan masukan dan bantuan tambahan dalam menjalankan prosedur audit dengan efektif.

16.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Akrua, Kewajiban Lainnya dan Pendapatan Ditangguhkan

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
P	Beban Akrua, Kewajiban Lainnya dan Pendapatan Ditangguhkan	E	V	C	R	P
1	Kecocokan dan Kelengkapan Dokumen Pendukung Beban Akrua	X		X		
2	Dana Jangka Panjang Terkait Imbalan Kerja	X	X			
3	Kesesuaian Kewajiban Lainnya	X				
4	Tinjauan Konfirmasi dari Pengacara Perusahaan	X	X	X	X	X
5	Pencarian Penyisihan dan Akrua yang Tidak Tercatat		X	X	X	

16.1.1. Kecocokan dan Kelengkapan Bukti Dokumen Pendukung Beban Akrua

Pada akhir periode akuntansi, perusahaan yang menjalankan operasinya secara normal diharapkan untuk mengakui beban akrua dalam Laporan Posisi Keuangan mereka. Beban akrua, sesuai dengan prinsip akuntansi akrua, merujuk pada beban yang diakui sebelum terjadinya arus kas yang terkait.

Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan secara akurat dan tepat posisi finansial mereka.

Dalam konteks pelaksanaan PSP, auditor memiliki tanggung jawab untuk memeriksa akun beban akrual. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akun tersebut tercatat dan diklasifikasikan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Proses pemeriksaan ini melibatkan beberapa prosedur yang dirancang untuk menguji kecocokan dan kelengkapan bukti dokumen pendukung.

Prosedur pemeriksaan tersebut dapat mencakup pemeriksaan dokumen pendukung yang menunjang pencatatan beban akrual, seperti faktur, kontrak layanan, atau bukti transaksi lainnya. Selain itu, auditor juga dapat melakukan konfirmasi langsung dengan pihak ketiga terkait, seperti pemasok atau vendor, untuk memverifikasi informasi yang terkandung dalam dokumen pendukung tersebut. Analisis kecukupan saldo juga menjadi bagian penting dari prosedur pemeriksaan, di mana auditor akan mengevaluasi apakah jumlah yang tercatat dalam akun beban akrual sesuai dengan estimasi yang wajar dan relevan dengan operasi perusahaan.

16.1.2. Dana Jangka Panjang Terkait Imbalan Kerja dan Pensiun

PSP ini berisi pengujian yang dilakukan oleh auditor terhadap catatan perusahaan terkait imbalan kerja dan pensiun karyawan. Dalam praktiknya, perhitungan imbalan kerja dan pensiun seringkali melibatkan estimasi yang kompleks dan berjangka panjang, yang memerlukan keahlian khusus. Oleh

karena itu, perusahaan biasanya menggunakan jasa aktuaris untuk menghitung nilai kewajiban ini dengan akurat dan andal.

Dalam konteks pelaksanaan PSP, auditor memiliki tanggung jawab penting untuk memeriksa perhitungan atas akun liabilitas imbalan kerja karyawan. Tanggung jawab ini mencakup verifikasi bahwa perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan bahwa estimasi yang digunakan mencerminkan kondisi dan asumsi yang realistis. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang kritis.

Pertama, auditor harus mengevaluasi kelayakan dan kredibilitas aktuaris yang digunakan oleh perusahaan. Ini termasuk meninjau kualifikasi profesional, pengalaman, dan metodologi yang diterapkan oleh aktuaris dalam melakukan perhitungan imbalan kerja. Auditor harus memastikan bahwa aktuaris tersebut memenuhi standar profesional yang diperlukan dan menggunakan pendekatan yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kedua, auditor perlu menelaah asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja. Asumsi ini dapat mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, umur pensiun, dan faktor demografis lainnya seperti tingkat kematian dan tingkat pergantian karyawan. Auditor harus memastikan bahwa asumsi-asumsi ini realistis dan didukung oleh data historis serta proyeksi masa depan yang wajar.

Selanjutnya, auditor harus memeriksa konsistensi dan kecermatan perhitungan yang dilakukan. Ini melibatkan verifikasi data karyawan yang digunakan dalam perhitungan, seperti usia, masa kerja, dan gaji saat ini, serta memastikan bahwa semua data yang relevan telah dimasukkan dengan benar dalam

model aktuarial. Auditor juga harus menilai apakah perhitungan tersebut telah memperhitungkan semua komponen manfaat yang diharapkan, termasuk tunjangan kesehatan pasca-kerja dan manfaat pensiun lainnya.

Selain itu, auditor perlu memastikan bahwa hasil perhitungan liabilitas imbalan kerja ini telah diungkapkan dengan benar dalam Laporan Keuangan perusahaan. Pengungkapan ini harus mencakup informasi yang cukup tentang asumsi yang digunakan, metodologi perhitungan, serta analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi utama. Transparansi dalam pengungkapan ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang besarnya kewajiban imbalan kerja dan potensi dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan.

16.1.3. Pengujian Kesesuaian Kewajiban Lainnya

Akun "other liabilities" atau kewajiban lain-lain seharusnya berisi transaksi-transaksi liabilitas yang tidak material dan dikumpulkan serta dilaporkan sebagai akun "lainnya" dalam liabilitas. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering kali memanfaatkan akun ini dengan membentuk jurnal debit beban dan kredit kewajiban lain-lain dalam jumlah besar untuk memperkecil laba sebelum pajak, dengan tujuan mengurangi beban pajak yang terutang. Praktik ini dapat mengaburkan gambaran keuangan perusahaan yang sesungguhnya dan berdampak negatif terhadap transparansi dan keandalan laporan keuangan.

Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan ini, auditor harus melakukan pengujian kesesuaian semua transaksi dalam

akun kewajiban lain-lain. Langkah pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap data transaksi dalam akun kewajiban lain-lain, termasuk pemeriksaan tanggal transaksi, jumlah, dan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat adalah sah dan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

Selain itu, auditor perlu mengevaluasi dokumen pendukung untuk setiap transaksi yang tercatat dalam akun ini. Dokumen pendukung dapat berupa faktur, kontrak, atau bukti pembayaran yang mengonfirmasi keberadaan dan keabsahan transaksi. Konfirmasi dengan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kewajiban yang dicatat memang benar adanya dan bukan merupakan upaya untuk mengurangi laba secara tidak sah.

Pengujian lebih lanjut dilakukan atas materialitas dan kelaziman transaksi, dengan auditor meneliti apakah transaksi dalam akun kewajiban lain-lain memiliki materialitas yang signifikan dan apakah transaksi tersebut lazim dalam konteks operasional perusahaan. Transaksi yang tidak lazim atau memiliki materialitas tinggi perlu diteliti lebih lanjut. Evaluasi kebijakan akuntansi perusahaan terkait pencatatan kewajiban lain-lain juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak memberikan celah untuk manipulasi laporan keuangan.

Akhirnya, auditor menguji jurnal penyesuaian yang terkait dengan akun kewajiban lain-lain, terutama yang dilakukan menjelang akhir periode pelaporan. Jurnal penyesuaian yang mencurigakan atau tidak didukung oleh bukti yang memadai akan menjadi fokus investigasi lebih lanjut. Dengan melakukan prosedur-prosedur ini, auditor dapat memberikan keyakinan

bahwa akun kewajiban lain-lain disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pengujian ini penting untuk memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan transparan.

16.1.4. Tinjauan Konfirmasi dari Pengacara Perusahaan

Pada perencanaan audit, atau dalam tahap audit interim, auditor wajib melakukan konfirmasi kepada penasihat hukum atau pengacara independen perusahaan untuk memperoleh informasi terkait tuntutan hukum, kewajiban kontinjensi, dan hal material lain di ranah hukum yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Prosedur ini merupakan bagian penting dari audit karena membantu auditor mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan kewajiban hukum yang belum terungkap, serta memastikan bahwa semua kewajiban yang relevan telah diakui dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

Konfirmasi dari pengacara perusahaan memberikan auditor wawasan yang mendalam mengenai litigasi yang sedang berlangsung dan potensi risiko hukum yang mungkin tidak tercermin dalam catatan akuntansi. Pengacara perusahaan, dengan pengetahuan khusus mereka mengenai situasi hukum yang dihadapi perusahaan, dapat memberikan informasi yang tidak hanya mencakup status kasus hukum saat ini tetapi juga perkiraan hasil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini sangat penting bagi

auditor dalam mengevaluasi kewajaran penyajian kewajiban kontinjensi dan potensi dampaknya terhadap laporan keuangan.

Selain itu, konfirmasi ini berguna untuk mencari informasi yang mendalam mengenai risiko litigasi yang dapat berakibat pada munculnya kewajiban perusahaan yang tidak terduga. Pengacara dapat memberikan pandangan mereka tentang kemungkinan dan besarnya kewajiban yang mungkin timbul dari tuntutan hukum atau sengketa lainnya. Dengan demikian, auditor dapat menilai apakah manajemen telah membuat penyisihan yang memadai untuk kewajiban kontinjensi atau apakah pengungkapan tambahan diperlukan untuk memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang posisi keuangan perusahaan.

Prosedur konfirmasi hukum juga membantu auditor dalam menyorot semua asersi pada akun kewajiban, termasuk kelengkapan, akurasi, dan keberadaan kewajiban tersebut. Informasi dari pengacara perusahaan memungkinkan auditor untuk mengevaluasi apakah semua kewajiban yang mungkin signifikan telah diakui dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tanpa konfirmasi ini, auditor mungkin tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kewajiban hukum yang material, yang dapat mengakibatkan laporan audit yang tidak akurat atau menyesatkan.

Secara keseluruhan, tinjauan konfirmasi dari pengacara perusahaan adalah langkah krusial dalam proses pelaksanaan PSP yang membantu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Melalui konfirmasi ini, auditor dapat mengidentifikasi dan

menilai risiko hukum secara tepat, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dan memberikan keyakinan yang lebih tinggi kepada para pemangku kepentingan tentang integritas laporan keuangan perusahaan.

16.1.5. Penelusuran Beban Akrua yang Tidak Tercatat

Penelusuran Beban Akrua yang Tidak Tercatat, atau yang sering dikenal dengan Search for Unrecorded Accruals (SURA), merupakan suatu prosedur audit yang diterapkan oleh auditor untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan pencatatan beban akrual dalam laporan keuangan klien. Prosedur ini mirip dengan Search for Unrecorded Liabilities (SURL), namun secara spesifik ditujukan untuk akun beban akrual.

Dalam pelaksanaan SURA, auditor melakukan analisis mendalam terhadap data historis, mengevaluasi dokumen pendukung, serta melakukan konfirmasi dengan pihak terkait. Auditor juga menguji apakah semua transaksi dalam akun beban akrual dapat secara prinsip diakui sebagai beban akrual. Pengujian ini penting karena dalam industri, akun ini seringkali menjadi "tampungan" bagi beban-beban yang sebenarnya digunakan oleh perusahaan untuk memperkecil laba sebelum pajak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa seluruh beban akrual yang seharusnya tercatat telah diakui dalam laporan keuangan.

Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan komprehensif. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa semua beban akrual telah dicatat dan diklasifikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar

akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan SURA memungkinkan auditor untuk menegaskan bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai pencatatan akrual.

Melalui prosedur SURA, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material terkait dengan beban akrual yang tidak tercatat. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut didasarkan pada informasi yang benar dan tepat waktu, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pelaksanaan SURA oleh auditor juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan integritas laporan keuangan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Dengan menerapkan prosedur SURA secara efektif, auditor tidak hanya memenuhi standar profesi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan praktik akuntansi yang baik. Ini sangat penting dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga reputasi perusahaan di mata investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

**PSP pada Akun Liabilitas Jangka Panjang
dan Angsuran (*Lease*)**

Liabilitas jangka panjang dan angsuran (*lease*) dalam kaidah akuntansi biasanya berisi akun-akun yang mencerminkan kewajiban finansial yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Akun-akun tersebut meliputi, antara lain, pinjaman jangka panjang, obligasi yang diterbitkan, dan kewajiban leasing. Tantangan utama dalam pelaporan akun-akun ini adalah pengklasifikasian bunga dari liabilitas jangka panjang dan angsuran jangka panjang yang belum jatuh tempo, serta pengukuran dan pelaporannya yang tepat.

Pengklasifikasian bunga menjadi krusial karena bunga yang terkait dengan liabilitas jangka panjang harus dipisahkan antara bagian yang sudah jatuh tempo dan bagian yang belum jatuh tempo. Ini mencakup identifikasi pembayaran bunga yang harus diakui sebagai beban pada periode berjalan dan bunga yang harus dicatat sebagai kewajiban untuk periode mendatang. Proses ini memerlukan pengukuran yang akurat untuk memastikan bahwa alokasi bunga dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti metode suku bunga efektif.

Auditor harus melakukan beberapa prosedur untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pencatatan serta pelaporan liabilitas jangka panjang dan angsuran. Prosedur pertama adalah pemeriksaan kontrak dan perjanjian terkait dengan pinjaman jangka panjang dan leasing. Ini termasuk verifikasi syarat dan ketentuan pinjaman, jadwal pembayaran, dan suku bunga yang berlaku. Auditor harus memastikan bahwa semua kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut telah dicatat dengan benar dalam buku besar perusahaan.

Selanjutnya, auditor perlu menguji perhitungan amortisasi bunga menggunakan metode yang tepat, seperti metode suku bunga efektif. Proses ini melibatkan pengecekan perhitungan bunga yang diakui sebagai beban dan yang dicatat sebagai kewajiban. Auditor harus memastikan bahwa perhitungan ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan mencerminkan beban bunga dan kewajiban dengan benar.

Prosedur lain yang penting adalah konfirmasi dengan pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman atau leasing. Konfirmasi ini bertujuan untuk memverifikasi saldo liabilitas yang tercatat dalam laporan keuangan serta memastikan tidak ada kewajiban yang tidak dilaporkan. Auditor juga harus melakukan analisis terhadap pembayaran angsuran yang dilakukan selama periode audit untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut telah dicatat dan dialokasikan dengan benar antara pokok pinjaman dan bunga.

Terakhir, auditor perlu mengevaluasi pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan liabilitas jangka panjang dan angsuran dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini harus mencakup informasi yang relevan seperti jadwal jatuh tempo, suku bunga yang berlaku, dan perjanjian terkait lainnya. Auditor harus memastikan bahwa pengungkapan tersebut mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku dan memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan keuangan.

17.1. PSP dan Asersi Kewajiban Jangka Panjang dan Angsuran

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
Q	Kewajiban Jangka Panjang dan Angsuran					
1	Biaya Bunga Utang Jangka Panjang dan Kepatuhan dengan Perjanjian	X	X	X	X	X
2	Inspeksi Perjanjian Baru				X	X
3	Identifikasi dan Pemeriksaan Agunan			X	X	X
4	Verifikasi Keberadaan dan Kewajiban	X	X	X	X	X
5	Kontrak Angsuran dan Kontrak Sewa	X				X

17.1.1. Biaya Bunga Utang Jangka Panjang dan Kepatuhan dengan Perjanjian

Pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus mengidentifikasi biaya bunga atas pinjaman jangka panjang dan melakukan penilaian atas kepatuhan mereka terhadap perjanjian utang yang dimiliki. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua biaya bunga telah dicatat dengan benar dan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan perjanjian pinjaman, seperti batasan keuangan dan kovenan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Kepatuhan terhadap perjanjian ini tidak hanya penting untuk pengelolaan risiko keuangan tetapi juga untuk menjaga hubungan baik dengan kreditor.

Auditor akan menguji ketepatan klasifikasi antara porsi pokok dan bunga atas kewajiban jangka panjang dan angsuran

mereka. Proses ini mencakup verifikasi bahwa pembayaran yang dilakukan perusahaan telah dialokasikan dengan benar antara pelunasan pokok dan pembayaran bunga sesuai dengan jadwal amortisasi yang berlaku. Selain itu, auditor harus memastikan bahwa biaya bunga yang diakui dalam laporan keuangan mencerminkan biaya yang sebenarnya terjadi selama periode tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti metode suku bunga efektif.

Proses pengujian kepatuhan dan pengklasifikasian ini menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi auditor. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam memperoleh data rekap utang jangka panjang dan angsuran perusahaan. Sering kali, perusahaan tidak memiliki rekapitulasi yang lengkap atau memadai mengenai utang mereka, atau data yang ada tidak sesuai dengan sistem akuntansi perusahaan. Ketidakcocokan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam pencatatan, ketidaksesuaian antara sistem manajemen utang dan sistem akuntansi, atau kurangnya dokumentasi yang mendukung.

Untuk mengatasi tantangan ini, auditor perlu menerapkan prosedur audit yang mendalam dan teliti. Pertama, auditor harus meminta dan meninjau semua dokumentasi terkait utang jangka panjang dan angsuran, termasuk perjanjian pinjaman, jadwal pembayaran, dan laporan bunga yang terakumulasi. Auditor juga perlu melakukan konfirmasi eksternal dengan pihak pemberi pinjaman untuk memverifikasi saldo utang dan rincian pembayaran bunga. Selain itu, auditor dapat melakukan rekonsiliasi antara catatan perusahaan dan data dari pemberi pinjaman untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian.

Selanjutnya, auditor harus menguji pengendalian internal perusahaan terkait manajemen utang dan pelaporan bunga. Ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas pengendalian yang ada untuk memastikan bahwa transaksi utang dicatat secara akurat dan tepat waktu, serta bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Auditor juga harus mengevaluasi apakah perusahaan memiliki prosedur yang memadai untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian utang dan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kovenan.

17.1.2. Inspeksi Perjanjian Pinjaman/Angsuran Baru

Dalam pelaksanaan prosedur audit terkait inspeksi perjanjian pinjaman atau angsuran baru, auditor memulai dengan melakukan inquiry kepada manajemen perusahaan mengenai adanya perjanjian utang atau angsuran baru yang telah disepakati selama periode audit, serta menanyakan adanya adendum pada perjanjian yang sudah ada. Proses ini penting untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam struktur utang perusahaan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman yang ada.

Setelah memperoleh informasi mengenai perjanjian baru atau adendum, auditor akan mengecek mutasi saldo pinjaman jangka panjang dan angsuran. Hal ini dilakukan dengan membandingkan saldo yang tercatat dalam buku besar perusahaan dengan bukti pendukung, seperti perjanjian pinjaman, jadwal pembayaran, dan konfirmasi dari pemberi pinjaman. Langkah ini memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan pinjaman dan angsuran telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Prosedur ini juga mencakup verifikasi apakah perubahan saldo pinjaman jangka panjang dan angsuran telah diakui dan diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan. Auditor harus memastikan bahwa setiap perubahan dalam utang perusahaan, baik itu penambahan utang baru, pelunasan sebagian atau seluruhnya, maupun modifikasi perjanjian, telah dicatat secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Selain itu, auditor perlu mengevaluasi implikasi dari perjanjian baru atau adendum terhadap kewajiban kontinjensi dan kovenan pinjaman. Hal ini melibatkan analisis terhadap persyaratan perjanjian, termasuk batasan keuangan dan persyaratan lainnya yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Auditor harus menilai apakah perusahaan memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan tersebut dan apakah terdapat risiko potensial terhadap kepatuhan kovenan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Dalam konteks ini, pengujian atas pengendalian internal juga menjadi penting. Auditor harus menilai efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan dalam proses pencatatan dan pelaporan utang. Ini termasuk pengendalian terkait persetujuan dan dokumentasi perjanjian baru, serta mekanisme untuk memastikan bahwa semua perubahan dalam struktur utang dilaporkan secara tepat waktu dan akurat dalam sistem.

17.1.3 Identifikasi dan Pemeriksaan Agunan

Selain PSP di atas, auditor juga akan melaksanakan PSP proses identifikasi dan pemeriksaan agunan yang melibatkan pengiriman konfirmasi eksternal. Jika perusahaan melakukan

pinjaman ke bank, konfirmasi ini sudah termasuk dalam konfirmasi eksternal bank yang dikirimkan oleh auditor. Auditor akan meninjau bukti-bukti yang terkait dengan akun-akun yang melibatkan hak gadai, hak jaminan, derivatif, dan aset yang digunakan sebagai jaminan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Proses identifikasi dan pemeriksaan agunan dimulai dengan memperoleh daftar lengkap semua aset yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman perusahaan. Auditor akan mengkaji dokumentasi yang mendukung hak gadai atau jaminan tersebut, termasuk perjanjian pinjaman, sertifikat hak gadai, dan kontrak derivatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua jaminan yang diberikan telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi perusahaan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, auditor akan mengirimkan konfirmasi eksternal kepada pihak ketiga yang terkait, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, untuk memverifikasi keberadaan dan nilai dari aset yang digunakan sebagai jaminan. Konfirmasi ini mencakup permintaan informasi mengenai jumlah pinjaman yang terhutang, nilai jaminan, dan kondisi atau persyaratan lain yang terkait dengan jaminan tersebut. Informasi yang diperoleh dari konfirmasi eksternal ini akan dibandingkan dengan catatan internal perusahaan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap perbedaan yang mungkin ada.

Auditor juga akan mengevaluasi apakah pengungkapan yang sesuai tentang pinjaman dan jaminan telah tercantum dalam laporan keuangan. Ini termasuk memastikan bahwa

informasi mengenai jenis dan nilai jaminan, kondisi penggunaan jaminan, serta kewajiban terkait lainnya diungkapkan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Pengungkapan yang memadai sangat penting untuk memberikan gambaran yang transparan kepada pemangku kepentingan mengenai risiko dan kewajiban yang dihadapi perusahaan.

Selain itu, auditor akan memeriksa apakah perusahaan telah mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan penggunaan jaminan, seperti pemeliharaan nilai jaminan dan ketentuan terkait lainnya yang mungkin diatur dalam perjanjian pinjaman. Ini melibatkan pengujian terhadap pengendalian internal perusahaan yang dirancang untuk mengelola dan memantau jaminan, serta memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar ketentuan perjanjian yang dapat menimbulkan risiko tambahan.

17.1.4 Verifikasi Eksistensi, Valuasi, Kelengkapan, Pengungkapan dan Kewajiban

Verifikasi ini merupakan pelaksanaan prosedur substansif audit (PSP) yang lengkap mengenai utang jangka panjang dan angsuran yang dimiliki perusahaan. Auditor akan melakukan verifikasi terhadap lima aspek utama: eksistensi, valuasi, kelengkapan, pengungkapan, dan kewajiban. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai kewajiban jangka panjang yang dimilikinya.

Pertama, auditor akan memverifikasi eksistensi utang jangka panjang dan angsuran dengan melakukan konfirmasi

eksternal kepada kreditor dan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo utang yang tercatat dalam buku besar perusahaan benar-benar ada dan valid pada tanggal neraca. Auditor juga akan mengecek dokumen-dokumen pendukung seperti perjanjian pinjaman dan jadwal pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan sesuai dengan catatan perusahaan.

Kedua, valuasi utang jangka panjang akan diverifikasi untuk memastikan bahwa utang tersebut telah dicatat dengan nilai yang benar. Auditor akan menilai apakah perhitungan bunga, amortisasi, dan nilai tercatat utang telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti metode suku bunga efektif. Proses ini juga melibatkan penilaian terhadap kewajaran penilaian utang, termasuk identifikasi dan penilaian setiap perubahan dalam nilai wajar utang yang mungkin diperlukan.

Ketiga, auditor akan mengevaluasi kelengkapan pencatatan utang jangka panjang dan angsuran. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan catatan akuntansi dan dokumentasi terkait untuk memastikan bahwa semua utang yang ada telah dicatat dalam laporan keuangan. Auditor akan meninjau transaksi setelah tanggal neraca (*subsequent events*) untuk mengidentifikasi kewajiban yang mungkin belum dicatat pada akhir periode pelaporan.

Keempat, pengungkapan dalam laporan keuangan akan diperiksa untuk memastikan bahwa informasi yang relevan mengenai utang jangka panjang dan angsuran telah diungkapkan dengan benar dan memadai. Auditor akan menilai apakah pengungkapan tersebut sesuai dengan standar pelaporan

keuangan yang berlaku, termasuk rincian mengenai jadwal jatuh tempo, suku bunga, jaminan yang diberikan, dan setiap pembatasan atau kovenan yang terkait dengan utang tersebut.

Kelima, auditor akan memverifikasi kewajiban terkait utang jangka panjang dan angsuran. Ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, seperti batasan keuangan dan kovenan lainnya. Auditor akan memeriksa apakah perusahaan telah memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut dan menilai dampak dari setiap potensi pelanggaran terhadap posisi keuangan perusahaan.

**PSP pada Akun Derivatif, Hedging,
Komitmen & Kontinjensi**

Akun derivatif mencakup instrumen keuangan yang nilainya berasal dari nilai aset dasar, seperti saham, obligasi, komoditas, atau suku bunga. Instrumen derivatif termasuk kontrak berjangka, opsi, swaps, dan kontrak forward. Dalam laporan keuangan, derivatif diakui sebagai aset atau liabilitas di neraca dan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar derivatif biasanya dicatat dalam laporan laba rugi, kecuali jika derivatif tersebut memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai (*hedge accounting*).

Dalam kaidah akuntansi, pencatatan derivatif memerlukan pengungkapan yang rinci mengenai sifat dan risiko instrumen derivatif, tujuan penggunaannya, serta dampak keuangan dari perubahan nilai wajar (16). Standar akuntansi yang relevan, seperti IFRS 9 atau ASC 815 (FASB), mengatur secara spesifik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan derivatif.

Hedging atau lindung nilai adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keuangan akibat fluktuasi nilai wajar atau arus kas yang terkait dengan aset atau kewajiban yang mendasarinya. Akuntansi lindung nilai (*hedge accounting*) memperbolehkan perusahaan untuk mencocokkan pengakuan keuntungan dan kerugian dari instrumen lindung nilai dengan item yang dilindungi.

Ada beberapa jenis utama lindung nilai, yang pertama yaitu *Fair Value Hedge* (Lindung Nilai Nilai Wajar): Digunakan untuk melindungi nilai wajar aset atau kewajiban tertentu yang diakui dalam neraca. Selanjutnya adalah *Cash Flow Hedge* (Lindung Nilai Arus Kas): Digunakan untuk melindungi variabilitas arus kas masa depan yang dapat mempengaruhi laba

rugi. Terakhir adalah *Net Investment Hedge* (Lindung Nilai Investasi Neto): Digunakan untuk melindungi risiko investasi bersih dalam operasi asing. Dalam laporan keuangan, efektivitas lindung nilai harus dievaluasi secara berkala. Keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi diakui dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain (OCI) sesuai dengan jenis lindung nilai yang diterapkan.

Akun komitmen mencerminkan janji atau kewajiban perusahaan untuk melakukan transaksi atau pengeluaran tertentu di masa depan, yang belum diakui sebagai liabilitas dalam neraca. Komitmen sering kali terkait dengan kontrak pembelian atau penjualan, perjanjian sewa, atau proyek-proyek modal. Pengungkapan komitmen dalam laporan keuangan melibatkan deskripsi rinci tentang sifat komitmen, jumlah yang terikat, dan jangka waktu kontrak. Informasi ini biasanya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada pemangku kepentingan tentang kewajiban potensial perusahaan di masa depan.

Akun kontinjensi mencerminkan kejadian atau situasi yang bergantung pada hasil di masa depan yang tidak pasti. Kontinjensi dapat berupa liabilitas kontinjensi atau aset kontinjensi. Liabilitas Kontinjensi: Kewajiban yang mungkin timbul tergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan. Jika kemungkinan keluar sumber daya ekonomi tinggi dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal, maka liabilitas kontinjensi diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Jika tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan Aset Kontinjensi: Potensi aset yang mungkin timbul

dari peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika aliran manfaat ekonomi kemungkinan besar akan terjadi.

Dalam pelaporan keuangan, pengungkapan kontinjensi meliputi penjelasan sifat kontinjensi, perkiraan dampak keuangan, dan ketidakpastian yang terkait dengan penyelesaian kontinjensi tersebut. Secara keseluruhan, akun derivatif, hedging, komitmen, dan kontinjensi adalah elemen penting dalam laporan keuangan yang memerlukan pengungkapan dan pengukuran yang cermat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada pemangku kepentingan.

18.1. PSP dan Asersi pada Akun Derivatif, Hedging, Komitmen & Kontinjensi

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
S	Derivatif/Hedging/ Komitmen/Kontinjensi					
1	Verifikasi Keberadaan dan Kepemilikan	X		X	X	X
2	Tinjauan Rinci Notulen dan Bukti Lainnya			X	X	
3	Penyelidikan Kelengkapan Derivatif			X		
4	Identifikasi Derivatif Tersembunyi atau Tak Terduga			X		
5	Uji Nilai Wajar Derivatif		X			

6	Penyelidikan Kelengkapan Komitmen Penting			X	X	X
7	Identifikasi Kontinjensi Penting	X	X	X	X	X

18.1.1. Verifikasi Keberadaan dan Kepemilikan

Verifikasi keberadaan dan kepemilikan pada akun derivatif, hedging, komitmen, dan kontinjensi adalah langkah penting dalam audit laporan keuangan untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen ini benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan yang dilaporkan. Auditor menjalankan prosedur ini melalui langkah-langkah terstruktur yang melibatkan konfirmasi eksternal, inspeksi dokumen, dan pengujian pengendalian internal.

Pertama, auditor mengirimkan konfirmasi eksternal kepada pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan yang menjadi counterparty dalam transaksi derivatif dan hedging. Konfirmasi ini bertujuan untuk memverifikasi saldo dan ketentuan instrumen derivatif, seperti nilai wajar, jatuh tempo, dan kondisi kontrak lainnya. Untuk komitmen dan kontinjensi, konfirmasi eksternal dikirimkan kepada pihak terkait seperti kontraktor, pemasok, atau penasihat hukum. Konfirmasi ini digunakan untuk memverifikasi eksistensi dan kondisi kontrak atau perjanjian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Selanjutnya, auditor memeriksa dokumentasi terkait transaksi derivatif dan hedging, termasuk kontrak, laporan konfirmasi dari counterparty, dan laporan nilai wajar. Dokumen-dokumen ini diperiksa untuk memastikan bahwa semua instrumen derivatif yang dilaporkan benar-benar ada dan sesuai

dengan catatan akuntansi. Untuk komitmen dan kontinjensi, auditor memeriksa perjanjian kontrak, surat perjanjian, dan komunikasi dengan pihak ketiga untuk memverifikasi keberadaan komitmen dan kontinjensi serta memastikan bahwa informasi yang dilaporkan mencerminkan kondisi aktual yang ada.

Pengujian pengendalian internal perusahaan terkait pengelolaan dan pelaporan instrumen derivatif, hedging, komitmen, dan kontinjensi juga dilakukan oleh auditor. Ini melibatkan penilaian terhadap prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencatat, memantau, dan melaporkan transaksi dan kewajiban tersebut. Pengujian pengendalian internal mencakup pemeriksaan terhadap sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan akurat dan dapat diandalkan.

Auditor juga melakukan rekonsiliasi antara catatan internal perusahaan dan konfirmasi eksternal untuk memastikan konsistensi data. Setiap perbedaan yang ditemukan selama rekonsiliasi harus diselidiki dan diselesaikan. Selain itu, auditor melakukan analisis substantif terhadap transaksi dan saldo yang dilaporkan, termasuk pengujian terhadap penilaian kewajiban nilai wajar instrumen derivatif, evaluasi efektivitas strategi hedging, serta penilaian terhadap materialitas dan dampak keuangan dari komitmen dan kontinjensi yang ada.

Terakhir, auditor memastikan bahwa pengungkapan yang memadai dan sesuai standar akuntansi diterapkan dalam laporan keuangan. Ini mencakup informasi mengenai jenis, nilai, risiko, dan dampak keuangan dari derivatif, hedging, komitmen, dan kontinjensi. Pengungkapan ini penting untuk memberikan gambaran yang transparan dan lengkap kepada para pemangku

kepentingan mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, serta risiko yang mungkin dihadapi.

18.1.2. Tinjauan Rinci Notulen dan Bukti Lainnya atas Derivatif, Hedging, Komitmen & Kontinjensi

Dalam menjalankan prosedur substansif pengujian (PSP) ini, auditor melaksanakan tinjauan rinci terhadap notulen rapat dan bukti lainnya terkait dengan instrumen keuangan seperti derivatif, hedging, komitmen, dan kontinjensi. Prosedur ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keputusan dan aktivitas yang terkait dengan instrumen-instrumen ini selama periode berjalan.

Pertama-tama, auditor akan melakukan inquiry dengan manajemen perusahaan untuk menanyakan apakah selama periode pelaporan, rapat-rapat telah dilakukan dan keputusan-keputusan telah diambil terkait dengan penggunaan atau manajemen instrumen keuangan tersebut. Inquiry ini bertujuan untuk memahami apakah manajemen telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap instrumen-instrumen tersebut, serta mengetahui apakah ada perubahan signifikan dalam kebijakan atau strategi perusahaan terkait dengan derivatif, hedging, komitmen, dan kontinjensi.

Selanjutnya, auditor akan melakukan tinjauan terhadap notulen rapat, memorandum, atau dokumen resmi lainnya yang dihasilkan dalam rapat-rapat tersebut. Tinjauan ini dilakukan untuk mencari informasi terperinci tentang diskusi dan keputusan yang dibuat oleh manajemen atau badan pengawas terkait dengan instrumen keuangan tersebut. Auditor akan mencari bukti bahwa manajemen telah mempertimbangkan

secara menyeluruh risiko-risiko yang terkait dengan instrumen-instrumen tersebut, serta strategi yang diambil untuk mengelola atau melindungi perusahaan dari risiko-risiko tersebut.

Prosedur ini juga mencakup pengecekan terhadap dokumen-dokumen lain yang mungkin menjadi bukti atau pendukung keputusan-keputusan tersebut. Ini bisa termasuk surat-surat, kontrak, laporan evaluasi risiko, atau dokumen lain yang relevan dengan penggunaan atau pengelolaan instrumen keuangan tersebut. Auditor akan menilai apakah dokumen-dokumen tersebut mencerminkan secara akurat kegiatan dan transaksi yang terkait dengan derivatif, hedging, komitmen, dan kontinjensi perusahaan.

Dengan menjalankan tinjauan rinci notulen dan bukti lainnya ini, auditor dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan dan pengelolaan instrumen keuangan oleh perusahaan. Ini memungkinkan auditor untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan secara tepat dan akurat pengungkapan atas instrumen-instrumen tersebut, serta memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait telah dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

18.1.3. Penyelidikan Kelengkapan Derivatif

Dalam proses pemeriksaan sistem pengendalian internal (PSP) terkait kelengkapan derivatif, auditor akan melaksanakan serangkaian prosedur yang sistematis dan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua transaksi derivatif yang relevan telah dicatat dan dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan. Langkah pertama yang dilakukan oleh auditor adalah mengecek

dan memverifikasi kelengkapan, kejelasan, dan keabsahan isi dokumen yang menjelaskan tentang kontrak, hak, dan kewajiban perusahaan atas derivatif tersebut. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi bahwa semua kontrak derivatif telah didokumentasikan dengan benar dan memuat informasi yang diperlukan, seperti tanggal kontrak, jumlah, harga, dan pihak lawan dalam transaksi.

Setelah memastikan kelengkapan dokumen, auditor akan melakukan verifikasi catatan transaksi. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen pendukung, seperti konfirmasi pihak ketiga dan rekonsiliasi dengan catatan akuntansi internal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi derivatif yang tercatat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan tidak ada transaksi yang terlewat atau dicatat secara tidak akurat. Auditor juga akan mengevaluasi apakah pencatatan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain verifikasi catatan, auditor akan melakukan pengujian substantif atas transaksi derivatif untuk menilai keakuratan dan kelengkapan pencatatan. Pengujian ini dapat mencakup analisis perbandingan data historis, penilaian kewajaran harga derivatif, dan pemeriksaan terhadap penyesuaian nilai wajar yang telah dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari pengujian substantif ini adalah untuk memastikan bahwa nilai derivatif yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya dan bahwa tidak ada manipulasi yang dilakukan untuk mengubah hasil keuangan perusahaan.

Selanjutnya, auditor juga akan melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan terkait pencatatan dan pelaporan transaksi derivatif. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kebijakan dan

prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan derivatif. Auditor akan menguji apakah kebijakan tersebut telah dijalankan dengan benar dan apakah ada mekanisme pengendalian yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keandalan sistem tersebut.

Melalui langkah-langkah verifikasi dokumen, pengujian catatan transaksi, pengujian substantif, dan evaluasi pengendalian internal, auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan transaksi derivatif secara lengkap dan akurat. Proses ini penting untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat diandalkan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk semua kewajiban dan aset yang terkait dengan instrumen derivatif.

18.1.4. Identifikasi Derivatif Tersembunyi atau Tak Terduga

Identifikasi derivatif tersembunyi atau tak terduga dan memiliki risiko berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dilakukan auditor dengan cara melaksanakan serangkaian prosedur yang komprehensif dan mendetail. Pertama, auditor harus melakukan penelaahan menyeluruh terhadap kontrak dan perjanjian yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini meliputi kontrak keuangan, perjanjian pembelian atau penjualan, serta kontrak lain yang mungkin mengandung komponen derivatif tersembunyi. Penelaahan ini bertujuan

untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat memenuhi definisi instrumen derivatif menurut standar akuntansi yang berlaku.

Auditor harus melakukan wawancara dengan manajemen dan pihak-pihak terkait di dalam perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai transaksi dan praktik keuangan perusahaan. Wawancara ini dapat mengungkapkan adanya derivatif tersembunyi yang tidak secara eksplisit tercatat dalam dokumen formal namun memiliki implikasi signifikan terhadap risiko dan eksposur keuangan perusahaan.

Auditor perlu memanfaatkan alat analisis keuangan dan model penilaian derivatif untuk mengevaluasi potensi risiko dan pengaruh derivatif tersebut terhadap laporan keuangan. Ini termasuk melakukan analisis sensitivitas dan skenario untuk memahami bagaimana perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi nilai derivatif dan, oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan.

Auditor juga harus memastikan bahwa semua derivatif yang diidentifikasi, baik yang tersembunyi maupun yang tak terduga, telah dicatat dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pengujian kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan yang relevan, seperti PSAK, IFRS atau GAAP, untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar dan transparan tentang posisi keuangan perusahaan.

Dengan menjalankan prosedur-prosedur ini, auditor dapat secara efektif mengidentifikasi dan menilai risiko yang ditimbulkan oleh derivatif tersembunyi atau tak terduga,

sehingga dapat memberikan jaminan yang memadai mengenai integritas dan akurasi laporan keuangan perusahaan.

18.1.5. Uji Nilai Wajar Derivatif

Auditor memiliki kewajiban untuk menguji keandalan saldo dari akun derivatif dengan pendekatan yang teliti dan sistematis. Proses ini melibatkan beberapa langkah kritis yang harus dilaksanakan secara cermat untuk memastikan bahwa nilai yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai wajar derivatif sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Auditor harus mengumpulkan dan meninjau seluruh data dan informasi yang relevan terkait dengan derivatif yang dimiliki oleh perusahaan. Ini termasuk kontrak derivatif, laporan penilaian, dan data pasar yang relevan. Informasi ini harus diverifikasi keakuratannya serta kelengkapannya untuk menjamin dasar yang kuat dalam proses evaluasi.

Selain itu, auditor juga perlu mempertimbangkan metodologi penilaian yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan nilai wajar derivatif. Metodologi ini harus sesuai dengan standar yang diakui dan konsisten dengan PSAK yang berlaku. Auditor harus mengevaluasi asumsi-asumsi dan input yang digunakan dalam model penilaian, termasuk suku bunga, volatilitas harga, dan data pasar lainnya, untuk memastikan bahwa metodologi tersebut menghasilkan estimasi nilai wajar yang andal.

Auditor harus melakukan pengujian independen terhadap hasil penilaian derivatif yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengujian ini dapat melibatkan penggunaan model penilaian alternatif atau referensi dari penilaian pihak ketiga yang independen untuk membandingkan hasilnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memvalidasi keakuratan dan kewajaran nilai yang dilaporkan oleh perusahaan.

Auditor harus memastikan bahwa nilai wajar derivatif yang telah diuji dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan PSAK telah tercatat dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Ini mencakup penilaian apakah pengungkapan telah memadai dan apakah dampak terhadap laporan keuangan telah disajikan dengan transparan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Dengan melaksanakan prosedur-prosedur ini, auditor dapat memberikan jaminan yang memadai mengenai keandalan saldo akun derivatif dan kesesuaian nilai wajarnya sesuai dengan aturan PSAK. Hal ini esensial untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan wajar tentang posisi keuangan perusahaan dan eksposur risiko terkait derivatif.

18.1.6. Penyelidikan Kelengkapan Komitmen Penting

PSP penyelidikan kelengkapan komitmen penting oleh auditor merupakan proses kritis untuk memastikan bahwa semua komitmen yang signifikan telah diidentifikasi dan diungkapkan secara benar dalam laporan keuangan. Auditor harus menjalankan beberapa langkah sistematis dan mendetail dalam prosedur ini.

Dalam proses ini, auditor mengumpulkan dan meninjau dokumentasi yang berkaitan dengan komitmen penting

perusahaan, seperti kontrak, perjanjian, surat perintah, dan dokumen hukum lainnya yang mengikat. Verifikasi terhadap keabsahan dan keakuratan dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua komitmen relevan telah dicatat.

Wawancara dengan manajemen dan pihak-pihak terkait dalam perusahaan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang komitmen penting yang ada. Wawancara ini bertujuan mengidentifikasi komitmen yang mungkin tidak terdokumentasi dengan baik tetapi memiliki dampak material terhadap posisi keuangan perusahaan.

Penelaahan notulen rapat dewan direksi, komite audit, dan rapat penting lainnya juga dilakukan untuk mengidentifikasi komitmen yang dibahas dalam forum-forum tersebut. Notulen rapat sering kali mengungkapkan komitmen strategis dan keputusan penting yang tidak selalu tercermin dalam dokumen formal lainnya.

Konfirmasi dengan pihak ketiga yang terkait dengan komitmen penting, seperti pemasok, pelanggan, dan pemberi pinjaman, merupakan langkah penting. Konfirmasi ini membantu memastikan bahwa semua komitmen telah diidentifikasi dan diverifikasi secara independen, penting untuk mendeteksi komitmen yang mungkin tidak terungkap oleh manajemen.

Terakhir, auditor menilai apakah komitmen penting yang telah diidentifikasi dan diverifikasi telah diungkapkan secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengungkapan yang memadai harus memberikan gambaran transparan mengenai komitmen dan risiko terkait.

18.1.7. Identifikasi Kontinjensi Penting

Setelah menyelidiki dokumen-dokumen kontinjensi, baik yang sudah dilaporkan di laporan keuangan maupun yang masih tersembunyi, auditor akan memilah dan mengidentifikasi kontinjensi penting sehingga seluruh risiko dan kewajiban potensial dapat diungkapkan dengan tepat dan transparan dalam laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan mendapatkan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan dan potensi dampak keuangan di masa depan.

Auditor memulai dengan penelaahan mendalam terhadap dokumen-dokumen kontinjensi yang ada, termasuk kontrak, perjanjian, surat perintah, dan korespondensi hukum. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua bentuk kewajiban potensial yang mungkin timbul di masa depan. Selanjutnya, auditor melakukan wawancara dengan manajemen dan departemen terkait di dalam perusahaan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai potensi kontinjensi yang belum terdokumentasi dengan baik. Wawancara ini membantu mengungkapkan kewajiban potensial yang tidak selalu tercermin dalam dokumen resmi tetapi dapat memiliki dampak material.

Selain itu, auditor menelaah notulen rapat dewan direksi, komite audit, dan rapat penting lainnya untuk mengidentifikasi kontinjensi yang mungkin dibahas namun tidak tercatat dalam dokumen formal. Notulen rapat sering kali mengandung diskusi tentang keputusan strategis dan risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk memperkuat temuan, auditor mengirimkan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terlibat, seperti pemasok, pelanggan, dan penasihat hukum eksternal. Konfirmasi ini bertujuan untuk memverifikasi keberadaan dan besaran kontinjensi yang

mungkin tidak diungkapkan oleh manajemen, sehingga memberikan perspektif independen mengenai kewajiban potensial perusahaan.

Setelah mengidentifikasi semua kontinjensi penting, auditor melakukan penilaian terhadap dampak keuangan dari masing-masing kontinjensi. Penilaian ini melibatkan analisis mendalam untuk memastikan bahwa setiap kontinjensi yang material telah diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti PSAK atau IFRS. Dengan demikian, auditor dapat memberikan jaminan bahwa seluruh risiko dan kewajiban potensial telah diperhitungkan dan dilaporkan dengan transparan dan akurat, yang esensial bagi kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap integritas dan keandalan informasi keuangan perusahaan.

PSP pada Akun-Akun Ekuitas

Dalam laporan posisi keuangan, bagian ekuitas biasanya mencakup berbagai akun seperti modal saham (modal dasar), tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Masing-masing akun dalam bagian ekuitas ini memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda.

Modal saham (modal dasar) mengacu pada jumlah saham yang diotorisasi oleh perusahaan untuk diterbitkan kepada pemegang saham, yang merupakan bagian dari struktur modal awal perusahaan. Tambahan modal disetor merupakan selisih antara harga jual saham di atas nilai nominalnya, yang mencerminkan tambahan investasi dari pemegang saham di luar modal dasar. Laba ditahan, di sisi lain, merupakan akumulasi laba bersih yang telah diperoleh perusahaan dan tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk mendukung pertumbuhan dan operasional masa depan.

Akun-akun dalam bagian ekuitas ini didukung oleh beberapa dokumen inti yang esensial untuk validitas dan keabsahan transaksi ekuitas. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. **Akta Pendirian Perusahaan** adalah dokumen legal yang mencantumkan pendirian perusahaan, berisi informasi penting mengenai modal dasar, struktur kepemilikan, dan ketentuan lainnya yang mengatur modal saham. Akta ini merupakan fondasi hukum bagi eksistensi perusahaan dan menjadi acuan utama dalam setiap transaksi terkait ekuitas.

2. **Dokumen Adendum atas Akta** adalah perubahan atau penambahan terhadap akta pendirian perusahaan. Adendum ini mungkin mencakup peningkatan modal dasar, perubahan struktur kepemilikan, atau perubahan penting lainnya dalam aspek legal dan keuangan perusahaan. Setiap perubahan yang signifikan dalam struktur modal atau ketentuan lain harus didokumentasikan dengan adendum yang sah.
3. ***Minutes of Meeting* (Notulen) dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah catatan resmi dari pertemuan tahunan atau luar biasa pemegang saham. Dokumen ini mendokumentasikan keputusan-keputusan penting terkait ekuitas, seperti penerbitan saham baru, pembagian dividen, atau perubahan dalam struktur modal perusahaan. *Minutes of Meeting* ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan dan keputusan terkait ekuitas dilakukan sesuai dengan persetujuan pemegang saham dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk keputusan mengenai dividen.

Dokumen-dokumen pendukung ini sangat penting untuk memastikan integritas dan akurasi dari akun-akun ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Mereka menyediakan bukti yang diperlukan untuk verifikasi dan audit, serta memastikan bahwa semua transaksi ekuitas dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, keberadaan dan kelengkapan dokumen-dokumen ini juga memainkan peran krusial dalam pengawasan dan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham dan pihak-pihak

berkepentingan lainnya. Melalui dokumentasi yang lengkap dan akurat, perusahaan dapat menjaga transparansi dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

19.1. PSP dan Asersi pada Akun Derivatif, Hedging, Komitmen & Kontinjensi

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan				
		E	V	C	R	P
T	Ekuitas					
1	Skedul Rekonsiliasi Ekuitas			X	X	X
2	Notulen atas Transaksi Ekuitas			X		X
3	Penyelidikan atas Perjanjian Opsi Saham	X	X	X		
4	Kesesuaian Pembayaran Dividen			X		

19.1.1 Pemeriksaan Akta Perusahaan dan Skedul Rekonsiliasi Ekuitas

Dalam konteks pemeriksaan akun-akun ekuitas, auditor menjalankan serangkaian prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan dan memverifikasi dokumen-dokumen yang relevan. Prosedur ini mencakup pemeriksaan akta pendirian perusahaan, laporan saham, dan laporan laba ditahan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan mencerminkan situasi sebenarnya dari posisi ekuitas perusahaan.

Auditor memulai dengan mengidentifikasi akun buku besar yang terkait dengan ekuitas. Hal ini mencakup pemetaan semua entri yang mempengaruhi saldo ekuitas, baik itu melalui

modal saham, tambahan modal disetor, maupun laba ditahan. Auditor kemudian menguji laporan perubahan ekuitas dengan membandingkan saldo dari akhir periode sebelumnya dengan saldo akhir periode saat ini. Proses ini melibatkan penelusuran setiap perubahan yang terjadi sepanjang periode, serta pemeriksaan bukti pendukung untuk setiap transaksi yang mempengaruhi ekuitas.

Selanjutnya, auditor melakukan verifikasi atas kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan perubahan ekuitas. Ini mencakup pemeriksaan apakah distribusi laba, pengurangan, atau peningkatan ekuitas telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan apakah kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten. Auditor juga menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, mengingat bahwa distribusi laba dan perubahan ekuitas lainnya sering kali memiliki implikasi pajak yang signifikan.

Untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang dilaporkan, auditor mengirimkan surat konfirmasi eksternal kepada pemegang saham. Surat ini meminta konfirmasi atas jumlah dan persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham pada tanggal tertentu. Konfirmasi ini berfungsi sebagai bukti independen yang mendukung keberadaan dan kepemilikan saham seperti yang dilaporkan dalam catatan keuangan perusahaan.

Selain itu, auditor juga memeriksa akta pendirian perusahaan dan setiap adendum terkait yang mungkin mencakup perubahan dalam struktur modal atau ketentuan lainnya yang mempengaruhi ekuitas. Dokumen-dokumen ini penting untuk memverifikasi bahwa semua transaksi ekuitas telah disetujui secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Skedul rekonsiliasi ekuitas disiapkan oleh auditor untuk merinci perubahan-perubahan dalam akun ekuitas selama periode yang diaudit. Skedul ini mencakup rincian mengenai penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, distribusi dividen, dan perubahan lainnya. Dengan menyusun skedul ini, auditor dapat memastikan bahwa semua perubahan telah dicatat dengan benar dan bahwa saldo akhir akun ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan catatan yang ada.

19.1.2 Pemeriksaan Notulen atas Transaksi Ekuitas

Sepanjang tahun berjalan, perusahaan umumnya mengadakan satu atau lebih Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan arah strategis perusahaan dan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi bagian ekuitas dalam laporan keuangan. Notulen RUPS memainkan peran krusial dalam mendokumentasikan semua keputusan yang diambil selama rapat tersebut, dan oleh karena itu, merupakan sumber utama yang harus diperiksa oleh auditor dalam rangka mengaudit transaksi ekuitas.

Auditor harus memulai dengan mengumpulkan dan menelaah semua notulen RUPS yang relevan sepanjang periode audit. Notulen ini harus mencakup catatan rinci tentang setiap keputusan yang diambil mengenai penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, distribusi dividen, dan perubahan lain dalam struktur ekuitas perusahaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi ekuitas telah disetujui secara resmi oleh pemegang saham dan telah dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Dalam proses pemeriksaan, auditor harus memastikan bahwa notulen tersebut mencantumkan informasi yang lengkap dan akurat tentang setiap keputusan yang diambil. Ini termasuk tanggal rapat, daftar hadir pemegang saham atau wakil yang sah, agenda yang dibahas, dan hasil pemungutan suara untuk setiap keputusan. Keberadaan dan keabsahan notulen RUPS adalah bukti penting yang mendukung transaksi ekuitas yang dicatat dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, auditor perlu memverifikasi bahwa semua keputusan yang diambil dalam RUPS telah diterapkan dan dicatat dengan benar dalam catatan keuangan perusahaan. Misalnya, jika RUPS memutuskan untuk menerbitkan saham baru, auditor harus memastikan bahwa penerbitan saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan keputusan dan bahwa saham tersebut telah dicatat dengan benar dalam akun modal saham dan tambahan modal disetor. Demikian pula, jika RUPS memutuskan untuk membagikan dividen, auditor harus memastikan bahwa pembayaran dividen telah dilakukan sesuai dengan keputusan dan dicatat dengan benar dalam akun laba ditahan.

Auditor juga harus memastikan bahwa semua keputusan yang mempengaruhi ekuitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada keputusan yang melanggar hukum atau ketentuan internal perusahaan, yang dapat berpotensi merugikan pemegang saham atau pihak berkepentingan lainnya.

Untuk mendukung pemeriksaan ini, auditor dapat melakukan prosedur tambahan seperti konfirmasi tertulis dengan pihak terkait, termasuk pemegang saham dan anggota dewan

direksi, untuk memastikan keabsahan dan penerapan keputusan RUPS. Auditor juga dapat menelusuri catatan keuangan dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan konsistensi antara keputusan yang dicatat dalam notulen RUPS dan transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Skedul rekonsiliasi ekuitas disiapkan oleh auditor untuk merinci perubahan-perubahan dalam akun ekuitas selama periode yang diaudit. Skedul ini mencakup rincian mengenai penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, distribusi dividen, dan perubahan lainnya. Dengan menyusun skedul ini, auditor dapat memastikan bahwa semua perubahan telah dicatat dengan benar dan bahwa saldo akhir akun ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan catatan yang ada.

19.1.3 Penyelidikan atas Perjanjian Opsi Saham

Auditor juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penelaahan atas perjanjian opsi saham yang dimiliki oleh perusahaan. Perjanjian opsi saham merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak kepada penerima opsi untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian ini sering digunakan sebagai bagian dari paket kompensasi bagi karyawan, eksekutif, atau pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan insentif dan menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemegang saham.

Dalam penyelidikan atas perjanjian opsi saham, auditor harus memulai dengan mengumpulkan semua dokumen perjanjian opsi saham yang ada. Bentuk perjanjian opsi saham ini biasanya berisi informasi rinci tentang jumlah opsi yang

diberikan, harga pelaksanaan (*exercise price*), tanggal pemberian (*grant date*), tanggal kedaluwarsa (*expiration date*), serta syarat dan ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan opsi tersebut. Auditor harus memverifikasi bahwa semua perjanjian telah disetujui oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan kebijakan kompensasi perusahaan.

Selanjutnya, auditor harus memastikan bahwa perjanjian opsi saham dicatat dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan. Ini mencakup penilaian apakah perusahaan telah menghitung biaya kompensasi terkait opsi saham sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS 2: *Share-based Payment* atau PSAK 53: *Pembayaran Berbasis Saham*. Auditor harus memverifikasi metode penilaian yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar opsi saham pada tanggal pemberian, yang biasanya melibatkan model penilaian opsi seperti *Black-Scholes* atau model binomial (17).

Auditor juga perlu menelusuri transaksi opsi saham yang telah dilaksanakan selama periode audit. Ini mencakup verifikasi apakah penerima opsi telah melaksanakan hak mereka untuk membeli saham pada harga pelaksanaan yang ditentukan dan apakah perusahaan telah mencatat penerimaan kas dan perubahan dalam ekuitas dengan benar. Auditor harus memastikan bahwa jumlah saham yang diterbitkan sesuai dengan jumlah opsi yang dilaksanakan dan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

Selain itu, auditor harus menilai pengungkapan terkait perjanjian opsi saham dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini harus mencakup informasi tentang jumlah opsi yang beredar, harga pelaksanaan rata-rata, tanggal kedaluwarsa, serta informasi lain yang relevan untuk

memberikan gambaran yang jelas kepada pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lainnya tentang potensi dilusi dan dampak finansial dari perjanjian opsi saham.

Untuk mendukung penyelidikan ini, auditor dapat melakukan konfirmasi tertulis dengan penerima opsi saham dan melakukan penelusuran terhadap dokumentasi internal perusahaan yang terkait dengan pemberian dan pelaksanaan opsi saham. Auditor juga harus memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan dan pelaporan opsi saham.

19.1.4 Kesesuaian Pembayaran Dividen

Auditor memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perpajakan, dan kebijakan internal perusahaan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dan dokumen tertulis yang relevan, termasuk notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan notulen rapat Direksi terkait. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa semua pembayaran dividen telah mendapatkan persetujuan yang sah dari otoritas perusahaan yang berwenang.

Auditor akan meninjau notulen RUPS untuk memastikan bahwa keputusan untuk membagikan dividen telah disetujui oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notulen ini harus mencatat secara rinci jumlah dividen yang akan dibayarkan, tanggal pembayaran, serta prosedur yang harus diikuti untuk pengumuman dan distribusi

dividen. Selain itu, auditor juga akan memeriksa notulen rapat Direksi untuk memastikan bahwa keputusan operasional terkait pembayaran dividen telah disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari RUPS.

Selanjutnya, auditor akan memeriksa apakah pengumuman dividen telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengumuman dividen biasanya mencakup informasi penting seperti tanggal pencatatan (*record date*), tanggal pembayaran (*payment date*), dan jumlah dividen per saham. Auditor perlu memastikan bahwa pengumuman ini telah disampaikan kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya dalam waktu yang tepat dan melalui saluran komunikasi yang sesuai.

Dalam proses pemeriksaan ini, auditor juga harus memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan terkait dengan pembayaran dividen. Ini mencakup verifikasi bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan pajak yang diperlukan dan melaporkan serta membayar pajak tersebut kepada otoritas pajak dengan benar. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sangat penting untuk menghindari sanksi atau penalti dari otoritas pajak.

Tak jarang, pemeriksaan pembayaran dividen ini menghasilkan temuan bahwa perusahaan tidak melakukan pengakuan beban akrual atas dividen yang telah diumumkan tetapi belum dibayar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan, khususnya dalam mencatat kewajiban yang harus dibayar pada periode berjalan. Auditor harus memastikan bahwa semua beban akrual terkait dividen telah diakui dan dicatat dengan benar pada laporan keuangan perusahaan pada setiap akhir periode.

Jika ditemukan bahwa beban akrual dividen belum diakui dengan benar, auditor harus memberikan rekomendasi kepada klien untuk memperbaiki catatan keuangan mereka. Klien harus memastikan bahwa setiap keputusan pembagian dividen diikuti dengan pencatatan yang tepat dari kewajiban yang timbul, sehingga laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang akurat dan transparan.

PSP pada Akun Pendapatan/Penjualan

Pendapatan atau penjualan adalah salah satu akun yang paling penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan arus masuk utama perusahaan dan merupakan indikator utama dari kinerja keuangan suatu entitas. Kualitas pelaporan pendapatan sangat mempengaruhi persepsi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kesehatan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keakuratan, kejujuran, dan transparansi dalam pelaporan pendapatan sangatlah vital.

Berkaca pada kasus dan skandal akuntansi maupun audit di sepanjang sejarah, akun pendapatan adalah salah satu yang paling rentan untuk disalahlaporkan, baik itu sengaja maupun tidak. Praktik-praktik yang tidak etis, seperti pengakuan pendapatan yang tidak pantas atau manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kinerja yang buruk, telah menjadi penyebab dari banyak skandal korporat yang terkenal. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan audit yang cermat atas akun pendapatan menjadi sangat penting.

Dalam menjalankan prosedur auditnya, auditor dalam mengaudit akun pendapatan harus melakukan pemahaman yang mendalam terhadap aktivitas operasional dan model bisnis perusahaan. Auditor harus memahami sumber pendapatan, proses penjualan, dan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan. Pemahaman ini memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam pelaporan pendapatan dan merancang prosedur audit yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut.

Auditor juga harus memberikan perhatian yang ekstra terhadap bukti pendukung yang berkaitan dengan pendapatan, seperti kontrak penjualan, faktur, pembukuan penjualan, dan dokumentasi lainnya. Auditor perlu memverifikasi bahwa transaksi penjualan yang dilaporkan telah terjadi secara nyata, telah dipenuhi persyaratan penjualan yang relevan, dan bahwa pendapatan yang diakui telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti pendukung ini membantu menjamin keandalan dan integritas pelaporan pendapatan.

Selain itu, auditor harus melakukan pengujian substantif yang cukup untuk menguji kebenaran dan kecukupan pendapatan yang dilaporkan. Pengujian ini mencakup verifikasi atas jumlah, waktu, dan ketepatan pengakuan pendapatan, serta penilaian terhadap estimasi yang digunakan dalam mengukur pendapatan. Auditor harus memastikan bahwa semua pengakuan pendapatan telah didukung oleh bukti yang memadai dan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Dengan melakukan pendekatan audit yang komprehensif dan hati-hati terhadap akun pendapatan, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan kinerja operasional yang akurat. Audit yang teliti terhadap akun pendapatan membantu mencegah kesalahan dan penyalahgunaan dalam pelaporan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan keandalan informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan.

20.1. PSP dan Asersi pada Akun Pendapatan/Penjualan

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
1	Tinjauan Analitis Keseluruhan untuk Akun Laporan Laba Rugi yang Signifikan	X		X	X
2	Prosedur Pengakuan Pendapatan	X	X	X	

20.1.1 Tinjauan Analitis Pendapatan Keseluruhan

Dalam praktik audit, tinjauan analitis terhadap pendapatan keseluruhan merupakan suatu proses yang esensial untuk menilai kecukupan, keakuratan, dan keberadaan potensi kecurangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Prosedur ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang tercatat mencerminkan kinerja sebenarnya dari periode yang bersangkutan, serta untuk mengidentifikasi perubahan yang tidak wajar yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Secara umum, auditor akan menggunakan beberapa metode dalam tinjauan analitis pendapatan, termasuk perbandingan pendapatan dari periode yang sedang diaudit dengan periode-periode sebelumnya, serta dengan pendapatan rata-rata dari beberapa tahun terakhir. Selain itu, analisis tren pendapatan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan positif atau negatif yang mungkin memerlukan perhatian khusus.

Selama proses ini, auditor tidak hanya memeriksa angka-angka secara kasar, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pendapatan,

seperti persaingan pasar, harga produk, dan volume penjualan. Selain itu, auditor juga harus memperhitungkan risiko bahwa kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan pendapatan dapat berdampak secara material terhadap laporan keuangan.

Evaluasi risiko kesalahan materiil dalam pencatatan pendapatan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sistematis. Auditor melakukan berbagai prosedur, termasuk pengujian substantif dan analitis, untuk mengumpulkan bukti yang memadai guna mendukung keakuratan jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

20.1.2 Prosedur Pengakuan Pendapatan

Dalam konteks prosedur pengakuan pendapatan, auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua akun pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang menetapkan langkah-langkah spesifik untuk pengakuan pendapatan.

Prosedur ini melibatkan serangkaian langkah yang teliti dan sistematis oleh auditor. Pertama, auditor akan memastikan bahwa setiap akun pendapatan yang terdaftar dalam laporan keuangan telah diakui sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam PSAK 72. Langkah-langkah pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK 72 mencakup pengidentifikasian kontrak dengan pelanggan, pengidentifikasian kewajiban-kewajiban kinerja dalam kontrak tersebut, menentukan harga transaksi, alokasi harga transaksi ke kewajiban kinerja, dan pengakuan pendapatan saat kewajiban kinerja terpenuhi (18).

Auditor juga akan melakukan pengujian sampel terhadap aktivitas pendapatan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Salah satu aspek yang diperiksa adalah bahwa pendapatan hanya dicatat setelah terjadi realisasi ekonomi, yang berarti bahwa pendapatan harus terkait dengan suatu transaksi yang telah menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Selain itu, auditor akan memverifikasi bahwa pendapatan yang dicatat didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan relevan dengan transaksi yang terkait.

Pengujian sampel atas aktivitas pendapatan ini mencakup pengujian terhadap sejumlah transaksi yang dipilih secara acak untuk memastikan bahwa prosedur pengakuan pendapatan telah dilaksanakan dengan benar. Auditor akan memeriksa dokumentasi yang mendukung setiap transaksi yang terkait dengan pendapatan, seperti faktur penjualan, kontrak dengan pelanggan, dan bukti pembayaran.

Dengan melakukan prosedur ini, auditor dapat memastikan bahwa akun pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan telah diakui secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memberikan keyakinan bahwa pendapatan yang tercatat memang mencerminkan aktivitas sebenarnya dari periode yang bersangkutan.

PSP pada Akun Pendapatan Lainnya

Pendapatan/penjualan dan pendapatan lainnya umumnya dipisahkan menjadi akun berbeda di laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang jelas tentang sumber dan jenis pendapatan yang diperoleh oleh entitas tersebut.

Pemisahan pendapatan atau penjualan dari pendapatan lainnya adalah praktik standar yang memungkinkan pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator, untuk memahami komposisi pendapatan secara lebih rinci. Dengan demikian, akun pendapatan atau penjualan memberikan gambaran tentang pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama entitas, seperti penjualan produk atau layanan yang ditawarkan.

Di sisi lain, pendapatan lainnya merujuk pada sumber pendapatan tambahan yang berasal dari aktivitas non-operasional atau transaksi khusus yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama entitas. Ini bisa mencakup pendapatan dari investasi, pendapatan bunga, pendapatan sewa, atau pendapatan lain yang berasal dari aktivitas di luar bisnis pokok entitas.

Dengan memisahkan pendapatan atau penjualan dari pendapatan lainnya, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sumber dan aliran pendapatan yang mempengaruhi kinerja finansial entitas. Ini membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan analitis terkait dengan kinerja dan potensi pertumbuhan entitas.

Selain itu, pemisahan ini juga memungkinkan auditor dan regulator untuk melakukan analisis yang lebih mendalam

terhadap sifat dan karakteristik pendapatan yang dilaporkan, serta memverifikasi kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Ini penting dalam memastikan transparansi dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu, pemisahan antara pendapatan atau penjualan dan pendapatan lainnya dalam laporan keuangan adalah suatu praktik yang penting dan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja finansial suatu entitas serta untuk memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

Dalam praktik audit, pendapatan lainnya menjadi fokus penting bagi auditor dalam mengevaluasi keabsahan dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas. Pendapatan lainnya sering kali mencakup transaksi atau kegiatan yang tidak termasuk dalam pendapatan utama atau penjualan produk atau layanan. Oleh karena itu, pendapatan ini memerlukan perhatian khusus dari auditor untuk memastikan bahwa pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan entitas.

Sebagai bagian dari proses audit, auditor harus memastikan bahwa pendapatan lainnya yang dilaporkan dalam laporan keuangan telah dicatat dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Ini mencakup verifikasi kebenaran dan keakuratan jumlah pendapatan yang dilaporkan serta penilaian terhadap transaksi atau kegiatan yang melibatkan pendapatan tersebut. Auditor juga harus memastikan bahwa pendapatan lainnya telah diungkapkan secara lengkap dan jelas

dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami sumber dan jenis pendapatan yang dimaksud.

Selain itu, auditor juga perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan pendapatan lainnya. Hal ini termasuk risiko atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, risiko atas kelalaian atau manipulasi dalam pencatatan transaksi, serta risiko atas ketidakpastian atau kompleksitas dalam pengakuan pendapatan tersebut. Dengan memahami risiko-risiko ini, auditor dapat merancang prosedur audit yang tepat untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau penyelewengan, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat kondisi keuangan entitas pada periode yang bersangkutan.

21.1. PSP dan Asersi pada Akun Pendapatan Lainnya

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
UB	Pendapatan Lainnya				
1	Tinjauan dan analisis konten	X	X	X	X

21.1.1 Tinjauan dan analisis konten

Tinjauan dan analisis konten merupakan prosedur substansi yang sering dilakukan oleh auditor dalam rangka audit atas akun pendapatan lainnya. Prosedur ini merangkum langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis isi serta detail transaksi yang terkait dengan pendapatan lainnya. Dalam praktiknya, tinjauan dan analisis konten melibatkan beberapa langkah yang penting.

Pertama, auditor akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pendapatan lainnya. Ini termasuk faktur penjualan, kontrak dengan pelanggan, bukti pembayaran, dan catatan lain yang mendukung transaksi-transaksi tersebut. Auditor perlu memastikan keberadaan dan keakuratan dokumen-dokumen ini untuk mendukung jumlah pendapatan yang dilaporkan.

Selanjutnya, auditor akan melakukan analisis yang mendalam terhadap isi dokumen-dokumen tersebut. Hal ini melibatkan identifikasi pola atau tren yang mungkin terdapat dalam transaksi pendapatan, serta penilaian terhadap kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh entitas dalam mengelola pendapatan tersebut.

Selain itu, auditor juga akan memeriksa kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang terdapat dalam dokumen pendukung dengan informasi yang dilaporkan dalam sistem akuntansi entitas. Hal ini dapat mencakup pencarian kesenjangan antara jumlah yang tercatat dalam faktur dengan jumlah yang tercatat dalam buku-buku akuntansi entitas.

Selanjutnya, auditor akan memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan lainnya. Auditor perlu memastikan bahwa entitas telah mengikuti standar akuntansi yang relevan dalam melaporkan pendapatan lainnya dalam laporan keuangan.

Terakhir, auditor akan menyusun kesimpulan atas hasil tinjauan dan analisis konten ini. Hal ini meliputi penilaian atas keandalan informasi pendapatan yang dilaporkan, identifikasi

potensi masalah atau ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, serta rekomendasi untuk perbaikan atau perbaikan proses yang relevan.

Secara keseluruhan, tinjauan dan analisis konten merupakan prosedur yang esensial dalam PSP audit atas pendapatan lainnya, yang memungkinkan auditor untuk memahami dengan lebih baik sifat dan karakteristik transaksi pendapatan serta untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

PSP pada Akun Pendapatan Keuangan

Instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan seringkali menjadi komponen penting dalam portofolio investasi mereka. Jenis instrumen keuangan yang dimiliki dapat bervariasi, mulai dari saham, obligasi, reksa dana, hingga derivatif keuangan. Sebagai bagian dari strategi investasi perusahaan, instrumen-instrumen keuangan ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan tambahan yang signifikan bagi perusahaan.

Dalam banyak kasus, instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan menghasilkan pendapatan yang cukup material yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja finansial mereka. Pendapatan yang dihasilkan dari instrumen keuangan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti dividen dari saham, bunga dari obligasi, atau keuntungan dari transaksi jual beli instrumen keuangan.

Penting untuk dicatat bahwa pendapatan yang diperoleh dari instrumen keuangan ini tidak hanya memengaruhi pos pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan finansial keseluruhan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memberikan perhatian khusus pada instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan selama proses audit.

Prosedur audit yang dilakukan terhadap instrumen keuangan termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung, evaluasi atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, serta analisis terhadap risiko-risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Auditor juga harus memastikan bahwa pengakuan pendapatan dari instrumen keuangan telah

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bahwa pengungkapan terkait telah dilakukan secara lengkap dan jelas dalam laporan keuangan.

Dengan memahami peran dan signifikansi instrumen keuangan dalam struktur keuangan perusahaan, auditor dapat memberikan penilaian yang akurat terhadap kinerja finansial perusahaan serta membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan instrumen keuangan tersebut.

Dalam konteks audit, auditor memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan yang cermat terhadap pendapatan yang dihasilkan dari instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah ini melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung, seperti laporan investasi, catatan transaksi, dan pernyataan nilai portofolio. Auditor perlu memastikan bahwa pendapatan yang dilaporkan berasal dari instrumen keuangan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Selain itu, auditor juga akan melakukan pengujian terhadap nilai investasi dari instrumen keuangan tersebut. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap perubahan nilai pasar atau nilai wajar dari investasi seiring waktu. Auditor akan membandingkan nilai investasi saat ini dengan nilai investasi sebelumnya untuk mengetahui apakah terdapat perubahan signifikan yang perlu diperhatikan. Pengujian ini bertujuan untuk menilai keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan.

Selama proses audit, auditor juga akan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi nilai investasi, seperti kondisi pasar keuangan, perubahan regulasi, atau

peristiwa ekonomi yang signifikan. Auditor perlu memahami konteks di mana instrumen keuangan tersebut beroperasi dan mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang mungkin mempengaruhi nilai investasi.

22.1. PSP dan Asersi pada Akun Pendapatan Keuangan

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
UC	Pendapatan Keuangan				
1	Pendapatan Bunga dan Dividen	X	X	X	X
2	Perubahan Nilai Investasi		X		X

22.1.1 Tinjauan Pendapatan Bunga dan Dividen

Dalam tahap Tinjauan Pendapatan Bunga dan Dividen, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi pencatatan pendapatan yang berasal dari instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, terutama jika instrumen tersebut berbentuk obligasi atau saham. Pada umumnya, pendapatan yang diperoleh dari instrumen keuangan tersebut berupa bunga dari obligasi atau dividen dari saham.

Auditor akan memulai prosesnya dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen pendukung, seperti perjanjian obligasi atau catatan transaksi dividen, untuk memastikan keakuratan pencatatan pendapatan tersebut. Hal ini melibatkan penelitian terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam instrumen keuangan, seperti tingkat bunga atau dividen yang dijanjikan, tanggal pembayaran, dan prosedur pembayaran yang berlaku.

Selanjutnya, auditor akan menguji keakuratan pencatatan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup verifikasi bahwa pendapatan bunga atau dividen yang tercatat telah dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam instrumen keuangan. Auditor juga akan memastikan bahwa tanggal pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan tanggal pengakuan pendapatan yang diatur dalam standar akuntansi yang berlaku.

22.1.2 Tinjauan Perubahan Nilai Investasi

Dalam tahap Tinjauan Perubahan Nilai Investasi, auditor memiliki tugas untuk menguji dan mengevaluasi perubahan nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Auditor akan membandingkan nilai investasi yang tercatat dalam laporan keuangan dengan harga pasar saat ini atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang bersangkutan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa nilai investasi yang dilaporkan mencerminkan secara akurat nilai aktual dari instrumen keuangan tersebut.

Proses pengujian dimulai dengan pemeriksaan secara seksama terhadap catatan investasi perusahaan, termasuk dokumen-dokumen yang mendukung, seperti laporan portofolio, pernyataan transaksi, dan evaluasi atas kinerja investasi. Auditor akan membandingkan nilai investasi yang tercatat dengan informasi harga pasar terbaru yang tersedia untuk instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Selanjutnya, auditor akan menggunakan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang relevan, terutama yang berkaitan dengan nilai wajar, untuk memastikan bahwa

perusahaan telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar tersebut. Auditor akan melakukan checklist untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan dan prosedur yang diatur dalam PSAK terkait nilai wajar.

Selama proses audit, auditor juga akan memperhatikan apakah terdapat perubahan signifikan dalam nilai investasi dari periode sebelumnya. Hal ini dapat mencakup analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi nilai investasi, seperti kondisi pasar keuangan, perubahan regulasi, atau kinerja keuangan emiten saham atau penerbit obligasi.

**PSP pada Akun Beban Pokok Penjualan
(HPP)**

Dalam konteks industri manufaktur, beban pokok penjualan merupakan komponen yang penting dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan. Beban pokok penjualan dalam industri manufaktur umumnya terdiri dari beberapa unsur yang khas untuk jenis industri ini. Salah satu unsur yang signifikan adalah biaya bahan baku, yang mencakup semua biaya yang terkait dengan memperoleh bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi. Selain itu, beban pokok penjualan manufaktur juga mencakup biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya pengiriman atau distribusi produk jadi ke pelanggan.

Sementara itu, dalam industri dagang, beban pokok penjualan memiliki unsur yang berbeda dibandingkan dengan industri manufaktur. Unsur yang dominan dalam beban pokok penjualan industri dagang adalah biaya pembelian barang dagangan atau persediaan yang dijual kembali. Hal ini mencakup harga beli barang dagangan dari pemasok, biaya pengiriman barang ke gudang atau toko, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan memperoleh barang dagangan untuk dijual kepada pelanggan.

Di sisi lain, dalam industri jasa, beban pokok penjualan memiliki unsur yang lebih terkait dengan penyediaan layanan daripada produksi barang fisik. Unsur yang dominan dalam beban pokok penjualan industri jasa termasuk biaya-biaya langsung yang terkait dengan memberikan layanan kepada pelanggan, seperti biaya tenaga kerja langsung untuk personel yang memberikan layanan, biaya bahan atau peralatan yang

digunakan dalam penyediaan layanan, serta biaya overhead yang terkait dengan operasional penyediaan layanan.

Dalam kesimpulannya, beban pokok penjualan dalam berbagai jenis industri dapat memiliki unsur yang berbeda tergantung pada sifat dan karakteristik dari masing-masing industri tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur yang mempengaruhi beban pokok penjualan merupakan hal yang penting bagi manajemen perusahaan dalam mengelola biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan operasional mereka.

Dalam konteks audit, auditor memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mengevaluasi dan mereview metode serta perhitungan beban pokok penjualan pada klien mereka. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta untuk mengidentifikasi potensi risiko atau ketidaksesuaian.

Salah satu langkah penting dalam proses audit adalah melakukan rekalkulasi terhadap metode dan perhitungan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh klien. Rekalkulasi ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran aritmatika serta kecocokan antara data yang dilaporkan dengan dokumen pendukungnya. Auditor juga akan memastikan bahwa perhitungan beban pokok penjualan dilakukan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Selain itu, auditor juga harus memahami dengan baik sifat dan unsur yang relevan dengan industri di mana klien mereka beroperasi. Setiap industri memiliki karakteristik yang unik, termasuk dalam hal struktur biaya dan komponen beban pokok

penjualan. Oleh karena itu, pengetahuan mendalam tentang industri klien menjadi kunci dalam melakukan audit yang efektif.

Dengan pemahaman yang kuat tentang industri klien, auditor dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang spesifik dan mengarahkan upaya audit mereka secara tepat. Auditor akan memeriksa apakah metode dan perhitungan beban pokok penjualan yang digunakan oleh klien sesuai dengan praktik terbaik dalam industri tersebut, serta apakah mereka mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Secara keseluruhan, pengujian dan rekalkulasi atas metode dan perhitungan beban pokok penjualan merupakan bagian integral dari proses audit. Hal ini tidak hanya meningkatkan keakuratan informasi keuangan yang dilaporkan, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko atau masalah yang mungkin mempengaruhi keandalan laporan keuangan klien. Dengan demikian, pengetahuan yang mendalam tentang industri klien dan pemahaman yang kuat tentang standar akuntansi menjadi kunci dalam menjalankan tugas audit dengan baik.

23.1. PSP dan Asersi pada Akun HPP

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
1	Perbandingan Beban Pokok Penjualan dengan Periode Sebelumnya	X	X	X	X
2	Tinjauan Item Signifikan & Tidak Biasa	X			

23.1.1 Perbandingan Beban Pokok Penjualan dengan Periode Sebelumnya

Dalam tahap Perbandingan Beban Pokok Penjualan dengan Periode Sebelumnya, auditor melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengevaluasi konsistensi dan kecenderungan beban pokok penjualan (HPP) dari periode ke periode. Prosedur ini dimulai dengan pengumpulan rincian bukti atas akun HPP, termasuk dokumentasi terkait transaksi dan biaya produksi.

Selanjutnya, auditor melakukan perbandingan rincian akun HPP dari periode yang sedang diaudit dengan periode sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa atau signifikan dalam biaya produksi atau komponen-komponen HPP lainnya. Auditor juga mencari kecocokan antara fluktuasi yang teridentifikasi dengan perubahan yang diharapkan atau normal dalam kegiatan operasional perusahaan.

Selama proses audit, auditor juga membandingkan persentase laba bruto perusahaan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti lini produk, wilayah geografis, atau segmen bisnis. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja relatif perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan yang memerlukan penjelasan tambahan.

Dengan melakukan tinjauan dan perbandingan ini, auditor dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan

bahwa biaya produksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan mencerminkan dengan tepat biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional. Langkah-langkah ini juga membantu dalam memastikan konsistensi dan keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan, serta memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja operasional relatif perusahaan dalam konteks industri yang bersangkutan.

23.1.2 Pemeriksaan Inputan Material dan Tidak Biasa

Dalam tahap Pemeriksaan Inputan Material dan Tidak Biasa, auditor melanjutkan analisisnya dengan menelusuri perubahan yang tidak biasa atau signifikan dalam persentase laba bruto berdasarkan ambang materialitas pengujian yang telah ditetapkan sebelumnya pada fase perencanaan audit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan yang penting dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Auditor akan melakukan penelusuran terhadap perubahan yang mencolok dalam persentase laba bruto, dan jika perlu, membandingkan perubahan tersebut dengan parameter yang telah ditetapkan selama perencanaan audit. Perubahan yang melewati ambang materialitas pengujian akan menjadi fokus untuk penyelidikan lebih lanjut.

Penyelidikan lebih lanjut ini dapat melibatkan penyusunan prosedur pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap mutasi akun persediaan dan akun lain yang terkait. Auditor akan memeriksa secara detail mutasi persediaan dan transaksi biaya lainnya untuk menentukan apakah biaya tersebut dapat diakui sebagai bagian dari HPP atau tidak.

Manajemen diarahkan oleh auditor untuk memastikan bahwa pencatatan HPP adalah berdasarkan biaya yang murni, yaitu biaya yang langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Umumnya, HPP terdiri dari biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Metode perhitungan alokasi biaya overhead harus diatur secara tertulis sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, sehingga menjadi dasar yang cukup untuk melakukan perhitungan dan memastikan konsistensi dalam pengakuan biaya produksi.

PSP pada Akun Beban Gaji

Siklus penggajian di dalam perusahaan di Indonesia, menurut pendapat kami, adalah salah satu siklus yang cukup signifikan risikonya. Risiko audit dalam siklus penggajian meliputi berbagai aspek yang memerlukan perhatian khusus dari auditor. Pertama, terdapat risiko kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan gaji karyawan, termasuk komponen-komponen seperti tunjangan, bonus, dan potongan. Kesalahan ini dapat terjadi akibat kesalahan manusia atau sistem, yang dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat.

Selain itu, kesesuaian dengan aturan perpajakan juga merupakan aspek kritis dalam siklus penggajian. Perusahaan harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pemotongan pajak penghasilan karyawan, pelaporan pajak, dan pembayaran tepat waktu. Kegagalan dalam mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan denda dan sanksi dari otoritas pajak, serta mengurangi kredibilitas perusahaan.

Lebih lanjut, terdapat risiko pelaporan yang salah atau manipulasi data penggajian yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, auditor harus waspada terhadap tanda-tanda manipulasi atau ketidaksesuaian dalam data penggajian.

Siklus penggajian bermuara pada akun beban gaji dalam laporan keuangan perusahaan. Akun ini mencerminkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kompensasi karyawan, dan merupakan salah satu komponen utama dalam analisis

beban operasional. Karena signifikansinya, auditor perlu melakukan pengujian substantif dan prosedur analitis yang mendalam untuk memastikan bahwa beban gaji telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Auditor juga harus memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol internal yang memadai untuk mengelola risiko terkait siklus penggajian. Kontrol ini mencakup prosedur untuk verifikasi dan persetujuan gaji, pemisahan tugas antara penghitungan dan pembayaran gaji, serta mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan.

Selain itu, siklus penggajian juga menyimpan risiko signifikan karena berkaitan erat dengan akun-akun signifikan lain, seperti beban akrual dan liabilitas imbalan kerja karyawan. Hubungan ini menambah kompleksitas dalam proses audit dan menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai komponen yang terkait.

Akun beban akrual mencerminkan kewajiban yang harus dibayar perusahaan untuk periode akuntansi tertentu, tetapi belum dibayarkan. Dalam konteks penggajian, ini dapat mencakup gaji yang harus dibayar, bonus yang belum disalurkan, serta tunjangan karyawan yang diakui sebagai biaya namun pembayarannya dilakukan di masa depan. Risiko yang muncul di sini adalah potensi kesalahan dalam penghitungan dan pengakuan akrual gaji, yang dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat.

Liabilitas imbalan kerja karyawan, di sisi lain, mencakup berbagai bentuk kompensasi yang dijanjikan kepada karyawan, baik yang dibayarkan selama masa kerja maupun setelah masa pensiun. Ini termasuk program pensiun, asuransi kesehatan, dan

tunjangan lainnya. Risiko utama terkait dengan liabilitas imbalan kerja adalah kesalahan dalam pengukuran dan pelaporan kewajiban ini, terutama karena perhitungan imbalan kerja sering kali melibatkan asumsi aktuarial dan estimasi masa depan yang kompleks.

Auditor harus memeriksa apakah perusahaan telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja, dalam mengukur dan melaporkan liabilitas imbalan kerja. Ini memerlukan pengujian terhadap data aktuarial yang digunakan, validasi asumsi yang mendasari perhitungan, dan verifikasi terhadap catatan pembayaran yang sesuai.

Selain itu, siklus penggajian juga dapat mempengaruhi akun-akun lain seperti kas dan setara kas, terutama karena pembayaran gaji biasanya dilakukan dalam bentuk tunai atau transfer bank. Risiko ketidaksesuaian atau kekurangan kas dapat muncul jika terdapat kesalahan dalam proses pembayaran atau pencatatan transaksi penggajian.

24.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Gaji

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
VB	Beban Gaji				
1	Analisis Beban Gaji	X	X	X	X
2	Beban Imbalan Pasca Kerja		X		X

24.1.1 Analisis Komprehensif atas Beban Gaji

Dalam tahap analisis komprehensif atas beban gaji, auditor melakukan serangkaian prosedur yang bertujuan untuk menilai keakuratan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku terkait dengan pencatatan beban gaji. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah kunci yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pertama, auditor akan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan beban gaji, termasuk daftar gaji, slip gaji karyawan, serta rekonsiliasi gaji bulanan dan tahunan. Dokumen-dokumen ini menyediakan dasar untuk memverifikasi keakuratan jumlah yang dilaporkan dan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar.

Selanjutnya, auditor akan melakukan pengujian atas perhitungan gaji untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan kontrak kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku. Pengujian ini mencakup verifikasi tarif gaji, perhitungan lembur, bonus, dan tunjangan lainnya. Auditor juga akan memastikan bahwa pemotongan pajak dan kontribusi sosial telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai bagian dari analisis komprehensif, auditor akan membandingkan total beban gaji dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya fluktuasi yang tidak biasa atau signifikan. Fluktuasi ini dapat menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan. Auditor juga akan

membandingkan beban gaji dengan anggaran atau proyeksi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk menilai konsistensi dan perencanaan keuangan perusahaan.

Selain itu, auditor akan melakukan analisis tren terhadap beban gaji untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang dapat menunjukkan masalah sistemik atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi penggajian. Misalnya, peningkatan tajam dalam beban gaji tanpa peningkatan yang sebanding dalam pendapatan atau output produksi dapat menandakan efisiensi yang menurun atau kebijakan remunerasi yang kurang efektif.

Terakhir, auditor akan menguji efektivitas pengendalian internal terkait dengan siklus penggajian. Ini melibatkan penilaian terhadap prosedur persetujuan dan otorisasi pembayaran gaji, pemisahan tugas antara penghitungan dan pembayaran, serta mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan.

24.1.2 Analisis Beban Imbalan Pasca Kerja

Dalam tahap analisis beban imbalan pasca kerja, auditor melakukan serangkaian prosedur untuk mengevaluasi keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku terkait dengan kewajiban imbalan pasca kerja. Prosedur ini mencakup pengecekan, pengujian, dan perbandingan hasil perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris perusahaan.

Auditor memulai dengan pengecekan terhadap laporan aktuarial yang disusun oleh aktuaris independen. Laporan ini biasanya mencakup perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan data karyawan, asumsi aktuarial, dan metode

perhitungan yang digunakan. Auditor akan memverifikasi bahwa data yang digunakan dalam perhitungan, seperti usia karyawan, masa kerja, gaji saat ini, dan faktor-faktor lain yang relevan, adalah akurat dan lengkap.

Selanjutnya, auditor melakukan pengujian terhadap asumsi aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja. Asumsi ini mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan asumsi lainnya yang berdampak pada hasil perhitungan kewajiban. Auditor akan menilai kewajaran asumsi tersebut dengan membandingkannya dengan standar industri dan data historis perusahaan. Jika ditemukan perbedaan signifikan, auditor akan melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap kewajiban yang dilaporkan.

Perbandingan hasil perhitungan antara laporan aktuarial dan laporan keuangan perusahaan juga merupakan langkah penting. Auditor akan memastikan bahwa jumlah kewajiban imbalan pasca kerja yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsisten dengan perhitungan aktuarial. Selain itu, auditor akan memeriksa catatan jurnal untuk memastikan bahwa penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan dengan benar.

Auditor juga akan menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja, dalam mengukur dan melaporkan beban imbalan pasca kerja dan kewajiban terkait. Proses ini mencakup verifikasi terhadap metode yang digunakan untuk mengukur kewajiban imbalan kerja, seperti metode unit kredit proyek (*projected unit credit method*), dan evaluasi asumsi aktuarial yang mendasari perhitungan.

Sebagai bagian dari analisis ini, auditor akan memeriksa apakah perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai imbalan pasca kerja sesuai dengan ketentuan PSAK 24. Ini mencakup pengungkapan mengenai asumsi aktuarial yang digunakan, metode perhitungan, perubahan signifikan dalam kewajiban, dan dampak perubahan asumsi terhadap laporan keuangan.

PSP pada Akun Beban Penjualan

Beban penjualan adalah akun beban pertama yang masuk ke dalam kategori beban operasi. Semua pengeluaran perusahaan yang terkait langsung dengan kegiatan penjualan diklasifikasikan pada akun ini. Pengeluaran ini meliputi berbagai biaya, seperti gaji dan komisi tenaga penjualan, biaya promosi dan iklan, biaya perjalanan penjualan, serta biaya distribusi dan pengiriman produk. Tantangan utama dalam klasifikasi beban penjualan adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dimasukkan ke dalam akun ini benar-benar terkait dengan aktivitas penjualan dan tidak termasuk ke dalam kategori beban operasi lainnya.

Tantangan klasifikasi beban penjualan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, auditor harus dapat membedakan antara pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan penjualan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional lainnya. Misalnya, biaya promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan produk tertentu harus diklasifikasikan sebagai beban penjualan, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran umum mungkin lebih tepat dimasukkan ke dalam beban pemasaran atau beban umum dan administrasi.

Kedua, auditor harus memastikan bahwa klasifikasi pengeluaran sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta aturan perpajakan. Menurut prinsip-prinsip akuntansi yang umum di industri, beban penjualan harus dicatat dan diungkapkan dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan. Auditor perlu memahami dengan mendalam sifat dan karakteristik pengeluaran perusahaan yang dapat diakui sebagai beban penjualan.

Untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan, auditor akan melakukan pengujian substantif dan prosedur analitis terhadap akun beban penjualan. Prosedur ini meliputi penelaahan bukti pendukung, seperti faktur, laporan perjalanan, dan catatan distribusi, untuk memverifikasi bahwa pengeluaran tersebut benar-benar terkait dengan aktivitas penjualan. Auditor juga akan melakukan wawancara dengan manajemen dan staf penjualan untuk memahami proses dan kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasikan pengeluaran.

Selain itu, auditor harus memahami ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memastikan bahwa beban penjualan yang diakui oleh perusahaan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Kesalahan dalam klasifikasi beban penjualan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak dan berpotensi menimbulkan sanksi atau denda dari otoritas pajak. Oleh karena itu, auditor harus melakukan penilaian risiko terhadap kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan dalam pengakuan beban penjualan.

25.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Penjualan

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
VC	Beban Penjualan				
1	Analisis Konten dan Perbandingan Beban Penjualan dengan Periode Sebelumnya	X	X	X	X
2	Tinjauan Item Signifikan & Tidak Biasa	X	X		

25.1.1 Analisis Konten Beban Penjualan

Prosedur Analisis Konten Beban Penjualan merupakan langkah penting yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan terkait dengan beban penjualan. Prosedur ini mencakup beberapa tahapan utama yang melibatkan penarikan semua jurnal transaksi pada akun beban penjualan, pengambilan sampel transaksi, dan pemeriksaan dokumen pendukung melalui proses yang dikenal sebagai vouching.

Pertama, auditor akan menarik semua jurnal transaksi yang tercatat dalam akun beban penjualan. Langkah ini memungkinkan auditor untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai semua pengeluaran yang telah diakui sebagai beban penjualan selama periode audit. Setelah itu, auditor akan melakukan pengambilan sampel transaksi untuk diuji lebih lanjut. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik sampling yang sesuai untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih cukup representatif dan dapat mencerminkan populasi transaksi yang lebih luas.

Selanjutnya, auditor akan melakukan vouching dengan cara mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti pendukung secara sistematis untuk memverifikasi kebenaran atau validitas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Bukti pendukung ini bisa berupa faktur, nota pembelian, laporan perjalanan, dan berbagai dokumen lain yang terkait dengan aktivitas penjualan. Proses vouching bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat benar-benar terjadi, telah dicatat dengan benar, dan telah didukung oleh bukti yang sah.

Sebagai bagian dari vouching, auditor juga melakukan pemeriksaan dokumen secara rinci, termasuk memeriksa apakah dokumen tersebut telah diberi otorisasi yang tepat, apakah jumlah yang tercantum sesuai dengan catatan akuntansi, dan apakah transaksi tersebut telah diklasifikasikan dengan benar dalam akun beban penjualan. Auditor akan membandingkan informasi dalam dokumen pendukung dengan entri jurnal untuk memastikan konsistensi dan akurasi pencatatan.

Selain pemeriksaan dokumen, auditor juga akan melakukan tes analitis khusus untuk menilai kewajaran dan konsistensi beban penjualan. Tes analitis ini mencakup perbandingan antara periode yang sedang diaudit dengan periode sebelumnya, analisis tren, dan evaluasi rasio keuangan yang relevan. Tes ini membantu auditor mengidentifikasi fluktuasi yang tidak wajar atau anomali yang mungkin menunjukkan adanya kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan beban penjualan.

Tujuan utama dari prosedur Analisis Konten Beban Penjualan adalah untuk memastikan bahwa beban yang tercatat pada laporan keuangan dapat diandalkan dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan melakukan analisis yang menyeluruh dan sistematis, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selain itu, hasil dari analisis ini membantu manajemen perusahaan dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengeluaran yang terkait dengan penjualan. Dengan memastikan bahwa beban penjualan telah diakui dan dicatat dengan benar,

perusahaan dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

25.1.2 Tinjauan Item Signifikan & Tidak Biasa

Tinjauan item signifikan dan tidak biasa merupakan prosedur kritis dalam audit yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memeriksa transaksi yang berpotensi mengandung risiko tinggi atau anomali yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Prosedur ini dilakukan auditor dengan dua pendekatan utama: perbandingan saldo beban dari periode ke periode dan analisis penyortiran jumlah nominal transaksi.

Pertama, auditor melakukan perbandingan saldo beban dari periode ke periode untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak wajar atau perubahan signifikan dalam akun beban penjualan. Perbandingan ini membantu auditor memahami tren historis dan pola pengeluaran yang terkait dengan penjualan, serta mengidentifikasi periode di mana terjadi lonjakan atau penurunan yang tidak lazim. Dengan memahami perubahan ini, auditor dapat menentukan area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Selain perbandingan saldo, auditor juga melakukan analisis penyortiran jumlah nominal transaksi dari seluruh transaksi penjualan. Dalam prosedur ini, auditor mengurutkan transaksi berdasarkan jumlah nominalnya untuk mengidentifikasi item yang besar atau tidak biasa. Transaksi dengan nilai nominal yang signifikan biasanya mendapatkan perhatian khusus karena potensi dampaknya terhadap laporan keuangan. Transaksi yang besar ini sering kali memerlukan bukti yang lebih komprehensif

untuk memastikan keabsahan dan kepatuhannya terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku.

Untuk item signifikan dan tidak biasa, auditor akan meminta bukti pendukung yang lebih mendalam. Bukti ini dapat berupa kontrak penjualan, faktur, dokumen pengiriman, laporan penerimaan barang, dan komunikasi terkait dengan transaksi tersebut. Auditor akan meneliti dokumen-dokumen ini untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP) atau standar akuntansi keuangan internasional (IFRS).

Selanjutnya, auditor juga akan memeriksa otorisasi transaksi untuk memastikan bahwa semua transaksi besar dan tidak biasa telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Prosedur ini penting untuk mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.

Analisis terhadap item signifikan dan tidak biasa juga mencakup penilaian terhadap dampak materialitasnya. Auditor akan menilai apakah transaksi tersebut memiliki dampak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Jika item tersebut material, auditor akan memastikan bahwa pengungkapan yang memadai telah dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar pengungkapan yang berlaku.

Proses tinjauan ini membantu auditor dalam mengidentifikasi area berisiko tinggi yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.

Dengan melakukan tinjauan yang menyeluruh dan sistematis terhadap item signifikan dan tidak biasa, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji material dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

**PSP pada Akun Beban Umum dan
Administrasi**

Beban umum dan administrasi merupakan kategori beban operasi yang mencakup berbagai jenis pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung operasional sehari-hari suatu perusahaan, namun tidak secara langsung terkait dengan produksi atau penjualan produk. Beban ini mencakup sejumlah besar jenis pengeluaran, mulai dari beban gaji untuk staf administrasi, beban depresiasi aset tetap, beban utilitas seperti listrik dan air, hingga beban sewa kantor, beban perlengkapan kantor, dan beban asuransi.

Beban gaji untuk staf administrasi meliputi upah, gaji, dan tunjangan lain yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dalam fungsi administrasi dan manajemen. Pengeluaran ini penting untuk menjaga kelancaran operasional administrasi dan memastikan bahwa fungsi-fungsi pendukung berjalan efisien.

Beban depresiasi mencakup alokasi biaya atas penyusutan aset tetap yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Beban ini dihitung berdasarkan umur manfaat aset dan metode depresiasi yang dipilih oleh perusahaan, seperti metode garis lurus atau saldo menurun. Depresiasi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penggunaan dan penurunan nilai aset dari waktu ke waktu.

Beban utilitas mencakup biaya penggunaan listrik, air, gas, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk operasional kantor dan fasilitas lainnya. Pengeluaran ini sering kali cukup signifikan, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak fasilitas atau yang beroperasi dalam industri yang memerlukan konsumsi energi tinggi.

Selain itu, beban sewa kantor mencakup pembayaran untuk ruang kantor atau fasilitas lain yang disewa oleh perusahaan. Beban ini penting karena berkaitan dengan lokasi fisik operasional perusahaan. Beban perlengkapan kantor mencakup biaya pembelian barang-barang habis pakai yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti kertas, tinta, alat tulis, dan peralatan kantor lainnya.

Beban asuransi mencakup premi yang dibayarkan untuk berbagai jenis perlindungan asuransi, termasuk asuransi kesehatan karyawan, asuransi properti, dan asuransi tanggung jawab hukum. Beban ini penting untuk melindungi aset perusahaan dan mengurangi risiko finansial akibat kejadian tak terduga.

Dalam konteks audit, auditor akan melakukan prosedur untuk memastikan bahwa semua beban umum dan administrasi telah diakui dan dicatat dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur ini mencakup pengujian substantif dan prosedur analitis untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan beban yang dicatat. Auditor akan memeriksa bukti pendukung, seperti faktur, kontrak, dan dokumen lain yang relevan, untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut sah dan benar-benar terjadi.

Dengan demikian, pengelolaan dan pelaporan beban umum dan administrasi yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi sangat penting bagi perusahaan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tetapi juga membantu manajemen dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional.

26.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Umum & Administrasi

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
VD	Beban Umum dan Administrasi				
1	Analisis konten pada Beban Umum Administrasi dan Beban Umum Lainnya	X	X	X	X
2	Tinjauan Dokumentasi Penunjang	X	X	X	
3	Kelengkapan Konfirmasi dari Pengacara Perusahaan			X	X

26.1.1 Analisis konten pada Beban Umum Administrasi dan Beban Umum Lainnya

Prosedur analisis konten pada akun Beban Umum Administrasi dan Beban Umum Lainnya dilakukan dengan metode yang serupa dengan analisis konten pada akun Beban Penjualan. Auditor akan menerapkan beberapa langkah sistematis untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan validitas dari pengeluaran yang dicatat dalam akun-akun tersebut.

Pertama, auditor akan menarik semua jurnal transaksi yang tercatat dalam akun Beban Umum Administrasi dan Beban Umum Lainnya. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh pengeluaran yang telah diakui oleh perusahaan dalam periode audit. Pengumpulan data ini memungkinkan auditor untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berbagai jenis beban yang termasuk dalam kategori ini.

Selanjutnya, auditor akan melakukan pengambilan sampel transaksi dari populasi jurnal transaksi yang telah ditarik. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang tepat untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih cukup representatif. Sampel yang diambil ini akan mencakup transaksi-transaksi yang dianggap material serta yang menunjukkan karakteristik tidak biasa atau signifikan.

Setelah sampel transaksi dipilih, auditor akan melanjutkan dengan pemeriksaan dokumen pendukung, yang dikenal sebagai vouching. Vouching melibatkan pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti pendukung seperti faktur, kuitansi, kontrak, laporan biaya, dan dokumen lain yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap transaksi yang tercatat dalam jurnal benar-benar terjadi, telah dicatat dengan benar, dan didukung oleh bukti yang sah.

Selain itu, auditor akan memeriksa dokumen pendukung untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan memiliki dasar yang valid. Hal ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Auditor akan memeriksa apakah pengeluaran tersebut telah diberi otorisasi yang tepat dan apakah klasifikasinya dalam akun Beban Umum Administrasi dan Beban Umum Lainnya sudah sesuai.

Dalam proses pemeriksaan, auditor juga akan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen pendukung untuk menilai kewajaran dan konsistensi pengeluaran. Mereka akan membandingkan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung dengan entri jurnal untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian atau anomali yang signifikan. Selain itu, auditor

akan menilai apakah metode alokasi biaya, seperti depresiasi atau alokasi overhead, telah diterapkan dengan benar dan konsisten.

Prosedur analisis konten ini penting untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan bebas dari salah saji material. Dengan melakukan analisis yang menyeluruh dan mendalam, auditor dapat memastikan bahwa semua pengeluaran yang dicatat dalam akun Beban Umum Administrasi dan Beban Umum Lainnya telah diakui, diukur, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Proses ini juga membantu auditor dalam mengidentifikasi potensi area risiko yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti pengeluaran yang tidak sah atau pengklasifikasian yang salah. Dengan demikian, analisis konten pada beban umum administrasi dan beban umum lainnya berkontribusi secara signifikan terhadap keandalan dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

26.1.2 Tinjauan Dokumentasi Penunjang

Proses tinjauan dokumentasi penunjang atas semua transaksi beban umum dan administrasi merupakan prosedur penting dalam audit yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas pengeluaran yang tercatat dalam laporan keuangan. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah kunci: mempopulasikan data, mengambil sampel, dan melakukan vouching.

Langkah pertama dalam proses tinjauan dokumentasi penunjang adalah mempopulasikan data, yang berarti

mengumpulkan dan mengorganisir semua jurnal transaksi yang terkait dengan beban umum dan administrasi. Auditor akan menarik data dari sistem akuntansi perusahaan untuk mendapatkan daftar lengkap semua transaksi yang telah diakui dalam periode audit. Data ini mencakup berbagai jenis pengeluaran seperti beban gaji, beban depresiasi, beban utilitas, dan beban operasional lainnya yang masuk dalam kategori beban umum dan administrasi.

Setelah data dipopulasikan, auditor akan melakukan pengambilan sampel transaksi. Teknik sampling digunakan untuk memilih transaksi yang akan diuji lebih lanjut. Pengambilan sampel ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih representatif dari populasi transaksi yang lebih luas. Auditor dapat menggunakan metode sampling statistik atau non-statistik, tergantung pada konteks audit dan risiko yang terkait. Pengambilan sampel ini dirancang untuk mencakup transaksi dengan nilai nominal signifikan serta transaksi yang menunjukkan karakteristik tidak biasa atau risiko tinggi.

Langkah selanjutnya adalah vouching, yaitu pemeriksaan dokumen pendukung untuk setiap transaksi yang termasuk dalam sampel. Vouching melibatkan verifikasi bukti-bukti pendukung seperti faktur, kuitansi, kontrak, laporan biaya, dan dokumen lain yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat benar-benar terjadi, telah dicatat dengan benar, dan didukung oleh bukti yang sah. Auditor akan meneliti apakah dokumen pendukung tersebut menunjukkan bahwa transaksi telah diberi otorisasi yang tepat dan apakah jumlah yang tercantum sesuai dengan catatan akuntansi.

Selama vouching, auditor juga akan memeriksa apakah transaksi tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memiliki dasar yang valid. Hal ini meliputi penilaian terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP) atau standar akuntansi internasional (IFRS). Auditor akan memastikan bahwa pengeluaran tersebut telah diklasifikasikan dengan benar dalam akun beban umum dan administrasi.

Tujuan dari tinjauan dokumentasi penunjang adalah untuk memberikan keyakinan bahwa semua beban umum dan administrasi yang dicatat dalam laporan keuangan adalah akurat, valid, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses ini membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko salah saji material yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Selain itu, tinjauan ini juga memastikan bahwa pengeluaran perusahaan telah dicatat dan dilaporkan dengan benar, yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, tinjauan dokumentasi penunjang adalah langkah kritis dalam proses audit yang berkontribusi terhadap transparansi, keandalan, dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Prosedur ini memastikan bahwa semua pengeluaran yang tercatat telah melalui verifikasi yang menyeluruh dan didukung oleh bukti yang cukup, sehingga memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pemangku kepentingan mengenai integritas keuangan perusahaan.

26.1.3 Kelengkapan Konfirmasi dari Pengacara Perusahaan

Dalam proses audit, auditor harus memastikan kelengkapan konfirmasi dari pengacara perusahaan sebagai bagian dari evaluasi komprehensif terhadap kewajiban kontinjensi dan potensi beban yang belum tercatat. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kewajiban yang mungkin belum dicatat dalam laporan keuangan perusahaan.

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah mengirimkan surat konfirmasi kepada pengacara perusahaan. Surat ini meminta informasi tentang semua kasus hukum, klaim, dan kontinjensi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Informasi yang diminta mencakup status terkini dari setiap kasus hukum, perkiraan potensi kerugian, dan kemungkinan penyelesaiannya.

Setelah menerima konfirmasi dari pengacara, auditor akan mengecek kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan. Auditor akan membandingkan informasi dari pengacara dengan catatan internal perusahaan untuk memastikan bahwa semua kewajiban potensial telah diungkapkan dan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor juga akan mengevaluasi apakah ada beban yang belum tercatat akibat dari litigasi, klaim hukum, atau kewajiban kontinjensi lainnya.

Dalam evaluasi ini, auditor akan meneliti apakah terdapat beban yang belum tercatat yang diakibatkan dari litigasi yang sedang berlangsung atau kewajiban hukum lainnya. Auditor akan mempertimbangkan materialitas dari potensi beban ini dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Jika ada kemungkinan besar bahwa kewajiban ini akan mengakibatkan arus keluar

sumber daya yang dapat diukur secara andal, maka kewajiban tersebut harus diakui dalam laporan keuangan.

Auditor akan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan kewajiban kontinjensi dan pengungkapan klaim hukum. PSAK yang relevan mungkin termasuk PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi. Auditor akan memeriksa apakah pengungkapan yang memadai telah dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk rincian tentang sifat kewajiban, estimasi waktu penyelesaian, dan potensi dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan.

Selain mengandalkan konfirmasi dari pengacara, auditor juga dapat melakukan pengujian tambahan untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi. Hal ini bisa mencakup diskusi langsung dengan pengacara perusahaan, pemeriksaan dokumen hukum, dan analisis kasus hukum yang tercatat di pengadilan atau lembaga terkait lainnya. Auditor juga akan memastikan bahwa semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan dan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko yang terkait dengan kewajiban kontinjensi.

Prosedur kelengkapan konfirmasi dari pengacara perusahaan merupakan langkah penting dalam proses audit untuk memastikan bahwa semua kewajiban potensial telah diidentifikasi, diukur, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Dengan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap informasi yang diberikan oleh pengacara, auditor dapat memberikan keyakinan yang lebih besar mengenai keandalan dan integritas laporan keuangan perusahaan. Proses ini

membantu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan bebas dari salah saji material yang berkaitan dengan kewajiban hukum dan kontinjensi.

PSP pada Akun Beban Keuangan

Klasifikasi beban keuangan dalam perusahaan mencakup berbagai jenis pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan dan manajemen keuangan. Beban keuangan ini tidak termasuk beban administrasi bank dan beban sejenis lainnya, tetapi lebih berfokus pada biaya-biaya yang timbul dari struktur modal dan aktivitas keuangan perusahaan.

Beban keuangan umumnya mencakup beberapa komponen utama seperti beban bunga, beban kerugian kurs mata uang asing, biaya penerbitan utang, biaya amortisasi diskon atau premi utang, biaya pengelolaan risiko keuangan, biaya dividen atas saham preferen, dan biaya restrukturisasi utang. Beban bunga adalah salah satu komponen terbesar dari beban keuangan. Ini mencakup bunga yang dibayarkan atas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, obligasi, dan instrumen utang lainnya. Beban bunga ini harus diakui dalam laporan keuangan secara periodik dan dihitung berdasarkan suku bunga yang berlaku serta jumlah pokok utang yang masih tersisa.

Perusahaan yang beroperasi secara internasional atau memiliki pinjaman dalam mata uang asing mungkin mengalami fluktuasi nilai tukar. Beban kurs valuta asing ini mencakup kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal perusahaan. Biaya penerbitan utang mencakup biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi atau pinjaman bank. Ini termasuk biaya hukum, biaya audit, biaya agen penjualan, dan biaya lain yang terkait dengan proses penerbitan. Biaya ini biasanya diamortisasi selama masa berlaku utang tersebut. Ketika utang diterbitkan dengan diskon atau premi, perusahaan perlu mengamortisasi

jumlah tersebut selama masa utang. Amortisasi diskon atau premi ini juga termasuk dalam beban keuangan dan dicatat dalam laporan laba rugi setiap periode akuntansi.

Perusahaan sering menggunakan berbagai instrumen derivatif untuk mengelola risiko keuangan seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas. Biaya yang terkait dengan penggunaan instrumen ini, seperti biaya kontrak opsi, swap, atau forward, juga termasuk dalam beban keuangan. Dividen yang dibayarkan atas saham preferen juga diklasifikasikan sebagai beban keuangan, meskipun secara teknis ini merupakan distribusi laba. Hal ini karena dividen saham preferen sering kali memiliki sifat tetap dan harus dibayarkan sebelum dividen saham biasa, mirip dengan beban bunga utang. Ketika perusahaan melakukan restrukturisasi utang, ada berbagai biaya yang mungkin timbul, seperti biaya konsultan keuangan, biaya hukum, dan biaya administrasi. Biaya-biaya ini juga masuk dalam kategori beban keuangan.

Klasifikasi yang tepat dan pengakuan beban keuangan dalam laporan keuangan sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan keuangan perusahaan dan beban yang ditanggung perusahaan dalam aktivitas pembiayaannya. Auditor harus memastikan bahwa semua beban keuangan telah diakui dan diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 73 mengenai Sewa, dan bahwa pengungkapan yang memadai telah dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, transparansi dan keandalan informasi keuangan perusahaan dapat terjaga, memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pemangku kepentingan mengenai posisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

27.1. PSP dan Asersi pada Akun Beban Keuangan

Indeks	Akun dan PSP	Asersi Relevan			
		O	M	C	P
1	Analisis Beban Keuangan	X	X	X	X
2	Perubahan Nilai Investasi		X		X

27.1.1 Analisis Beban Keuangan

Analisis beban keuangan dilakukan auditor dengan cara yang sistematis dan komprehensif untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Proses ini dimulai dengan pemahaman mendalam tentang struktur modal dan aktivitas keuangan perusahaan yang diaudit, termasuk jenis-jenis beban keuangan yang ada seperti beban bunga, biaya penerbitan utang, biaya amortisasi diskon atau premi utang, biaya pengelolaan risiko keuangan, beban kurs valuta asing, dan biaya restrukturisasi utang.

Pertama, auditor mengumpulkan semua dokumen terkait yang mendukung transaksi beban keuangan. Ini mencakup perjanjian pinjaman, kontrak obligasi, laporan bank, dokumen penerbitan utang, serta kontrak derivatif. Auditor kemudian memverifikasi keabsahan dan keakuratan dokumen-dokumen ini melalui proses vouching, yaitu dengan menelusuri kembali bukti-bukti transaksi hingga sumber aslinya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan telah dicatat dengan benar dalam pembukuan.

Selanjutnya, auditor melakukan rekalkulasi terhadap beban bunga yang diakui dalam laporan keuangan. Ini dilakukan dengan menghitung ulang bunga yang harus dibayar berdasarkan

suku bunga yang berlaku dan saldo pokok utang yang masih tersisa. Auditor juga memeriksa apakah perusahaan telah mengamortisasi biaya penerbitan utang, diskon atau premi utang sesuai dengan metode yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Untuk beban kurs valuta asing, auditor melakukan analisis fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal perusahaan. Auditor memeriksa apakah kerugian kurs telah diakui secara benar dalam laporan keuangan dan apakah metode yang digunakan untuk mengukur kerugian tersebut konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi.

Dalam hal biaya pengelolaan risiko keuangan, auditor menilai apakah biaya yang timbul dari penggunaan instrumen derivatif seperti opsi, swap, atau forward telah dicatat dengan benar. Auditor memeriksa kontrak-kontrak derivatif dan mengkonfirmasi bahwa biaya-biaya ini telah diukur dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selain itu, auditor juga menilai kelayakan dan keabsahan biaya restrukturisasi utang. Ini mencakup verifikasi biaya konsultan keuangan, biaya hukum, dan biaya administrasi yang timbul selama proses restrukturisasi. Auditor memastikan bahwa biaya-biaya ini telah dicatat dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan.

Akhirnya, auditor melakukan prosedur analitis untuk membandingkan beban keuangan dengan periode sebelumnya dan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Auditor menganalisis tren beban keuangan untuk mengidentifikasi adanya fluktuasi yang signifikan atau tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Keseluruhan proses analisis ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa beban keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran yang wajar tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan.

27.1.2 Pengujian Perubahan Nilai Investasi

Selain analisis beban keuangan, auditor juga harus melakukan pengujian perubahan nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat meyakini nilai saldo dari beban keuangan di laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan mendalam untuk memastikan bahwa semua perubahan nilai investasi telah dicatat dan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pertama, auditor mengidentifikasi semua investasi yang dimiliki oleh perusahaan, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya. Auditor mengumpulkan dokumen pendukung terkait investasi ini, seperti laporan portofolio investasi, kontrak pembelian, laporan keuangan entitas yang diinvestasikan, dan catatan perubahan nilai pasar.

Selanjutnya, auditor melakukan verifikasi terhadap harga pasar dari investasi tersebut pada tanggal pelaporan. Untuk saham dan obligasi yang diperdagangkan di pasar terbuka, auditor dapat menggunakan harga penutupan yang diterbitkan oleh bursa efek atau sumber independen terpercaya lainnya. Auditor juga memeriksa apakah perusahaan telah menggunakan nilai pasar

yang tepat dan apakah penilaian ini konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan.

Dalam kasus di mana nilai pasar tidak tersedia, seperti untuk investasi dalam entitas yang tidak diperdagangkan secara publik, auditor akan mengevaluasi metode penilaian yang digunakan oleh perusahaan. Auditor menilai apakah metode penilaian ini telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti menggunakan model penilaian berbasis arus kas yang didiskontokan (*discounted cash flow model*) atau metode penilaian lainnya yang diakui. Auditor juga mengevaluasi asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian ini, seperti tingkat diskonto, pertumbuhan pendapatan, dan tingkat inflasi, untuk memastikan bahwa asumsi tersebut realistis dan didukung oleh bukti yang memadai.

Selain itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara nilai investasi yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan nilai pasar yang telah diverifikasi. Auditor menelusuri kembali perubahan nilai investasi yang telah diakui dalam laporan keuangan, baik berupa keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dan memastikan bahwa perubahan ini telah dicatat dengan benar. Auditor juga memeriksa apakah perusahaan telah mengungkapkan secara memadai perubahan nilai investasi ini dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan standar pengungkapan yang berlaku.

Untuk memastikan kelengkapan dan akurasi perubahan nilai investasi, auditor juga dapat melakukan prosedur konfirmasi dengan pihak ketiga, seperti bank kustodian atau manajer investasi, untuk mendapatkan konfirmasi independen mengenai saldo investasi dan perubahan nilainya.

Referensi

1. Rummell JE, Weickgenannt AB. Planning for substantive testing at the assertion level: A training activity and mini case. *Current Issues in Auditing*. 2021;15(1):15–30.
2. Ernst & Young. EY GAM - Primary Substantive Procedures (PSP) by Account [Internet]. 2018. p. 20. Available from: ey.com
3. American Institute of Certified Public Accountant (AICPA). *Audit Guide: Analytical Procedures*. Durham, NC: American Institute of Certified Public Accountants, Inc; 2012.
4. Dowling C, Leech SA. A Big 4 firm's use of information technology to control the audit process: How an audit support system is changing auditor behavior. *Contemporary accounting research*. 2014;31(1):230–52.
5. Sasongko AW, Nugraha FK, Alam MD. *Audit Untuk Auditee UMKM* [Internet]. 1st ed. Malang: Penerbit FA; 2023 [cited 2023 Mar 2]. 93 p. Available from: www.penerbitfa.com
6. Pasewark WR, Strawser JR. An investigation of auditor judgments of the effect of preliminary analytical procedures on the extent of substantive testing. *Accounting & Finance*. 1992;32(2):91–108.
7. Messier WF, Plumlee RD. The Effects of Anticipation and Frequency of Errors on Auditors' Selection of Substantive Procedures. *Accounting and Business Research*. 1987;17(68):349–57.

8. Arens A, Randal E, Beasley MS. Auditing: The Art and Science of Assurance Engagements. Fifteenth Canadian Edition. Pearson Canada; 2021.
9. Arens A, Randal E, Beasley MS. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. Fourteenth. Fourteenth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall; 2012.
10. Rouse RW. The Five Assertions: A Revisit. The CPA Journal. 1993;63(3):54.
11. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar [Internet]. 2013. Available from: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>
12. Price Waterhouse Coopers. PSAK 71 - Financial Instruments Understanding the Basics. PricewaterhouseCoopers. 2019;36.
13. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 14: Persediaan [Internet]. 2008. Available from: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>
14. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 16: Aset Tetap [Internet]. 2015. Available from: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>
15. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing [Internet]. 2010. Available from: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>
16. Ramirez J. Accounting for derivatives: advanced hedging under IFRS 9. John Wiley & Sons; 2015.

17. Antill N, Lee K. Company Valuation Under IFRS 2e: Interpreting and Forecasting Accounts Using International Financial Reporting Standards. Harriman House Limited; 2008.
18. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Graha Akuntan: Jakarta; 2017.

Tentang Penulis

**ANANTA W. SASONGKO,
SE., M.S.A., ACPA.**

Pada tahun 2023, penulis memulai proyek penulisan dan penerbitan serangkaian buku dalam "UMKM Series" dengan tujuan membantu pelaku dan pemilik UMKM di Indonesia meningkatkan tata kelola perusahaan mereka. Buku yang telah diterbitkan antara lain: Audit untuk Auditee UMKM (2023) dan Menyusun Laporan Keuangan UMKM (2024).



Saat ini, penulis menjabat sebagai Direktur Operasional di FA Indonesia dan PT FA Indonesia Ventura. Perusahaan ini fokus pada konsultasi akuntansi, manajemen, dan penyediaan modal ventura bagi UMKM di Jawa Timur.

Selain menjalankan tugas di perusahaan, penulis juga aktif sebagai Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi di Universitas Merdeka Malang. Pengalaman profesional penulis mencakup lebih dari satu dekade bekerja sebagai akuntan di berbagai perusahaan seperti PT Astra International Tbk, Persada Hospital, Bukitjaya Group, Mount Scopus Group, dan PJM Group. Penulis juga memiliki pengalaman sebagai auditor di Ernst & Young LLP, salah satu firma akuntansi terbesar di dunia (Big 4 Public Accountant Firm).



**FARHANI K. NUGRAHA,
S.E., M.S.A., Ak., CA.**

Penulis adalah seorang akuntan profesional yang mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasanya kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan (KJA) Farhani

K.N., S.E., M.S.A., Ak., CA.

Penulis telah banyak terlibat untuk membantu usaha kecil dan menengah dalam menerapkan sistem akuntansi serta mengelola keuangan. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2015. Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntan di Universitas Brawijaya, Malang. Dari universitas yang sama memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi pada tahun 2017. Kemudian diberikan gelar Chartered Accountant oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2018.

Saat ini penulis juga mengabdikan diri di Institut Teknologi dan Bisnis Tuban sebagai Wakil Rektor II dan Dosen Tetap pada Program Studi Bisnis Digital. Buku yang pernah ditulis dan diterbitkan antara lain: Akuntansi Manajemen Untuk UMKM (2020), Audit Untuk Auditee UMKM (2023), dan Menyusun Laporan Keuangan UMKM (2024).

**MUHAMMAD DIMAR
ALAM, S.E., M.Acc.**

Penulis adalah seorang alumnus dari School of Business, Australian National University, Canberra, Australia.

Berpengalaman lebih dari 4 tahun dalam bidang finance dan akuntansi (Rindapro,



MGS) serta Auditor di salah satu Firma Akuntansi Terbesar di Dunia (Big 4 Public Accountant Firm) Ernst & Young LLP. Pernah bekerja pada salah satu Perusahaan di Australia sebagai Finance Controller. Penulis juga pernah menjadi salah satu Key Account Manager pada FA Indonesia dan menjadi partner di FA Consult. Sebelum akhirnya di tahun 2022 penulis bersama beberapa rekanan mendirikan L9 Consulting.

Penulis juga memiliki pengalaman menulis buku yang berjudul Akuntabilitas dan Pelaporan Keberlanjutan: Konsep dan Materialitas (2022) dan Audit Untuk Auditee UMKM (2023). Saat ini, penulis berprofesi sebagai Dosen Akuntansi pada Universitas Brawijaya Malang dalam rumpun pengajaran Manajemen Keuangan & Risiko, Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan. Penulis juga menjadi praktisi dan menjabat sebagai Managing Partner dari L9 Consulting Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan dan solusi bisnis yang berada di kota Malang dengan klien-klien yang berasal dari sektor publik dan sektor privat.